



KELAS 12

PANCASILA

Pancasila dan Tanggung Jawab Sosial:

Buku Pegangan Pancasila untuk Siswa Kelas 12

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya e-book Pancasila ini yang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh seluruh pelajar Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila, identitas nasional, serta prinsip bernegara, yang bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan.

E-book ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Pancasila Fase E (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka). Konten e-book ini dirancang agar peserta didik dapat memahami materi Pancasila secara komprehensif, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi utama, e-book ini juga dilengkapi dengan latihan soal, pembahasan, serta tautan ke sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran interaktif.

E-book ini merupakan bagian dari platform [Fitri](#), sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan akses gratis ke berbagai materi belajar, termasuk e-book, latihan soal, dan video pembelajaran interaktif untuk seluruh anak Indonesia. Fitri hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inklusi, Fitri berkomitmen untuk membantu seluruh siswa, di mana pun berada, agar dapat belajar secara mandiri, efektif, dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan tujuan besar pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersedianya e-book ini. Semoga kehadiran e-book Pancasila ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar peserta didik dan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi bangsa.

Jakarta, Juni 2025

Tim Fitri

Daftar Isi

BAB 1: MENGHIDUPKAN PANCASILA SETIAP HARI	5
1. Pengaruh dan Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Modern	5
2. Sejarah Pancasila sebagai Dasar Negara dan Identitas Bangsa Indonesia	7
3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Aktivitas Sehari-hari	11
Rangkuman	16
Latihan Soal	18
Referensi	20
BAB 2: PANCASILA DI KANCAH GLOBAL DUNIA	20
1. Kekuatan dan Kelemahan Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Global	21
2. Peluang dan Tantangan Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Global	24
3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Menghadapi Globalisasi	26
Rangkuman	28
Latihan Soal	31
Referensi	33
BAB 3: MENJADI WARGA NEGARA YANG TANGGUH	34
1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945	34
2. Pelanggaran Hak dan Kewajiban serta Upaya Pencegahannya	38
3. Mengenal Contoh Pelanggaran Hak dan Kewajiban Sehari-hari	45
4. Mempromosikan Kampanye Antipelanggaran Hak dan Kewajiban	47
Rangkuman	49
Latihan Soal	50
Referensi	52
BAB 4: MENGUPAS HAK DAN KEWAJIBAN	52
1. Merancang Gagasan Solutif atas Pelanggaran Hak dan Kewajiban	54
2. Merancang Mode P4 untuk Mengatasi Pelanggaran Hak	61
Rangkuman	70
Latihan Soal	71
Referensi	73
BAB 5: SEMANGAT GOTONG ROYONG	54
1. Kerja Sama dalam Kehidupan Bergotong Royong	74
2. Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat	78
3. Ancaman terhadap Gotong Royong	80
4. Menghidupkan Kembali Semangat Gotong Royong di Era Modern	83
Rangkuman	85

Latihan Soal	88
Referensi	90
BAB 6: LEMBAGA NEGARA	91
1. Makna Lembaga Negara: Pilar Kestabilan Negara	89
2. Tugas dan Peran Lembaga Negara: Penggerak Pemerintahan	93
3. Pengaruh Lembaga Negara: Dampak bagi Kehidupan Masyarakat	96
Rangkuman	99
Latihan Soal	102
Referensi	104
BAB 7: DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM	105
1. Hakikat Demokrasi: Esensi dan Makna	106
2. Dinamika Demokrasi: Tantangan dalam Perjalanan di Indonesia	113
3. Pemilihan Umum: Suara Rakyat, Penentu Masa Depan	119
Rangkuman	122
Latihan Soal	125
Referensi	127



BAB 1

MENGHIDUPKAN PANCASILA SETIAP HARI

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**

Menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral berlandaskan pada keimanan dan ketaatan kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi akhlak mulia dalam setiap tindakan di kehidupan sehari-hari.

- ▷ **Mandiri**

Mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai moral yang ada dalam Pancasila.

Tujuan Pembelajaran: Pancasila sebagai Pedoman

1. Pancasila sebagai Nilai Kodrati

- ▷ Menjelaskan pengertian nilai kodrati sebagai nilai dasar yang melekat pada manusia serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila.
- ▷ Mengidentifikasi contoh nilai kodrati yang terkandung dalam sila-sila Pancasila serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan dan diaplikasikan dalam kehidupan modern.

2. Pancasila sebagai Identitas Bangsa

- ▷ Memahami sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan simbol identitas nasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia.
- ▷ Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun karakter bangsa dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.

Kata Kunci: Identitas Bangsa, Pancasila, Sejarah Pancasila, Keadilan, Persatuan, Nilai Kehidupan.

3. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan

- ▷ Menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan dalam interaksi sosial di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
- ▷ Menganalisis berbagai studi kasus tentang penerapan Pancasila di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat untuk memahami tantangan dan dampaknya.
- ▷ Memahami berbagai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi serta dapat merumuskan solusi untuk menjaga relevansi dan penerapannya.



F I T R I



1. Pengaruh dan Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Modern

Pancasila berisi nilai-nilai dasar yang melekat pada manusia, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai ini tetap relevan dalam kehidupan modern dan dapat diterapkan dalam hubungan sosial dan penyelesaian masalah, membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan menjaga identitas bangsa di tengah tantangan global.

Pengertian dan Hubungan Nilai Kodrati dengan Pancasila

a. Definisi Nilai Kodrati

Nilai kodrati adalah nilai dasar yang alami, inheren pada manusia dan alam, sering dianggap sebagai prinsip moral yang universal.

b. Kaitan dengan Pancasila

Pancasila merefleksikan nilai kodrati karena mencakup prinsip dasar universal seperti keadilan dan kemanusiaan, yang penting tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

c. Pancasila Sebagai Lebih dari Ideologi

Di Indonesia, Pancasila bukan hanya sebuah ideologi tetapi juga nilai yang sudah terintegrasi dalam budaya dan sejarah, menekankan pentingnya menghargai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.

Aplikasi Nilai Kodrati dalam Pancasila pada Kehidupan Modern

a. Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama):

- ▷ **Implikasi Modern:** Memperkuat pentingnya kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat yang pluralis. Di era global, nilai ini mendukung dialog antaragama dan menghormati kepercayaan individu, mempromosikan kedamaian dan koeksistensi.
- ▷ **Contoh Aplikasi:** Program-program pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil yang fokus pada kerukunan umat beragama, seperti dialog antaragama dan festival keberagaman budaya.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua):

- ▷ **Implikasi Modern:** Fundamental dalam mempromosikan hak asasi manusia dan martabat individu, sila ini menjadi dasar dalam membentuk kebijakan yang berkaitan dengan migrasi, tenaga kerja, dan pemberian hak-hak sipil.
- ▷ **Contoh Aplikasi:** Kebijakan non-diskriminasi di tempat kerja, serta undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja migran dan minoritas.

c. Persatuan Indonesia (Sila Ketiga):

- ▷ **Implikasi Modern:** Esensial untuk menjaga integritas nasional di tengah keberagaman etnik dan budaya. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan, menginspirasi program-program inklusi sosial dan pendidikan multikultural.



Festival Budaya Minang – Shutterstock.com. 2499066625

- ▷ **Contoh Aplikasi:** Kegiatan-kegiatan yang mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika, seperti festival budaya lintas etnik dan kurikulum sekolah yang mengajarkan tentang keberagaman Indonesia.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila Keempat):

- ▷ **Implikasi Modern:** Mendukung penerapan demokrasi yang sehat, di mana keputusan diambil berdasarkan diskusi dan pertimbangan bijak dari semua pihak yang terlibat.
- ▷ **Contoh Aplikasi:** Mekanisme pemilihan umum yang transparan, forum-forum masyarakat sipil, dan proses legislasi yang membutuhkan masukan dari masyarakat luas.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima):

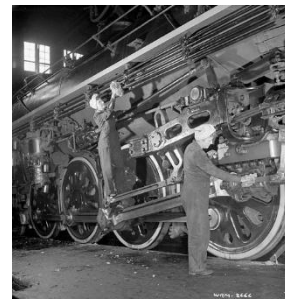
- ▷ **Implikasi Modern:** Menuntut distribusi sumber daya yang adil dan akses yang setara ke peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- ▷ **Contoh Aplikasi:** Program pemerataan ekonomi seperti reformasi agraria, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang mendukung UMKM untuk memastikan kesejahteraan yang merata.



Jejak Pancasila

Sila kedua Pancasila lahir dari kesadaran dunia akan pentingnya hak asasi manusia, yang semakin menguat setelah Perang Dunia II. Saat itu, banyak negara mulai mendorong kesetaraan dan menghargai hak setiap individu. Jadi, ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi juga bagian dari gerakan global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab!

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan di rumah bundar selama Perang Dunia II – wikipedia.org



Contoh Soal

Jelaskan bagaimana nilai kodrati yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan modern, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak kelompok minoritas!

Jawaban:

Nilai kodrati dalam sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dapat diterapkan dalam kehidupan modern dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak kelompok minoritas. Contoh penerapannya adalah melalui kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja, perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, serta pemberian akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Pembahasan:

Sila kedua mengandung nilai universal seperti keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang merupakan bagian dari nilai kodrati. Dalam kehidupan modern, tantangan seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi isu penting. Oleh karena itu, penerapan nilai kemanusiaan ini diwujudkan melalui peraturan dan kebijakan yang melindungi semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar moral dan etika bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan menganalisis studi kasus penerapan atau pelanggaran nilai-nilai Pancasila, memahami tantangan global yang memengaruhi sikap masyarakat, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan solutif dalam menjaga relevansi Pancasila.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang, lalu pilih salah satu studi kasus berikut yang sudah disediakan di buku ini:

Kasus	Keterangan
Konflik Antar Pelajar	Tawuran pelajar antar sekolah karena fanatisme kelompok
Intoleransi di Media Sosial	Ujaran kebencian atau hoaks yang memecah belah masyarakat
Kesenjangan Ekonomi Daerah	Ketimpangan pembangunan antar wilayah Indonesia
Pengabaian Gotong Royong di Lingkungan	Masyarakat semakin individualis dan tidak peduli lingkungan

2. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut:
 - a. Nilai Pancasila apa yang seharusnya diterapkan untuk mencegah atau mengatasi kasus tersebut?
 - b. Apa penyebab utama munculnya kasus tersebut di masyarakat?
 - c. Bagaimana strategi atau solusi konkret yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat untuk mengatasinya?
3. Susun hasil diskusi kalian dalam bentuk presentasi sederhana atau laporan kelompok.



2. Sejarah Pancasila sebagai Dasar Negara dan Identitas Bangsa Indonesia

Sejarah Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki sejarah yang mendalam dan penuh makna dalam perjalanan bangsa Indonesia. Diusulkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Pancasila dirancang untuk menjadi fondasi yang menyatukan berbagai elemen bangsa yang beragam. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang demokratis, adil, dan beradab.

Pancasila dan Identitas Bangsa

Sebagai identitas bangsa, Pancasila bukan hanya menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara tetapi juga dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah membantu membentuk identitas kolektif yang mempersatukan Indonesia yang majemuk. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia diajarkan untuk menghargai keberagaman agama, etnik, dan budaya sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara, bukan sebagai sumber perpecahan.

Peran Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa

Pancasila berperan vital dalam membentuk karakter bangsa yang bertumpu pada nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan Pancasila yang diajarkan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, kerja sama, dan gotong royong. Karakter-karakter ini diharapkan tidak hanya membentuk individu yang berakhlak mulia tetapi juga masyarakat yang harmonis dan toleran.

Pancasila dalam Menyatukan Berbagai Suku dan Budaya

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ratusan suku bangsa dan berbagai macam tradisi serta bahasa, menemukan dasar persatuan dalam Pancasila. Melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia, Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Inisiatif seperti program pertukaran pelajar antardaerah, perayaan kebudayaan berbagai etnis di tingkat nasional, dan dialog antarsuku adalah beberapa cara di mana Pancasila diimplementasikan untuk menguatkan persatuan nasional.

Mendalami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Pancasila tidak hanya merupakan fondasi ideologis tetapi juga cerminan dari identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia yang kaya. Berikut ini adalah pembahasan yang lebih mendalam mengenai masing-masing sila dengan contoh tokoh dan budaya yang relevan:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ini mencerminkan keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia, yang diterima dan dihormati. Contoh nyata dari aplikasi nilai ini adalah tokoh seperti **Abdurrahman Wahid** (Gus Dur), yang dikenal karena perannya dalam mempromosikan toleransi beragama di Indonesia. Kebijakan dan pandangannya mengenai pluralisme dan kebebasan beragama telah memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang menghargai keberagaman agama. Budaya tahlilan di Jawa, yang merupakan tradisi doa bersama lintas agama, juga menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia menghormati keberagaman kepercayaan dalam praktik keagamaan mereka.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang mengutamakan kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang individu. **Raden Ajeng Kartini** adalah contoh tokoh yang mengadvokasi kesetaraan gender dan pendidikan untuk semua, menunjukkan aplikasi nilai ini dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upacara adat Toraja, yang menghormati kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan, mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai dengan adat dan kemanusiaan yang beradab.



Raden Ajeng Kartini, berjuang untuk hak-hak perempuan - id.wikipedia.org/wiki/Kartini

c. Persatuan Indonesia

Soekarno, sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, merupakan tokoh sentral dalam menyatukan berbagai etnis dan kelompok dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Festival Rambu Solo' di Sulawesi Selatan, yang melibatkan banyak suku dan masyarakat setempat dalam prosesi pemakaman, adalah contoh budaya yang menggambarkan bagaimana tradisi lokal mendukung persatuan nasional dalam keragaman.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis. Tokoh seperti **Mohammad Hatta** yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, telah memberikan dasar bagi praktik musyawarah dalam mengambil keputusan politik yang berkeadilan. Sistem kekerabatan Minangkabau, yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan adat, adalah manifestasi budaya dari sila ini.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini mendorong pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Tokoh seperti **Sudono Salim (Liem Sioe Liong)**, yang dikenal karena kontribusinya dalam perekonomian namun juga kritikus terhadap ketidakadilan ekonomi, menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan keadilan sosial. Gotong royong sebagai praktik budaya, di mana seluruh anggota masyarakat bekerja sama untuk kebaikan bersama, adalah wujud nyata dari prinsip ini, yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama.



Jejak Pancasila

Mungkin kamu tahu bahwa Pancasila digagas oleh Soekarno, tetapi tahukah kamu bahwa Soekarno sebenarnya mengusulkan lima nama untuk dasar negara Indonesia? Selain "Pancasila", nama lain yang diajukan adalah "Sankara" dan "Sosio-Demokrasi". Namun, setelah diskusi panjang, akhirnya "Pancasila" dipilih karena dianggap paling menggambarkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan pada gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman. Selain itu, Pancasila juga dipilih karena mampu mengakomodasi semua golongan, baik yang religius maupun yang sekuler.



Sidang Resmi Pertama BPUPK dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 – wikipedia.org

Contoh Soal

Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia?

Jawaban:

Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai dasar yang luhur, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini mendasari sikap hidup orang Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran, kedamaian, dan rasa saling menghormati. Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembahasan:

Pancasila membantu menciptakan bangsa yang tidak hanya kuat dari segi politik dan ekonomi, tetapi juga dari segi moral dan sosial, yang menjaga keharmonisan dalam perbedaan.





3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Aktivitas Sehari-hari

Pancasila berisi prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara hidup dalam masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Implementasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijelaskan sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Menolak Atheisme

Bangsa Indonesia mendasarkan identitasnya pada kepercayaan kepada Tuhan. Dalam konteks ini, menolak atheisme bukan hanya sekadar menolak kepercayaan tanpa Tuhan, tetapi juga menegaskan komitmen kolektif terhadap nilai-nilai spiritual dan moral yang dijunjung tinggi dalam berbagai agama yang ada di Indonesia.

b. Amalan Agama yang Beradab

Mengamalkan ajaran agama dengan beradab mencakup aspek toleransi dan hormat terhadap perbedaan. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia berupaya hidup harmonis meskipun beragam dalam agama dan budaya, mempromosikan kedamaian dan penghormatan mutual.

c. Ibadah Sesuai Keyakinan

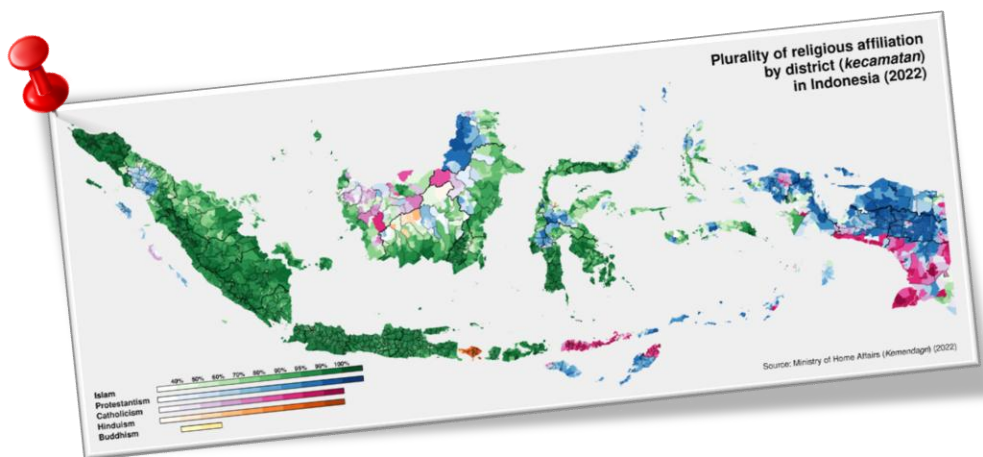
Kewajiban beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara luas menunjukkan kebebasan beragama yang dijamin oleh negara. Ini melibatkan menjalankan ibadah dan ritus agama dengan cara yang adil dan berkeadilan, menghindari diskriminasi dan mendukung kesetaraan di antara warga negara.

d. Harmoni dalam Beragama

Melaksanakan ajaran agama dengan mengedepankan harmoni sangat penting untuk menjaga ketenangan dalam masyarakat yang plural. Hal ini menekankan pentingnya dialog dan kerja sama antar pemeluk agama, serta menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi sumber pemersatu bukan perpecahan.

e. Tidak Memaksa Agama

Poin ini penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama. Tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain mendukung prinsip dasar kebebasan beragama dan menghormati hak individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka sendiri.



Peta persebaran agama di Indonesia berdasarkan data kependudukan pada tahun 2022 – wikipedia.org

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

a. Indonesia sebagai Negara Bangsa

Indonesia merupakan negara yang berbentuk bangsa (nation state) yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, tetapi bukan merupakan negara yang mempraktikkan suvinisme. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia bekerja sama dengan masyarakat bangsa lain dalam berbagai aspek.

b. Hubungan Antarbangsa

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia menghargai interaksi yang harmonis dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini dilakukan dengan menghormati nilai-nilai nasionalisme dan kearifan lokal setiap bangsa, yang membantu dalam memperkuat hubungan antarbangsa yang sehat dan adil.

c. Bagian dari Kemanusiaan Universal

Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian integral dari kemanusiaan global, yang berusaha mencapai peradaban tinggi berdasarkan asas kesamaan manusia dan keadilan sosial.

d. Perlakuan Adil

Bangsa Indonesia mengakui dan menerapkan prinsip bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat dan martabat yang sama, mengakui hak setiap makhluk hidup sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berhak atas perlakuan yang adil dan setara.

e. Menghindari Pertentangan

Dalam mengembangkan masyarakat yang harmonis, Indonesia mempromosikan sikap saling pengertian dan toleransi, memahami bahwa perbedaan suku, ras, agama, dan keyakinan merupakan kekayaan bangsa yang tidak boleh menimbulkan konflik atau pertentangan.

Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan beradab, serta memperkuat hubungan internasional yang sehat dan produktif.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

a. Indonesia sebagai Negara Bangsa

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, yang bersatu dalam konsep bangsa tanpa mendukung ideologi suvinistik yang mengutamakan satu etnik atau ras di atas yang lain. Keanekaragaman ini dilihat sebagai kekuatan yang membawa kemakmuran dan stabilitas, dan bukan sebagai sumber perpecahan.

b. Hubungan Antarbangsa

Dalam berhubungan dengan bangsa lain, Indonesia menganut prinsip kerjasama dan saling menghormati. Ini termasuk menghargai cara pandang dan nilai-nilai nasional dari masing-masing bangsa, yang mendorong hubungan internasional yang lebih harmonis dan efektif serta menghindari imperialisme budaya.

c. Bagian dari Kemanusiaan Universal

Sebagai anggota dari komunitas global, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dan memajukan peradaban manusia secara keseluruhan. Hal ini mencakup mengupayakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta mengedepankan kesetaraan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

d. Perlakuan Adil

Bangsa Indonesia menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan kehormatan dan keadilan, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Prinsip ini diharapkan tercermin dalam kebijakan domestik dan perilaku masyarakat, memastikan bahwa tiap individu dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

e. Menghindari Pertentangan

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis, Indonesia mempromosikan toleransi dan saling pengertian antar berbagai kelompok. Negara berusaha mencegah konflik dengan mengakui dan merayakan perbedaan sebagai bagian dari tapestri budaya nasional.

Persatuan Indonesia

a. Hubungan Orang dan Tanah Air

Persatuan Indonesia bukan hanya terbentuk dari kesamaan nasib antar warganya, tetapi juga dari hubungan mendalam yang terjalin antara warga dengan wilayah geografis yang mereka diami. Ini menciptakan ikatan kuat yang mendefinisikan identitas dan kebanggaan nasional.

b. Fondasi Semangat Kebangsaan

Persatuan di Indonesia didasarkan pada dorongan kuat untuk melindungi dan mempersatukan semua anggota bangsa dan wilayah di bawah satu bendera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk hidup dalam solidaritas dan saling menghormati di tengah keberagaman yang ada.

c. Prioritas Kolektif atas Individu

Bangsa Indonesia menempatkan keutuhan dan keselamatan bersama sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini menekankan pentingnya kebersamaan dan kerja sama dalam menghadapi tantangan dan memajukan kepentingan nasional.

d. Pengorbanan untuk Bangsa

Warga negara diharapkan memiliki kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar dari bangsa dan negara jika situasi memerlukannya. Ini adalah refleksi dari patriotisme dan dedikasi terhadap tanah air.

e. Kebanggaan Nasional

Pengembangan rasa kebanggaan nasional dan kecintaan terhadap tanah air adalah fundamental untuk memperkuat identitas nasional dan mendukung persatuan. Hal ini melibatkan upaya untuk menaharai dan memelihara warisan, bahasa, dan simbol-simbol negara.



Jejak Pancasila



Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga mengajarkan prinsip hidup sehari-hari. Salah satu prinsip yang jarang diketahui adalah "Tidak Memaksa Agama". Artinya, setiap orang di Indonesia bebas memilih agama tanpa paksaan, dan negara mendukung kebebasan beragama.

Ilustrasi Toleransi Beragama – Shutterstock.com

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

a. Inklusivitas Negara

Indonesia didirikan sebagai negara untuk semua warganya, tanpa membedakan kelompok atau golongan. Keputusan-keputusan negara diambil melalui mekanisme permusyawaratan yang mencerminkan suara dari seluruh masyarakat, menunjukkan inklusivitas dan demokrasi.

b. Prinsip Demokrasi

Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengutamakan kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip permusyawaratan. Lembaga perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam membuat keputusan yang mencerminkan kehendak kolektif, mengakui hak setiap individu sebagai bagian dari keseluruhan.

c. Demokrasi Lokal

Demokrasi Indonesia unik karena tidak hanya meniru model Barat, tetapi berakar pada nilai-nilai lokal yang menekankan musyawarah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan adaptasi nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal.

d. Penghormatan terhadap Musyawarah

Setiap warga negara diharapkan untuk menghormati dan menjalankan keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah, yang diambil dengan niat baik dan tanggung jawab bersama. Ini menegaskan komitmen terhadap proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang kolektif.

e. Anti-Tirani

Indonesia menolak sistem pemerintahan yang didominasi oleh mayoritas yang menindas atau tirani oleh minoritas. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dapat mendominasi atau mengesampingkan kelompok lain, mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Mewujudkan Kesejahteraan Batin dan Lahir

Negara Indonesia didirikan dengan tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, baik secara fisik (lahir) maupun psikologis dan spiritual (batin). Negara harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, dan ketenangan jiwa warganya.

b. Demokrasi yang Menjunjung Kedaulatan Rakyat

Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Setiap kebijakan dan keputusan negara harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif, melalui perwakilan rakyat yang dipilih secara adil dan mewakili kepentingan publik.

c. Akses Setara ke Pendidikan, Pekerjaan, dan Kehidupan Layak

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, dan kualitas hidup yang bermartabat. Keadilan dalam akses terhadap sumber daya ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

d. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai Kemanusiaan

Setiap keputusan yang diambil oleh bangsa Indonesia harus selalu didasarkan pada nilai-nilai moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Proses musyawarah yang adil dan bijaksana adalah mekanisme utama untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

e. Menghindari Pemborosan dan Gaya Hidup Mewah

Warga negara Indonesia harus menggunakan hak miliknya dengan bijaksana. Pemborosan dan gaya hidup mewah tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial, terutama dalam konteks masih adanya ketimpangan sosial. Sumber daya harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kemewahan individu.

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana Pancasila berperan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis antara umat beragama di Indonesia!

Jawaban:

Pancasila, khususnya pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengajarkan kepada kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Salah satu implementasi dari sila ini adalah menghormati keyakinan agama orang lain, sehingga menumbuhkan rasa toleransi di masyarakat.

Pembahasan:

Indonesia yang memiliki keberagaman agama diajarkan untuk hidup berdampingan dengan prinsip saling menghormati. Hal ini tercermin dalam kebijakan negara yang mendukung kebebasan beragama serta mendorong dialog antar umat beragama. Sehingga, Pancasila berperan penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dan membangun kehidupan yang harmonis di Indonesia.



Rangkuman

a. Pengaruh dan Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Modern

Pancasila berisi nilai-nilai dasar yang tetap relevan dalam kehidupan modern, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam hubungan sosial dan penyelesaian masalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan menjaga identitas bangsa di tengah tantangan global. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga nilai yang terintegrasi dalam budaya dan sejarah Indonesia.

- ▷ **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Memperkuat kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat pluralis, mendukung dialog antaragama dan menghormati kepercayaan individu.
- ▷ **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Mempromosikan hak asasi manusia dan martabat individu, menjadi dasar kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan perlindungan pekerja migran.
- ▷ **Persatuan Indonesia:** Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, menginspirasi program-program inklusi sosial dan pendidikan multikultural.
- ▷ **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:** Mendukung penerapan demokrasi yang sehat, di mana keputusan diambil berdasarkan diskusi yang bijak.
- ▷ **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Menuntut distribusi sumber daya yang adil dan akses setara ke peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

b. Sejarah Pancasila sebagai Dasar Negara dan Identitas Bangsa Indonesia

Pancasila pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pancasila dirancang untuk menjadi dasar yang menyatukan berbagai elemen bangsa Indonesia yang beragam. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai identitas bangsa, membentuk karakter bangsa Indonesia yang menghargai keberagaman agama, etnik, dan budaya.

- ▷ **Pancasila sebagai identitas bangsa:** Nilai-nilai dalam Pancasila membantu membentuk identitas kolektif yang mempersatukan bangsa Indonesia, mengajarkan untuk menghargai keberagaman sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan.
- ▷ **Peran dalam membentuk karakter bangsa:** Pendidikan Pancasila diharapkan menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, kerja sama, dan gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.
- ▷ **Menyatukan berbagai suku dan budaya:** Melalui sila ketiga, Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan di tengah keberagaman, misalnya melalui festival budaya lintas etnik dan kurikulum yang mengajarkan tentang keberagaman Indonesia.

c. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Aktivitas Sehari-hari

Pancasila mengatur tata cara hidup dalam masyarakat dan negara Indonesia, diterapkan melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar. Penerapan nilai-nilai Pancasila terlihat dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik.

- ▷ **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Menerima keberagaman agama dan keyakinan dengan mengedepankan harmoni antar umat beragama, menghindari paksaan terhadap agama tertentu, serta menghormati kebebasan beribadah.

- ▷ **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Menjamin perlakuan adil bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang, serta menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan keyakinan sebagai kekayaan bangsa.
- ▷ **Persatuan Indonesia:** Menjaga kesatuan dan solidaritas antar warga bangsa dengan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- ▷ **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan:** Menghormati musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, menjaga inklusivitas dan menghindari tirani.
- ▷ **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Memastikan pemerataan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak, serta menghindari gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan keadilan sosial.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan nilai kodrati dalam konteks Pancasila?
 - A. Nilai yang diciptakan oleh manusia berdasarkan keputusan Bersama
 - B. Nilai yang inheren pada manusia dan alam, dianggap prinsip moral yang universal
 - C. Nilai yang hanya berlaku di Indonesia
 - D. Nilai yang dapat berubah tergantung perkembangan zaman
 - E. Nilai yang hanya dapat diterapkan dalam konteks sosial tertentu
2. Bagaimana Pancasila berperan dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman budaya dan etnis?
 - A. Menekankan perbedaan antar suku bangsa
 - B. Mengajarkan pentingnya menghargai dan melestarikan budaya asing
 - C. Mendorong integrasi melalui pendidikan multikultural dan program inklusi sosial
 - D. Mengutamakan keseragaman budaya Indonesia
 - E. Menyerahkan peran persatuan pada kebijakan pemerintah saja
3. Apa yang dimaksud dengan penerapan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam kehidupan modern Indonesia?
 - A. Menjaga kebebasan agama melalui dialog antaragama dan festival keberagaman
 - B. Menghapuskan agama-agama yang tidak ada di Indonesia
 - C. Membatasi perayaan agama tertentu
 - D. Menyebarkan agama dengan cara paksa
 - E. Mempromosikan satu agama sebagai agama negara
4. Mengapa penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan pembangunan ekonomi?
 - A. Agar negara tetap berkembang meskipun ada ketimpangan sosial
 - B. Untuk menghindari konflik antar golongan yang bisa merusak integrasi nasional
 - C. Untuk mendorong keseragaman sosial tanpa memperhatikan hak individu
 - D. Agar ekonomi tumbuh tanpa batasan sosial
 - E. Untuk menciptakan ketidakadilan agar ada persaingan yang sehat
5. Jika Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan, apa dampaknya terhadap proses politik di negara tersebut?
 - A. Membuat proses politik lebih cepat dan efisien tanpa perdebatan
 - B. Menjamin bahwa keputusan yang diambil mewakili semua pihak, menghindari tirani
 - C. Menyebabkan kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kelompok mayoritas
 - D. Meningkatkan ketegangan antar kelompok politik
 - E. Menghambat implementasi kebijakan karena banyaknya pihak yang terlibat

6. Bagaimana penerapan nilai "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" di Indonesia berkontribusi dalam hubungan internasional?
 - A. Dengan menutup diri dari interaksi dengan negara lain
 - B. Dengan memaksakan nilai-nilai Indonesia kepada negara lain
 - C. Dengan mempromosikan kerjasama internasional yang adil dan saling menghormati
 - D. Dengan menghindari kerjasama internasional yang melibatkan aspek sosial
 - E. Dengan mengutamakan kepentingan ekonomi di atas keadilan sosial
7. Apa tujuan utama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
 - A. Untuk menciptakan negara yang mengutamakan satu suku bangsa
 - B. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut satu agama
 - C. Untuk menyatukan berbagai elemen bangsa Indonesia dalam sebuah ideologi yang adil dan demokratis
 - D. Untuk menyingkirkan perbedaan sosial yang ada di Indonesia
 - E. Untuk membentuk pemerintahan yang hanya memperhatikan kepentingan elit

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Hasyim, Asy'ari. 2021. *Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho, Riant. 2018. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Syamsuddin, Haris. *Pancasila: Ideologi dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Nasional, 2021.

BAB 2

PANCASILA DI KANCAH GLOBAL DUNIA

Karakter Pelajar Pancasila

▷ **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**

Menghargai nilai-nilai luhur dalam Pancasila sebagai pedoman moral, serta mampu mengaplikasikan nilai keimanan dan akhlak mulia dalam menghadapi tantangan global dan nasional.

▷ **Bernalar Kritis**

Menerapkan Pancasila dalam konteks global dan nasional, memahami pengaruhnya terhadap kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari.

▷ **Gotong Royong**

Berkolaborasi dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keharmonisan antara negara-negara dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks internasional.

Tujuan Pembelajaran : Memperkuat Identitas Indonesia di Dunia

1. Menelaah Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Konteks Global

Memahami dan mengevaluasi peluang serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada skala global.

2. Mengkaji Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Konteks Nasional dan Global

Mengkaji secara mendalam peluang dan tantangan yang muncul baik dalam konteks nasional maupun global terkait dengan penerapan Pancasila.

3. Menganalisis Peran Pancasila dalam Mengatasi Berbagai Tantangan

Menganalisis bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai alat atau cara dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang ada di tingkat nasional dan internasional.

Kata Kunci: Pancasila dalam Konteks Global, Globalisasi, Kerja sama Internasional.

4. Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Skala Nasional dan Global

Mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam berbagai kebijakan dan praktik pada tingkat nasional dan global, guna mempromosikan kerjasama dan keharmonisan antar bangsa.



F I T R I



1. Kekuatan dan Kelemahan Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Global

Kekuatan (*Strengths*)

a. Keberagaman

- ▷ **Budaya dan Identitas Nasional:** Keberagaman budaya Indonesia menciptakan identitas nasional yang unik dan menjadi perekat sosial di antara berbagai etnis dan kelompok. Warisan budaya yang kaya ini juga memperkuat diplomasi budaya dan menarik turis dari seluruh dunia.
- ▷ **Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:** Industri pariwisata dan ekonomi kreatif tumbuh pesat berkat keunikan budaya dan keindahan alam Indonesia, menjadi sumber pendapatan utama dan penciptaan lapangan kerja.

b. Sumber Daya Alam

- ▷ **Pertanian, Pertambangan, dan Perikanan:** Sumber daya alam yang melimpah mendukung sektor-sektor utama seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan, yang semua memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
- ▷ **Energi Terbarukan dan Sumber Daya Laut:** Potensi energi terbarukan dan sumber daya laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan menawarkan peluang besar untuk pembangunan berkelanjutan.

c. Populasi Besar

- ▷ **Sumber Daya Manusia dan Pasar Domestik:** Populasi besar Indonesia menyediakan sumber daya manusia melimpah dan pasar domestik yang luas, mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- ▷ **Diplomasi dan Pengaruh Regional:** Jumlah penduduk yang besar juga meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat regional dan global, khususnya dalam diplomasi dan isu keamanan.



Kawasan permukiman tepat di pusat kota Jakarta, menggambarkan populasi yang besar dan padat penduduk di Indonesia – Shutterstock.com. 239478142

d. Letak Geografis

- ▷ **Kawasan Maritim dan Jalur Laut Strategis:** Lokasi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak jalur laut strategis memberikan keuntungan dalam perdagangan dan hubungan internasional.
- ▷ **Potensi Energi Terbarukan dan Sumber Daya Alam:** Letak geografis yang strategis juga memungkinkan pengembangan potensi energi terbarukan seperti hidro, surya, dan angin.
- ▷ **Bersatunya Keragaman dan Keadilan Sosial:** Pancasila sebagai dasar negara menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman dan berpihak pada keadilan sosial, mendukung stabilitas sosial dan politik.
- ▷ **Pendidikan dan Pembinaan Kebangsaan:** Nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam sistem pendidikan, membina kesadaran kebangsaan dan kemandirian, serta mempromosikan demokrasi dan kepatuhan terhadap hukum.

Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Ketidaksetaraan Ekonomi

- ▷ **Pendapatan dan Kekayaan yang Tidak Merata:** Kesenjangan ekonomi yang lebar antarindividu dan antardaerah menghambat pemanfaatan potensi ekonomi secara merata dan menyulitkan pengembangan sosial.
- ▷ **Akses Layanan Dasar Terbatas:** Banyak daerah yang masih kekurangan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, membatasi perkembangan sosial dan ekonomi.

b. Infrastruktur yang Kurang Memadai

- ▷ **Transportasi dan Jaringan Jalan:** Infrastruktur transportasi yang belum memadai menghambat mobilitas barang dan orang, memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- ▷ **Listrik dan Energi:** Ketersediaan listrik yang tidak merata dan infrastruktur energi yang belum optimal menimbulkan tantangan dalam industrialisasi dan modernisasi.

c. Korupsi

- ▷ **Penghambat Pembangunan:** Korupsi secara luas merugikan perekonomian, menghambat investasi dan efisiensi alokasi sumber daya, merusak kepercayaan publik dan kestabilan institusi.
- ▷ **Ketidakpuasan Publik dan Ketidaksetaraan:** Korupsi mendorong ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.



Jejak Pancasila

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor digital, dengan pasar e-commerce yang diperkirakan mencapai **USD 53 miliar** pada tahun 2025 dan lebih dari **170 juta pengguna internet**. Sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mencatatkan lebih dari **270 juta penduduk**. Memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan literasi serta perlindungan data dapat membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk memimpin transformasi digital.



Ilustrasi kemudahan belanja dengan e-commerce – Shutterstock.com.2562256001

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana keberagaman budaya Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan global, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif!

Jawaban:

Keberagaman budaya Indonesia merupakan salah satu kekuatan besar yang dapat memperkuat identitas bangsa di dunia internasional. Dengan lebih dari 300 suku, bahasa, dan tradisi, Indonesia mampu memanfaatkan keberagaman ini untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia. Industri pariwisata yang berkembang pesat, didorong oleh kekayaan budaya, menjadi sumber pendapatan utama negara dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti seni, kerajinan, dan kuliner Indonesia yang kaya juga turut berperan dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, memperkuat diplomasi budaya, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Pembahasan:

Keberagaman budaya Indonesia tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata, tetapi juga memperkaya ekonomi melalui ekonomi kreatif yang berhubungan dengan seni, kuliner, dan kerajinan. Potensi budaya ini juga menjadi alat diplomasi yang efektif dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Hal ini menegaskan bahwa keberagaman budaya bukanlah hambatan, melainkan kekuatan untuk Indonesia dalam memajukan sektor ekonomi.





2. Peluang dan Tantangan Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Global

Peluang (*Opportunities*)

a. Pertumbuhan Ekonomi

- ▷ Dengan populasi yang besar dan sektor konsumen yang tumbuh, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Modernisasi infrastruktur dan peningkatan investasi asing langsung memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.
- ▷ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar global, menarik lebih banyak kolaborasi ekonomi dan investasi dari negara-negara lain.

b. Perdagangan Internasional

- ▷ Indonesia, terletak di jalur perdagangan utama dunia, memiliki akses strategis ke pasar-pasar besar seperti Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN.
- ▷ Posisi ini memberi Indonesia keunggulan dalam mengintensifkan perdagangan internasional, khususnya dalam ekspor komoditas dan produk manufaktur.

c. Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan

- ▷ Kekayaan sumber daya alam seperti mineral, gas, dan minyak serta potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti solar, angin, dan bioenergi.
- ▷ Ini menawarkan peluang untuk Indonesia menjadi pemimpin dalam pasokan energi global dan teknologi ramah lingkungan.

d. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- ▷ Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil dan inovatif.
- ▷ Peningkatan kualitas pendidikan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, memungkinkan mereka untuk menduduki posisi penting di perusahaan multinasional.



Pengembangan energi terbarukan yang dikelola pemerintah. – Penerbit

Tantangan dan Ancaman (*Threats*)

a. Ketidakstabilan Politik

- ▷ Isu politik domestik dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan menghambat inisiatif ekonomi.
- ▷ Hal ini dapat mengurangi kepercayaan internasional terhadap iklim investasi Indonesia, mempengaruhi aliran investasi asing.

b. Ketergantungan pada Ekspor Komoditas

- ▷ Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor bahan mentah, yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan permintaan internasional.
- ▷ Ketergantungan ini memperbesar risiko ekonomi yang dihadapi Indonesia, mengurangi kemampuannya untuk mengendalikan nasib ekonomi sendiri.

c. Ancaman Perubahan Iklim

- ▷ Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap efek perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem.
- ▷ Perubahan iklim dapat memperburuk kondisi hidup, mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan keamanan pangan.

d. Pendidikan dan Kesenjangan Keterampilan

- ▷ Meskipun ada peningkatan, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah, yang menghasilkan disparitas dalam keterampilan.
- ▷ Kesenjangan ini membatasi kapasitas Indonesia untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi sumber daya manusianya dalam ekonomi global.

Contoh Soal

Apa tantangan utama yang dihadapi Indonesia terkait ketergantungan pada ekspor komoditas dan bagaimana hal ini mempengaruhi perekonomian Indonesia?

Jawaban:

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia terkait ketergantungan pada ekspor komoditas adalah fluktuasi harga global dan perubahan permintaan internasional. Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan mentah seperti minyak, gas, dan mineral, yang rentan terhadap perubahan pasar global. Ketergantungan ini meningkatkan risiko ekonomi karena Indonesia menjadi lebih terpapar pada gejolak ekonomi dunia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian, mengurangi kemampuan Indonesia untuk mengendalikan nasib ekonominya sendiri, dan memperbesar risiko dalam mengelola sektor ekonomi yang lebih terdiversifikasi.

Pembahasan:

Ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor komoditas menjadi rentan terhadap perubahan harga dan permintaan internasional. Diversifikasi sektor ekonomi dan pengembangan industri hilir sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di pasar global.



3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Menghadapi Globalisasi

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks globalisasi, sila pertama Pancasila mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap berbagai kepercayaan yang ada di dunia. Ini mendukung diplomasi internasional yang memperkuat hubungan antar negara dengan dasar saling menghargai keberagaman agama dan budaya.

Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam dialog antaragama dan forum internasional yang mendukung perdamaian dunia dan kerjasama lintas budaya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Di tengah arus globalisasi, penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen pada hak asasi manusia dan kesetaraan. Sila ini mempromosikan perlakuan yang adil dan beradab tidak hanya dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam relasi internasional.

Indonesia mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kemanusiaan di forum-forum global seperti PBB, mengambil peran aktif dalam upaya-upaya peningkatan HAM dan pembangunan sosial global.

Persatuan Indonesia

Globalisasi membawa tantangan terhadap integritas dan kedaulatan bangsa. Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah pengaruh global yang bisa saja memecah belah.

Pemerintah Indonesia berusaha memperkuat identitas nasional dan persatuan melalui pendidikan, kebijakan, dan program yang mendukung kebinekaan dalam satu kesatuan, seperti peringatan hari besar nasional dan kampanye nasionalisme.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Globalisasi memerlukan adaptasi kebijakan yang cerdas untuk mengelola dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Sila keempat mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan diskusi yang luas dan partisipatif.

Pemerintah menerapkan sistem demokrasi yang kuat dengan memastikan proses legislatif dan kebijakan publik dilakukan melalui musyawarah mufakat, memperhatikan suara dari berbagai sektor masyarakat.



Jejak Pancasila

Salah satu fakta unik mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah keterlibatannya dalam Misi Perdamaian PBB di Afghanistan. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda *Contingent* untuk membantu menjaga stabilitas dan melaksanakan tugas perdamaian di bawah naungan PBB. Yang menarik, Indonesia adalah salah satu negara non-barang besar yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi penjaga perdamaian di berbagai negara konflik. Ini menonjolkan peran Indonesia yang tidak hanya sebagai negara dengan keberagaman agama, tetapi juga sebagai pemain aktif dalam menjaga keamanan dan kedamaian global.



Pasukan penjaga perdamaian Indonesia Kontingen Garuda I di bawah Bendera PBB – Wikipedia.org

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial yang harus dijaga, terutama dalam menghadapi globalisasi yang sering kali meningkatkan ketimpangan.

Indonesia mempromosikan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi pendapatan, reformasi agraria, dan akses yang lebih luas ke pendidikan dan kesehatan, serta berpartisipasi dalam inisiatif global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kelima silanya mengarahkan Indonesia untuk:

- a. **Menghormati Keberagaman Agama dan Budaya:** Meningkatkan toleransi dan penghormatan lintas agama dan budaya dalam diplomasi internasional.
- b. **Menegakkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan di forum internasional.
- c. **Menjaga Persatuan Nasional:** Mempertahankan integritas dan persatuan nasional di tengah pengaruh global yang dapat memecah belah.
- d. **Menerapkan Demokrasi yang Berkebijaksanaan:** Memastikan kebijakan dan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
- e. **Mendorong Keadilan Sosial:** Berupaya untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat dengan kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan akses yang lebih luas ke layanan dasar.

Pancasila tidak hanya memperkuat identitas nasional Indonesia tetapi juga memposisikannya sebagai negara yang berkontribusi positif dalam komunitas global dengan mempromosikan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

Contoh Soal

Bagaimana Pancasila mengajarkan Indonesia untuk tetap mempertahankan integritas nasional di tengah pengaruh global?

Jawaban:

Pancasila mengajarkan Indonesia untuk tetap mempertahankan integritas nasional melalui sila ketiga, "Persatuan Indonesia", yang menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah pengaruh global. Globalisasi sering kali membawa berbagai pengaruh dari luar, namun dengan menanamkan nilai-nilai persatuan dalam setiap kebijakan dan program, Indonesia dapat memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Selain itu, melalui pendidikan dan kampanye nasionalisme, Indonesia dapat menjaga semangat persatuan untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat.

Pembahasan:

Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman agar Indonesia tetap menjaga persatuan dan integritasnya di tengah pengaruh global yang semakin besar. Dengan menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam setiap aspek kehidupan, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatannya dan memperkuat posisinya di panggung dunia.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan mensimulasikan forum internasional, mempresentasikan bagaimana Pancasila dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam membangun kerja sama global, serta melatih kemampuan berpikir kritis, diplomatis, dan komunikatif.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang.
2. Setiap kelompok mewakili Indonesia dalam forum internasional yang membahas: "Peran Nilai Lokal dalam Membangun Perdamaian dan Kerja Sama Global."
3. Siapkan paparan kelompok berisi:
 - a. Penjelasan singkat tentang Pancasila dan makna setiap silanya.
 - b. Bagaimana nilai-nilai Pancasila (seperti toleransi, gotong royong, persatuan) relevan untuk membangun perdamaian dan kerja sama di tingkat global?
 - c. Contoh konkret kontribusi Indonesia atau masyarakat Indonesia yang sudah sejalan dengan nilai Pancasila di dunia internasional.
4. Simulasikan presentasi di depan kelas seolah-olah sedang mewakili Indonesia di forum dunia.
5. Kelompok lain dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan kritis setelah presentasi.

Rangkuman

1. Kekuatan dan Kelemahan Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Global

a. Kekuatan (*Strengths*):

- ▷ Keberagaman: Budaya dan identitas nasional Indonesia yang beragam menciptakan ikatan sosial yang kuat dan meningkatkan daya tarik internasional melalui pariwisata dan ekonomi kreatif.
- ▷ Sumber Daya Alam: Potensi besar sektor pertanian, pertambangan, dan perikanan serta energi terbarukan dan sumber daya laut yang belum dimanfaatkan sepenuhnya menawarkan peluang besar untuk pembangunan berkelanjutan.
- ▷ Populasi Besar: Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah dan pasar domestik yang luas, serta pengaruh yang besar dalam diplomasi dan keamanan regional.
- ▷ Letak Geografis: Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur laut strategis memberikan keuntungan dalam perdagangan dan hubungan internasional, serta memungkinkan pengembangan potensi energi terbarukan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*):

- ▷ Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketimpangan pendapatan antar individu dan daerah membatasi pemanfaatan potensi ekonomi secara merata, dengan akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- ▷ Infrastruktur yang Kurang Memadai: Keterbatasan dalam infrastruktur transportasi dan energi menghambat mobilitas barang dan orang, serta menghalangi industrialisasi dan modernisasi.
- ▷ Korupsi: Korupsi merugikan perekonomian, merusak kepercayaan publik, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, mengurangi stabilitas negara dan kepercayaan investasi.

2. Peluang dan Tantangan Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Global

a. Peluang (*Opportunities*):

- ▷ Pertumbuhan Ekonomi: Populasi besar dan sektor konsumen yang berkembang pesat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ditambah dengan peningkatan investasi asing langsung.
- ▷ Perdagangan Internasional: Letak geografis Indonesia memberi keunggulan dalam memperkuat perdagangan internasional, khususnya dalam ekspor komoditas dan produk manufaktur ke pasar-pasar besar seperti Tiongkok dan India.
- ▷ Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan: Kekayaan sumber daya alam dan potensi energi terbarukan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pasokan energi global dan teknologi ramah lingkungan.
- ▷ Peningkatan Kualitas Pendidikan: Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif, meningkatkan daya saing di pasar global.

b. Tantangan dan Ancaman (*Threats*):

- ▷ Ketidakstabilan Politik: Ketidakpastian politik domestik dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan internasional dan menghambat investasi asing.

- ▷ Ketergantungan pada Ekspor Komoditas: Ketergantungan yang tinggi pada ekspor bahan mentah membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan permintaan internasional.
- ▷ Ancaman Perubahan Iklim: Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, yang mengancam sumber daya alam, keamanan pangan, dan kestabilan sosial-ekonomi.
- ▷ Pendidikan dan Kesenjangan Keterampilan: Meskipun ada peningkatan, kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah tetap menjadi tantangan besar, menghambat potensi sumber daya manusia Indonesia.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Menghadapi Globalisasi

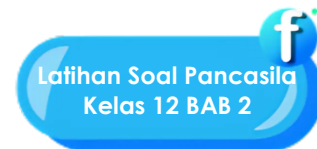
- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Sila pertama Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap berbagai agama di dunia, mendukung diplomasi internasional untuk memperkuat hubungan antar negara berdasarkan saling menghargai keberagaman agama dan budaya.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Sila kedua menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan, dengan mengadvokasi kebijakan yang mendukung kemanusiaan di forum global seperti PBB dan berperan aktif dalam upaya-upaya peningkatan HAM.
- 3) Persatuan Indonesia: Sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah pengaruh global yang dapat memecah belah, dengan memperkuat identitas nasional melalui pendidikan dan kebijakan yang mendukung kebinekaan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Sila keempat mengajarkan pengambilan keputusan berbasis musyawarah mufakat, memastikan kebijakan dan keputusan publik melibatkan partisipasi luas dari masyarakat untuk mengelola dampak globalisasi dengan bijaksana.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sila kelima menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial, dengan kebijakan redistribusi pendapatan dan peningkatan akses ke pendidikan dan layanan dasar, serta berperan dalam inisiatif global untuk pembangunan berkelanjutan.
- 6) Pancasila memberikan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di dunia internasional.

Latihan Soal

1. Apa yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi kehidupan global?
 - A. Ketergantungan pada ekspor komoditas
 - B. Keberagaman budaya yang memperkuat identitas nasional
 - C. Ketidaksetaraan ekonomi yang tidak mempengaruhi negara
 - D. Infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah
 - E. Ketergantungan pada satu jenis industri
2. Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan letak geografisnya yang strategis dalam hubungan internasional?
 - A. Dengan menutup jalur perdagangan internasional
 - B. Dengan mengembangkan potensi energi terbarukan dan jalur laut strategis
 - C. Dengan mengurangi keterlibatan dalam perjanjian internasional
 - D. Dengan mengabaikan diplomasi perdagangan
 - E. Dengan mengurangi potensi sektor maritim
3. Dalam menghadapi globalisasi, bagaimana Pancasila memberikan dasar bagi Indonesia dalam menjaga persatuan nasional?
 - A. Dengan menekankan pentingnya nasionalisme ekstrim
 - B. Dengan meningkatkan ketergantungan pada negara asing
 - C. Melalui kebijakan yang memperkuat identitas nasional dan kebinekaan
 - D. Dengan mengutamakan kesatuan berdasarkan budaya tertentu
 - E. Dengan mengabaikan kebhinekaan demi integrasi sosial
4. Bagaimana ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional?
 - A. Mengurangi ketergantungan pada pasar global
 - B. Membatasi pertumbuhan sektor domestik yang tidak terkait ekspor
 - C. Memperbesar risiko ekonomi Indonesia terkait fluktuasi harga global
 - D. Menjamin kestabilan ekonomi meskipun ada fluktuasi
 - E. Menambah peluang untuk diversifikasi industri dalam negeri
5. Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi antara daerah dan individu dalam rangka memaksimalkan potensi sosial-ekonomi?
 - A. Mengurangi bantuan ke daerah yang tertinggal
 - B. Menyebarkan akses pendidikan dan layanan dasar yang lebih merata
 - C. Membatasi akses untuk daerah-daerah tertentu
 - D. Meningkatkan ketergantungan pada bantuan internasional
 - E. Mengabaikan kebijakan distribusi kekayaan yang lebih adil

6. Apa dampak dari ketidakstabilan politik terhadap ekonomi Indonesia, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi iklim investasi?
- A. Mengurangi jumlah aliran investasi asing karena ketidakpastian kebijakan
 - B. Meningkatkan aliran investasi asing karena adanya kebijakan baru
 - C. Tidak berdampak signifikan terhadap iklim investasi
 - D. Meningkatkan stabilitas ekonomi nasional
 - E. Membantu Indonesia mendapatkan lebih banyak kerjasama internasional
7. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi untuk mengarahkan negara dalam menghadapi globalisasi. Apa yang dimaksud dengan sila kelima dalam konteks globalisasi?
- A. Mendorong kesejahteraan semua lapisan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan dan akses yang lebih luas ke layanan dasar
 - B. Meningkatkan ketergantungan pada pasar internasional
 - C. Memperkenalkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi ekonomi domestik
 - D. Membatasi hubungan dengan negara-negara lain untuk menjaga stabilitas sosial
 - E. Menyediakan kesempatan kerja hanya untuk sektor formal saja

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- ASEAN Secretariat. (2021). ASEAN economic integration: Challenges and opportunities. ASEAN Publishing.
- Badan Ekonomi Kreatif. (2019). Laporan tahunan ekonomi kreatif 2019. Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). (2021). Pengembangan potensi energi terbarukan di Indonesia. Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. (2020). Strategi perdagangan internasional Indonesia dalam era globalisasi. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perhubungan. (2020). Laporan infrastruktur transportasi nasional. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (2020). Pancasila dalam pendidikan nasional: Buku panduan guru. Kemendikbud Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan tahunan pemberantasan korupsi 2021. KPK.
- UNESCO. (2020). Indonesia's role in human rights and cultural diplomacy. UNESCO Publishing.
- Widjaja, S. (2020). Pancasila dan tantangan globalisasi. Universitas Indonesia Press.
- World Bank. (2021). Indonesia's path to recovery and growth: Economic report 2021. World Bank Group.



BAB 3

MENJADI WARGA NEGARA YANG TANGGUH

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Mandiri

Berinisiatif untuk memahami dan mematuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta menjadi contoh teladan dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab di masyarakat

▷ Bernalar Kritis

Menganalisis pelanggaran hak dan kewajiban dengan kritis dan memahami akibat hukum dan sosial dari setiap pelanggaran.

Tujuan Pembelajaran: Mengatasi Pelanggaran Hak dan Kewajiban

1. Memahami Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban warga negara diterapkan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.

2. Analisis Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Menganalisis contoh-contoh nyata pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang telah terjadi di Indonesia, untuk memahami dampak dan akibat hukumnya.

3. Evaluasi Kasus Pelanggaran dalam Kehidupan Sehari-hari

Mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, membantu siswa memahami relevansi topik ini dengan pengalaman mereka sendiri.

Kata Kunci: Enzim, Metabolisme, Katabolisme, Anabolisme, Glikolisis, Proses Biokimia, Suhu & pH.

4. Kampanye Kesadaran tentang Hak dan Kewajiban

Mempromosikan kampanye kesadaran untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam mematuhi hukum.



F I T R I



1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

Hakikat Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak yang dikemukakan oleh James mendefinisikan hak sebagai klaim moral atau legal yang diakui oleh masyarakat yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu atau bertindak dalam cara tertentu. Dalam konteks Indonesia, konsep ini dijamin oleh UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Undang-Undang dan konstitusi Indonesia mengatur secara spesifik tentang hak dan kewajiban warga negara. UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur tentang status warga negara menetapkan syarat dan prosedur dalam memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, yang secara tidak langsung menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak-hak tertentu dan memikul kewajiban-kewajiban tertentu sebagai warga negara.

Penentuan kewarganegaraan Indonesia juga telah diatur dalam **Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945**. Berdasarkan pasal tersebut, warga negara Indonesia mencakup:

- 1) Orang-orang yang merupakan bangsa Indonesia asli; dan
- 2) Orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan menjadi warga negara melalui undang-undang.

Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, status seseorang sebagai penduduk atau bukan penduduk tergantung dari hubungannya dengan suatu wilayah. Secara umum, status penduduk seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Seseorang disebut penduduk jika ia tinggal atau menetap dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang berkewarganegaraan dari negara tersebut disebut warga negara, sementara penduduk yang menetap karena suatu pekerjaan disebut warga negara asing.
- 2) Seseorang disebut bukan (non) penduduk jika ia tinggal atau menetap di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu, misalnya turis.

Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa segala sesuatu terkait warga negara dan penduduk diatur melalui undang-undang, termasuk ketentuan teknis tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dilakukan oleh mereka yang kewarganegaraannya telah diakui berdasarkan Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup layak, mendapatkan pendidikan, serta memilih dan dipilih dalam pemerintahan.

Soekanto (2001) menambahkan bahwa peran warga negara tidak hanya terbatas pada penerimaan hak, tetapi juga pengaktualan kewajiban, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara.



Jejak Pancasila

Tahukah kamu?

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi multikulturalisme dalam konstitusinya. Pancasila, sebagai dasar negara, mengedepankan prinsip keberagaman dan menjadi contoh penting dalam mengelola harmoni antar budaya, agama, dan suku, yang menginspirasi banyak negara di dunia.



Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memajukan diri dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Hak-hak yang dijamin antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membela negara, dan ikut serta dalam usaha pembangunan nasional. Perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban ini dianggap fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Di Indonesia, hak-hak warga negara sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD ini juga mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara karena menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, UUD ini juga menegaskan tugas dan tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menekankan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 berperan sebagai hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan menetapkan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang rinci. Berikut ini beberapa aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban warga negara:

- 1) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 5) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- 6) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada intinya, hak-hak warga negara juga terkait dengan kewajiban-kewajiban dasar. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, hal itu bisa menimbulkan pelanggaran. Pelanggaran hak terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan haknya, dan pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Memahami hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menunjukkan bahwa sebuah negara dapat berfungsi dengan baik. Jika hak warga negara terpenuhi, mereka juga harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan begitu, kehidupan yang adil dan demokratis dapat terwujud.

a. Hakikat Hak dan Kewajiban

- ▷ **Konsep Hak:** Hak didefinisikan sebagai klaim moral atau legal yang diakui oleh masyarakat, memungkinkan individu atau kelompok untuk bertindak atau memperoleh sesuatu secara spesifik.
- ▷ **Perlindungan Hak di Indonesia:** UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, memastikan bahwa hak-hak ini dihormati, dilindungi, dan tidak dicabut secara sewenang-wenang.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

- ▷ **Regulasi Kewarganegaraan:** UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur syarat dan prosedur memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan.
- ▷ **Hak dan Kewajiban Menurut UUD 1945:** Pasal 26 UUD 1945 mendefinisikan siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia dan menjelaskan hak dasar seperti hak untuk bekerja, pendidikan, dan partisipasi dalam pemerintahan.

c. Hak dan Kewajiban dalam UUD NRI Tahun 1945

- ▷ **Perlindungan dan Pemenuhan Hak:** UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan sosial.
- ▷ **Pemenuhan Kewajiban:** Warga negara juga memiliki kewajiban, seperti mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, untuk mendukung masyarakat yang adil dan makmur.

Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2006, serta bagaimana proses memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia?

Jawaban:

Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2006. Menurut Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945, kewarganegaraan Indonesia diberikan kepada mereka yang secara sah diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu atau melalui prosedur naturalisasi. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika mereka memilih kewarganegaraan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pembahasan:

Kewarganegaraan Indonesia mengacu pada aturan hukum yang mengatur siapa yang berhak menjadi warga negara Indonesia dan bagaimana proses untuk memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan status hukum setiap individu di negara ini.



2. Pelanggaran Hak dan Kewajiban serta Upaya Pencegahannya

Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak di Indonesia seringkali berkaitan dengan konvensi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup berbagai isu mulai dari penindasan terhadap kebebasan berbicara hingga pelanggaran hak atas pendidikan dan kesehatan.

a. Konvensi Hak-hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

▷ Deskripsi

Hak-hak sipil termasuk kebebasan berbicara dan beragama, hak politik mencakup hak untuk memilih, sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.

▷ Implementasi

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjamin hak-hak ini, namun pelaksanaannya sering kali tidak konsisten, terutama di daerah terpencil dan di kalangan kelompok marginal. Pelanggaran hak warga negara adalah masalah yang harus diperhatikan oleh negara. Hal ini terkait dengan penerapan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yang menekankan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Semua warga negara berhak mendapatkan keadilan di hadapan hukum, serta perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Salah satu cara untuk menjamin hak asasi manusia adalah dengan mengikuti perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Perjanjian internasional yang mengatur hak-hak asasi manusia, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005. Pengesahan kovenan tersebut menjadi penting karena memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia di Indonesia.



Logo International Covenant on Civil and Political Rights –
[Wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights)

▷ Hak atas Pembangunan

Selain hak-hak asasi lainnya, ada juga hak atas pembangunan. Deklarasi Hak Atas Pembangunan dari PBB menyatakan bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan menciptakan pekerjaan yang produktif. Deklarasi Copenhagen pada tahun 1995 juga menegaskan bahwa hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

▷ **Contoh Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Tertulis pada kovenan Hak Sipil dan Politik (UU RI No. 12 Tahun 2005) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU RI No. 11 Tahun 2005) serta hak atas pembangunan dapat diperhatikan pada poin berikut ini:

1) Hak Sipil

- Hak untuk menentukan masa depan sendiri
- Hak untuk hidup
- Hak untuk bebas dari penyiksaan
- Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati
- Hak untuk tidak ditahan sembarangan
- Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil

2) Hak Politik

- Hak untuk menyampaikan pendapat
- Hak untuk berkumpul dan berserikat
- Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan

3) Hak Ekonomi dan Sosial

- Hak untuk bekerja
- Hak untuk mendapatkan upah yang setara
- Hak untuk tidak dipaksa bekerja
- Hak untuk mendapatkan cuti
- Hak atas makanan
- Hak atas tempat tinggal
- Hak atas kesehatan
- Hak atas pendidikan

4) Hak Pembangunan

- Hak untuk hidup di lingkungan yang sehat
- Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak
- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai

5) Hak Budaya

- Hak untuk ikut serta dalam kegiatan kebudayaan
- Hak untuk menikmati perkembangan ilmu pengetahuan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya (hak cipta)

Secara umum, kedua kovenan ini melindungi hak-hak yang dimiliki setiap warga negara, baik dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin

hak-hak ini melalui aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah mencegah pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Pengesahan kovenan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Selain itu, deklarasi PBB tentang hak pembangunan menyatakan bahwa pembangunan adalah hak asasi manusia untuk saat ini dan di masa depan.

b. Analisis Kasus Pelanggaran Hak di Indonesia

Pelanggaran hak di Indonesia merupakan sebuah isu kompleks yang mencakup berbagai aspek, dari pelanggaran hak sipil dan politik hingga pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai beberapa kasus pelanggaran hak yang telah terjadi di Indonesia:

1) Pelanggaran Hak Sipil dan Politik

- **Contoh Kasus:** Penangkapan dan penahanan aktivis politik tanpa proses hukum yang jelas seringkali dilaporkan di beberapa daerah, terutama dalam konteks ketegangan politik atau keamanan. Contoh baru-baru ini meliputi penangkapan para pendukung gerakan separatisme di Papua yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri.
- **Dampak:** Tindakan-tindakan ini mengancam kebebasan berbicara dan berkumpul, yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.

2) Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya:

- **Contoh Kasus:** Eksploitasi tenaga kerja dalam industri-industri besar, seperti perkebunan kelapa sawit dan tambang, dimana pekerja seringkali mendapatkan upah yang sangat rendah dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya.
- **Dampak:** Pelanggaran ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjamin kondisi kerja yang adil dan layak serta hak untuk hidup layak.

3) Pelanggaran Hak terhadap Populasi Marginal:

- **Contoh Kasus:** Diskriminasi terhadap kelompok minoritas salah satu contohnya kelompok agama minoritas, yang sering menghadapi kekerasan dan diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari.
- **Dampak:** Tindakan ini membatasi individu dari akses ke layanan dasar, kesetaraan dalam pekerjaan, dan perlindungan hukum.



Jejak Pancasila

Salah satu kasus pelanggaran HAM terberat di Indonesia adalah Tragedi 1965-1966, di mana ratusan ribu orang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berkenaan dengan pasal 28E UUD NRI 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tragedi ini tetap menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar yang belum sepenuhnya diselesaikan hingga saat ini.



Seorang mahasiswa Tionghoa Indonesia di Universitas Res Publica diserang oleh massa dan dibawa pergi oleh tentara, 15 Oktober 1965 – Wikipedia.org

4) Respons Pemerintah dan Masyarakat:

- **Tindakan Pemerintah:** Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat peraturan dan hukuman bagi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ratifikasi sejumlah konvensi internasional.
- **Partisipasi Masyarakat:** Organisasi masyarakat sipil di Indonesia aktif dalam mengadvokasi hak asasi manusia, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang hak mereka, dan menekan pemerintah untuk melakukan reformasi.

Dalam menyikapi pelanggaran hak ini, sangat penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum, baik nasional maupun internasional. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional adalah kunci dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Pengingkaran Kewajiban

Pengingkaran kewajiban adalah perilaku warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara atau manusia. Pengingkaran ini dapat berupa tidak menjalankan tugas yang telah diatur oleh undang-undang, seperti UUD NRI Tahun 1945.

a. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara meliputi, antara lain, membayar pajak, mengikuti hukum, serta berpartisipasi dalam pembelaan negara dan upaya-upaya pembangunan nasional.

Meskipun konstitusi dan undang-undang menetapkan kewajiban ini, banyak warga yang mengabaikannya, baik karena ketidaktahuan atau karena kurangnya penegakan hukum.

Kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan terkait. Contohnya adalah UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka terjadi pelanggaran kewajiban, dan bisa dikenai sanksi hukum.

Beberapa contoh pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 adalah:

- ▷ Parkir di tempat yang tidak sesuai (melanggar Pasal 43).
- ▷ Mengendarai sepeda motor tanpa helm (melanggar Pasal 57).
- ▷ Mengemudikan kendaraan tanpa SIM sesuai dengan jenis kendaraan (melanggar Pasal 77).



Pelanggaran asal 57 UU No. 22 Tahun 2009 karena tidak memakai helm saat berkendara – Penerbit

Kehidupan yang tertib dapat tercapai apabila setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Apabila kewajiban diabaikan, kehidupan bisa menjadi tidak seimbang, merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Adapula UU RI No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak. Pasal 30 menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka negara berhak memberikan sanksi, termasuk denda dan hukuman penjara.

b. Analisis Kasus Pengingkaran di Indonesia

Pengingkaran kewajiban oleh warga negara dan entitas di Indonesia mencakup berbagai bentuk, dari penghindaran pajak hingga pengabaian terhadap kewajiban perlindungan lingkungan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai beberapa kasus signifikan:

▷ Penghindaran Pajak

- **Contoh Kasus:** Kasus-kasus penghindaran pajak oleh individu kaya dan korporasi besar di Indonesia merupakan isu berulang yang menonjol. Kasus seperti skandal Panama Papers telah mengungkap beberapa nama besar dari Indonesia yang terlibat dalam skema penghindaran pajak global.
- **Dampak:** Penghindaran pajak mengurangi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk pembiayaan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- **Upaya Penanganan:** Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan dan memperketat peraturan pajak untuk menangani masalah ini.

▷ Pelanggaran Regulasi Lingkungan

- **Contoh Kasus:** Deforestasi ilegal dan pembakaran hutan oleh korporasi untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, telah menyebabkan kerusakan ekologis yang luas.
- **Dampak:** Kegiatan ini tidak hanya mengancam biodiversitas tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim global dan mengakibatkan masalah kesehatan publik, seperti penyakit pernapasan akibat asap.
- **Upaya Penanganan:** Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran lingkungan, namun penerapannya sering kali tidak konsisten.

▷ Pelanggaran Kewajiban Perlindungan Hak Pekerja

- **Contoh Kasus:** Eksploitasi pekerja dalam industri-industri seperti manufaktur pakaian dan elektronik, dimana pekerja sering kali dibayar di bawah standar minimum dan bekerja dalam kondisi yang tidak aman.
- **Dampak:** Pelanggaran ini menunjukkan kesenjangan yang besar dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan menghambat perkembangan sosial yang adil.
- **Upaya Penanganan:** Peningkatan inspeksi kerja dan penguatan serikat pekerja telah dilakukan, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaan hukum.

▷ **Pengabaian Kewajiban Sosial dan Komunal**

- **Contoh Kasus:** Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan pengabaian terhadap hak-hak mereka, baik dalam konteks urban maupun pedesaan.
- **Dampak:** Hal ini menciptakan ketegangan sosial dan memperdalam ketidakadilan sosial, menghambat integrasi sosial dan keragaman.
- **Upaya Penanganan:** Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil telah berusaha meningkatkan kesadaran dan melindungi hak-hak kelompok minoritas melalui advokasi dan pendidikan.

▷ **Pengingkaran Kewajiban pada Perlindungan Anak**

- **Contoh Kasus:** Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak **seperti** kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun undang-undang melarang pekerja anak di bawah umur tertentu, praktik eksploitasi tenaga anak, terutama di sektor informal dan pertanian, masih marak. Anak-anak ini sering bekerja dalam kondisi berbahaya dan merugikan pendidikan mereka.
- **Dampak**
 - 1) Trauma dan masalah kesehatan mental dari kekerasan atau eksploitasi.
 - 2) Gangguan pendidikan dan peluang masa depan akibat kerja anak.
 - 3) Ketidakstabilan sosial dan kepercayaan yang menurun terhadap institusi.
 - 4) Hambatan pertumbuhan ekonomi karena pengurangan potensi produktivitas.
- **Upaya Penanganan**
 - 1) Integrasi layanan perlindungan anak dengan sistem pendidikan dan kesehatan.
 - 2) Peninjauan dan pembaruan undang-undang untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan anak.
 - 3) Penjaminan pelaksanaan undang-undang yang efektif dan akuntabel.

Contoh Soal

Berikan contoh pelanggaran hak ekonomi dan sosial di Indonesia dan jelaskan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat!

Jawaban:

Salah satu contoh pelanggaran hak ekonomi dan sosial di Indonesia adalah eksploitasi tenaga kerja di industri-industri besar seperti perkebunan kelapa sawit. Pekerja sering kali dibayar dengan upah rendah dan bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Dampak dari pelanggaran ini adalah menurunnya kualitas hidup pekerja, meningkatkan ketimpangan sosial, dan memperburuk kondisi kesehatan mereka. Selain itu, hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil karena sebagian besar penduduk tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Pembahasan:

Pelanggaran hak ekonomi dan sosial menyebabkan ketidakadilan yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Selain merugikan pekerja secara langsung, hal ini juga menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi dan pengawasan di sektor-sektor ekonomi untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan merancang kampanye kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang, lalu tentukan tema kampanyemu
2. Rancang materi kampanye yang akan kelompok kalian cetuskan, dapat dikemas dalam sebuah poster, pamflet, video singkat, atau infografis edukatif
3. Pastikan kampanye kalian memuat:
 - ▷ Penjelasan singkat tentang pentingnya hak dan kewajiban.
 - ▷ Contoh penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
 - ▷ Ajakkan atau pesan positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
4. Presentasikan hasil kampanye di depan kelas atau tempelkan di sudut kelas yang telah disediakan.





3. Mengetahui Contoh Pelanggaran Hak dan Kewajiban Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita menemukan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan intoleransi, diskriminasi, persekusi, hingga cyberbullying. Pada sub-bab ini, kita akan membahas beberapa contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, beserta rujukan hukum yang mengaturnya.

Intoleransi dalam Kehidupan Beragama

Salah satu bentuk pelanggaran hak yang paling sering terjadi adalah intoleransi dalam kehidupan beragama. **Pasal 29 ayat 1 UUD 1945** dengan tegas menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," yang berarti bahwa setiap warga negara berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak individu atau kelompok yang mengalami intoleransi dalam menjalankan keyakinan mereka.

Intoleransi ini dapat berupa penolakan terhadap rumah ibadah, pelecehan verbal atau fisik terhadap pemeluk agama tertentu, hingga upaya pemaksaan keyakinan yang tidak sesuai dengan pilihan individu. Contoh konkret intoleransi beragama yang sering terjadi di masyarakat meliputi larangan pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas, dan tindakan persekusi terhadap mereka yang menjalankan kepercayaannya di luar agama mayoritas. Negara bertanggung jawab menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan harus mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk intoleransi.

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan tindakan membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Hal ini bertentangan dengan **Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945**, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Selain itu, **UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** juga mengatur secara spesifik mengenai larangan tindakan diskriminasi.



Ilustrasi penolakan tindakan diskriminasi dan rasisme warna kulit – Shutterstock.com.2597833669

Diskriminasi dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, atau bahkan dalam lingkungan sosial. Misalnya, seorang wanita mungkin mengalami diskriminasi dalam dunia kerja dengan menerima upah yang lebih rendah daripada rekan pria dengan posisi dan tanggung jawab yang sama. Negara memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kasus-kasus diskriminasi dan memastikan kesetaraan hak bagi setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka.

Persekusi

Persekusi adalah tindakan pengejaran, penindasan, atau penghukuman yang dilakukan secara sepihak oleh individu atau kelompok terhadap orang lain. Persekusi sering kali terjadi karena perbedaan pendapat, kepercayaan, atau latar belakang sosial. **UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari segala bentuk ancaman, tekanan, atau kekerasan.

Contoh persekusi yang sering terjadi di masyarakat adalah tindakan kelompok tertentu yang mengintimidasi atau menganiaya individu hanya karena perbedaan pandangan politik atau agama. Persekusi ini dapat

dilakukan secara fisik maupun mental, dan sering kali didorong oleh kebencian atau prasangka yang tidak beralasan. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara dilindungi dari segala bentuk persekusi dan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pelaku.

Cyberbullying

Di era digital seperti sekarang, **cyberbullying** atau perundungan di dunia maya menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak yang kian marak. **Pasal 28G ayat 2 UUD 1945** mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Cyberbullying bisa berupa penghinaan, penyebaran fitnah, hingga ancaman yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya. Perundungan jenis ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk depresi, kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Negara memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai bahaya cyberbullying serta menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan cyberbullying, dan bagaimana hukuman yang dikenakan pada pelaku cyberbullying menurut Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 serta UU ITE?

Jawaban:

Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya, yang dapat berupa penghinaan, penyebaran fitnah, atau ancaman. Menurut Pasal 28G ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta perlindungan dari ancaman ketidakamanan. Pelaku cyberbullying dapat dikenakan hukuman sesuai dengan UU ITE, yang mengatur tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, termasuk pencemaran nama baik dan ancaman melalui media digital. Hukuman bisa berupa denda atau pidana penjara tergantung pada beratnya pelanggaran.

Pembahasan:

Cyberbullying adalah pelanggaran hak pribadi yang serius, dengan dampak psikologis yang dapat menghancurkan korban. Pemerintah Indonesia telah merancang undang-undang untuk melindungi warga negara dari perundungan digital, dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang melanggar hak pribadi orang lain.



4. Mempromosikan Kampanye Antipelanggaran Hak dan Kewajiban

Pentingnya memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai warga negara merupakan salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sering kali muncul akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak serta kewajiban yang dimiliki. Oleh karena itu, kampanye antipelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menjadi langkah penting dalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub-bab ini akan membahas bagaimana implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mendukung pembangunan.

Implementasi Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara

Penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab negara dan institusi lainnya. **Pasal 23A UUD 1945** menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ini berarti bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mendukung pembangunan negara. Pajak yang dipungut dari masyarakat menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan publik.

Selain itu, **Pasal 31 ayat 1 UUD 1945** menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," sementara **Pasal 31 ayat 2** menegaskan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dihormati oleh setiap pihak, sementara kewajiban untuk mengikuti pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara warga negara dan negara. Implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata merupakan langkah nyata untuk menjamin hak ini.

Lebih lanjut, **Pasal 34 ayat 3 UUD 1945** menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Hak atas kesehatan ini diiringi dengan kewajiban negara untuk menyediakan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, termasuk mematuhi aturan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti dalam upaya pencegahan penyakit menular.

Implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sementara warga negara harus menyadari kewajiban mereka untuk berkontribusi terhadap kemajuan bersama melalui pembayaran pajak, menjaga kesehatan, dan menjalankan kewajiban pendidikan.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk Mendukung Pembangunan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu prinsip penting dalam **Pancasila**, yang juga tercermin dalam berbagai aturan hukum di Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi, baik dari segi ras, agama, suku, maupun status sosial. Prinsip ini sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Pembangunan yang berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab akan berfokus pada kesejahteraan seluruh warga negara tanpa meninggalkan kelompok manapun. Hal ini mencakup peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan atau berada di wilayah terpencil. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 ayat 1 UUD 1945**, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara," pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok rentan ini mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan.

Salah satu bentuk nyata penerapan nilai ini adalah dalam program **pembangunan berkelanjutan** yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan infrastruktur, misalnya, tidak hanya difokuskan pada kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil agar seluruh warga negara dapat menikmati hasil pembangunan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga tercermin dalam upaya negara untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk dalam hal upah yang layak, perlindungan terhadap diskriminasi, serta jaminan keselamatan kerja. Dengan mengutamakan keadilan dan adab dalam perlakuan terhadap pekerja, pembangunan akan lebih inklusif dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.

Contoh Soal

Dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan hak atas pendidikan ini di Indonesia, dan sebutkan upaya yang dilakukan untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia!

Jawaban:

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hak atas pendidikan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, seperti program pendidikan gratis di sekolah dasar dan menengah, serta membangun infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan pelatihan guru dan distribusi dana pendidikan yang merata.

Pembahasan:

Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Meskipun banyak tantangan, seperti kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas, upaya terus dilakukan untuk memastikan semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak.

Rangkuman

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak di Indonesia dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Di sisi lain, kewajiban warga negara diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur tentang syarat dan prosedur memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang yang merupakan bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan menjadi warga negara melalui undang-undang. Warga negara memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam pemerintahan, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembelaan negara.

2. Pelanggaran Hak dan Kewajiban serta Upaya Pencegahannya

Pelanggaran hak di Indonesia mencakup pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang sering kali berkaitan dengan penindasan kebebasan berbicara, hak atas pendidikan dan kesehatan, serta hak atas pekerjaan yang layak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjamin hak-hak ini, namun implementasinya sering tidak konsisten, terutama di daerah terpencil dan di kalangan kelompok marginal. Selain itu, hak atas pembangunan juga menjadi isu penting yang menekankan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam beberapa kasus pelanggaran hak, seperti penangkapan tanpa proses hukum, eksploitasi tenaga kerja, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, masih terjadi. Negara harus memastikan perlindungan hak-hak ini melalui penerapan hukum yang adil, sementara masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dan mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum.

3. Peningkaran Kewajiban

Peningkaran kewajiban oleh warga negara mengacu pada perilaku yang tidak menjalankan tugas yang diatur oleh undang-undang, seperti tidak membayar pajak atau melanggar aturan hukum lainnya. Misalnya, pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melibatkan parkir sembarangan, mengemudi tanpa SIM, dan tidak memakai helm. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban ini agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib. Selain itu, pelanggaran kewajiban terhadap perlindungan anak, seperti kekerasan fisik dan eksploitasi anak, juga menjadi perhatian serius yang perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih tegas dan efektif.

4. Mempromosikan Kampanye Antipelanggaran Hak dan Kewajiban

Pentingnya memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sebagai warga negara merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Kampanye antipelanggaran hak dan peningkaran kewajiban diperlukan untuk menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghormatan terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara warga negara juga harus berkontribusi melalui pembayaran pajak, menjaga kesehatan, dan mengikuti pendidikan. Pemerintah harus memastikan akses terhadap hak-hak dasar ini, dan warga negara harus menyadari kewajiban mereka untuk berkontribusi pada kemajuan bersama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan dan inklusif, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan hak warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945?
 - A. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan
 - B. Hak untuk bekerja dan hidup layak
 - C. Hak untuk beragama sesuai dengan keyakinan pribadi
 - D. Semua jawaban benar
 - E. Hanya jawaban A dan C yang benar
2. Pelanggaran hak yang mencakup kebebasan berbicara dan beragama serta hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia dapat dijamin dengan perjanjian internasional yang mana?
 - A. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
 - B. International Covenant on Civil and Political Rights
 - C. International Covenant on Education and Culture
 - D. A dan B
 - E. Semua jawaban benar
3. Apa akibat langsung bagi negara jika kewajiban membayar pajak diabaikan oleh sebagian besar warga negara?
 - A. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik terganggu
 - B. Negara mengalami kelebihan anggaran yang menguntungkan
 - C. Tidak ada dampak signifikan pada pembangunan
 - D. Hanya sektor pendidikan yang terpengaruh
 - E. Meningkatnya pengeluaran pribadi warga negara
4. Jika pengingkaran kewajiban seperti penghindaran pajak terus meningkat, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang?
 - A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara
 - B. Menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah
 - C. Meningkatkan kesejahteraan sosial secara merata
 - D. Mengurangi pengaruh Indonesia dalam diplomasi internasional
 - E. Meningkatkan jumlah investor asing
5. Diskriminasi dalam bidang pekerjaan yang sering terjadi adalah ketidaksetaraan upah antara pria dan wanita. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak apa?
 - A. Hak untuk hidup
 - B. Hak untuk bebas dari penyiksaan
 - C. Hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang setara
 - D. Hak untuk beribadah
 - E. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu

6. Mengapa kampanye antipelanggaran hak dan kewajiban sangat penting bagi masyarakat Indonesia?
- A. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat
 - B. Agar hak-hak dasar warga negara dapat terjamin dengan baik
 - C. Untuk mengurangi tingkat kriminalitas
 - D. A dan B benar
 - E. Semua jawaban benar
7. Intoleransi dalam kehidupan beragama yang mencakup penolakan terhadap rumah ibadah atau pelecehan terhadap pemeluk agama tertentu merupakan bentuk pelanggaran hak yang dijamin dalam pasal berapa dalam UUD 1945?
- A. Pasal 28J
 - B. Pasal 29 ayat 1
 - C. Pasal 31 ayat 2
 - D. Pasal 34 ayat 3
 - E. Pasal 28I ayat 2

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

James, William. *The Principles of Psychology*. New York: Henry Holt and Co., 1890.

UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945.

UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2003.

Lembaga Studi HAM dan Demokrasi (2017). *Kebebasan Beragama di Indonesia: Studi Kasus Penolakan Rumah Ibadah*. Jakarta: LSHD Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.



BAB 4

MENGUPAS HAK DAN KEWAJIBAN

Karakter Pelajar Pancasila

▷ **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai kewajiban sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berperan aktif dalam menegakkan nilai moral dan etika untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

▷ **Gotong Royong**

Berkolaborasi dalam merancang solusi atas masalah pelanggaran hak dan kewajiban di masyarakat.

Kata Kunci: Hak & Kewajiban Warga Negara, Solusi Pelanggaran Hak, Masalah Sosial .

Tujuan Pembelajaran: Solusi Pelanggaran untuk Masyarakat yang Lebih Adil

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan

- ▷ Mengenali berbagai bentuk pelanggaran hak warga negara, seperti hak atas pendidikan, hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas kebebasan berpendapat.
- ▷ Mengidentifikasi bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi hukum, dan kewajiban bela negara.
- ▷ Menghubungkan permasalahan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan nilai-nilai Pancasila.
- ▷ Menganalisis permasalahan dalam konteks sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta mengenali faktor-faktor penyebabnya.

2. Merumuskan solusi atas permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

- ▷ Mengembangkan solusi solutif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan menggunakan pendekatan yang sesuai.
- ▷ Menerapkan Model P4 (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan) dalam merumuskan strategi penyelesaian, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
- ▷ Merumuskan solusi yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjaga harmoni sosial melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- ▷ Melibatkan pendekatan hukum, sosial, dan moral dalam upaya penyelesaian masalah, termasuk melalui edukasi, penguatan nilai-nilai kebersamaan, dan pengawasan ketat terhadap penerapan kebijakan atau peraturan.



F I T R I



1. Merancang Gagasan Solutif atas Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Merancang gagasan solutif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berarti mencari solusi efektif yang melibatkan semua elemen masyarakat, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pelanggaran hak, seperti tidak terpenuhinya hak atas pendidikan atau kebebasan berpendapat, dan pengingkaran kewajiban, seperti tidak mematuhi hukum atau kewajiban sosial, perlu ditangani dengan pendekatan yang komprehensif. Solusi ini harus mencakup edukasi yang meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta penguatan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban demi membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Warga Negara Muda Berkomitmen Menegakkan Hukum dan HAM

Warga negara muda memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan wajib menjunjunginya. Komitmen ini juga diperkuat oleh Piagam HAM PBB, yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama.

Sukarno dalam pemikirannya (2018) menekankan bahwa menegakkan hukum dan HAM adalah tugas bersama seluruh rakyat, termasuk pemuda. Generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi nilai-nilai kesetaraan, menghormati hak setiap individu, serta menolak segala bentuk diskriminasi.

Dalam praktiknya, pemuda dapat mulai berperan dengan mengatasi konflik di lingkungan sekitar secara damai, mempromosikan dialog yang konstruktif, dan menjaga kesetaraan hak dalam komunitas. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, mereka bisa menyebarkan kesadaran akan pentingnya HAM dan keadilan sosial lebih luas. Ini semua selaras dengan semangat Pancasila dan prinsip-prinsip hukum serta HAM internasional.

Dengan komitmen kuat, generasi muda dapat membangun masa depan bangsa yang lebih adil, setara, dan manusiawi, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan pemikiran para pendiri bangsa.

Mengidentifikasi Permasalahan Pelanggaran Hak di Lingkungan Sekitar dan Kaitannya dengan Pancasila

Pelanggaran hak di lingkungan sekitar merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Penting bagi kita untuk memahami permasalahan ini melalui kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan moral yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Setiap sila Pancasila menawarkan prinsip penting yang dapat dijadikan panduan dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak.

Berikut beberapa contoh permasalahan pelanggaran hak yang dapat kita identifikasi di lingkungan sekitar, serta hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2) - Kaitan dengan Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Pelanggaran hak terhadap pekerja, seperti tidak mendapat upah layak atau kondisi kerja yang buruk, mencerminkan ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sila ke-2 menekankan pentingnya memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab, termasuk dalam memberikan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

b. Hak dan kewajiban membela negara (Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30) - Kaitan dengan Sila ke-3 "Persatuan Indonesia"

Rendahnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan bentuk pengingkaran kewajiban bela negara. Sila ke-3 menekankan pentingnya persatuan, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan, baik dalam lingkup nasional maupun lokal.

c. Hak atas pengembangan diri dan pendidikan (Pasal 28C Ayat 1 dan 2, Pasal 31) - Kaitan dengan Sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil atau mereka yang kurang mampu, mencerminkan pelanggaran hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sila ke-5 menuntut adanya keadilan sosial di mana setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk pengembangan diri.



*Suasana siswa belajar menggunakan teknologi –
Shutterstock.com. 1958662609*

d. Hak atas perlakuan yang adil di depan hukum (Pasal 28D Ayat 1-4) - Kaitan dengan Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Ketidakadilan dalam penegakan hukum, terutama bagi warga miskin yang tidak mampu mengakses bantuan hukum yang memadai, bertentangan dengan Sila ke-2. Setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.

e. Kebebasan berpendapat dan berserikat (Pasal 28E Ayat 1-3, Pasal 28F) - Kaitan dengan Sila ke-4 "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, baik di ruang publik maupun media sosial, adalah pelanggaran hak yang bertentangan dengan Sila ke-4. Sila ini mendorong pelaksanaan musyawarah dan kebijaksanaan dalam menyuarakan pendapat serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

f. Hak atas keamanan pribadi (Pasal 28G Ayat 1-2) - Kaitan dengan Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Meningkatnya kejahatan di lingkungan sekitar, yang mengancam hak atas keamanan pribadi, merupakan pelanggaran hak asasi yang harus diatasi sesuai dengan Sila ke-2. Kemanusiaan yang beradab menuntut perlindungan terhadap setiap individu dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikologis.

g. Hak atas kesejahteraan sosial dan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1-4) - Kaitan dengan Sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Ketimpangan dalam layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu, menegaskan pentingnya penegakan Sila ke-5. Keadilan sosial harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan yang memadai.

h. Hak atas identitas budaya dan agama (Pasal 28I Ayat 1-2, Pasal 29) - Kaitan dengan Sila ke-1 "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Diskriminasi atau intoleransi terhadap agama dan budaya lain mencederai prinsip Sila ke-1, yang menjamin kebebasan beragama dan menghormati perbedaan keyakinan. Sila ini mengajarkan

pentingnya saling menghargai dalam keragaman dan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Tabel Pasal Undang-Undang Terkait Hak Warga Negara dan Kaitannya dengan Pancasila

Pasal UUD 1945	Isi Utama Pasal	Contoh Pelanggaran di Lingkungan Sekitar	Kaitan dengan Sila Pancasila
Pasal 27 Ayat 2	Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak	Gaji di bawah standar atau kondisi kerja yang tidak manusiawi	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 27 Ayat 3	Kewajiban membela negara	Rendahnya partisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan	Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Pasal 28C Ayat 1	Hak mengembangkan diri melalui pendidikan	Anak-anak putus sekolah atau akses pendidikan yang terbatas	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pasal 28C Ayat 2	Hak untuk berjuang memajukan dirinya dan memperjuangkan hak kolektif	Kurangnya dukungan terhadap pengembangan komunitas	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pasal 28D Ayat 1	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil	Diskriminasi dalam penegakan hukum dan akses terhadap perlindungan hukum	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 28D Ayat 2	Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil	Ketidakadilan dalam lingkungan kerja, seperti diskriminasi gaji	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 28D Ayat 3	Hak warga negara atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pemilu yang tidak adil atau diskriminasi dalam akses politik	Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Pasal 28D Ayat 4	Hak atas status kewarganegaraan yang sah	Masalah kewarganegaraan bagi etnis tertentu	Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Pasal 28E Ayat 1	Hak untuk memeluk agama, kepercayaan, dan menyatakan pendapat	Pembatasan kebebasan berpendapat, baik di ruang publik maupun media	Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Pasal 28E Ayat 2	Hak kebebasan bergerak, berkumpul, dan berserikat	Pembatasan kebebasan untuk berkumpul atau berserikat	Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Pasal 28E Ayat 3	Hak kebebasan berpendapat	Ancaman terhadap kebebasan berpendapat di media sosial	Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Pasal 28F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi	Kesulitan mendapatkan akses informasi yang bebas	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pasal UUD 1945	Isi Utama Pasal	Contoh Pelanggaran di Lingkungan Sekitar	Kaitan dengan Sila Pancasila
Pasal 28G Ayat 1	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda	Tingginya angka kriminalitas di lingkungan	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 28G Ayat 2	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia	Korban kekerasan fisik atau psikologis	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 28H Ayat 1	Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik	Akses terbatas terhadap layanan kesehatan atau kondisi lingkungan yang buruk	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pasal 28H Ayat 2	Hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus	Kurangnya fasilitas bagi kelompok rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 28H Ayat 3	Hak atas jaminan sosial	Kurangnya akses terhadap layanan jaminan sosial di daerah terpencil	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pasal 28H Ayat 4	Hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang	Kasus penyitaan tanah tanpa proses hukum yang adil	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pasal 28I Ayat 1	Hak atas kehidupan, kebebasan dari perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi	Diskriminasi terhadap kelompok minoritas	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 28I Ayat 2	Hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi	Ketidakadilan dalam penerapan hukum, terutama pada kelompok rentan	Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pasal 29 Ayat 1-2	Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjamin kebebasan beragama	Intoleransi beragama atau diskriminasi berbasis agama	Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 30 Ayat 1-2	Hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan dan keamanan	Rendahnya kesadaran bela negara dan partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan	Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Pasal 31 Ayat 1-5	Hak warga negara atas pendidikan	Tidak meratanya akses terhadap pendidikan, terutama di daerah pedesaan	Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengidentifikasi Permasalahan Peningkaran Kewajiban di Lingkungan Sekitar

Selain pelanggaran hak, peningkaran kewajiban warga negara juga menjadi masalah yang berdampak signifikan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban merupakan bagian integral dari hak, di mana setiap hak yang diperoleh selalu diiringi oleh kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam UUD 1945, kewajiban warga negara diatur dalam berbagai pasal, seperti kewajiban membayar pajak, membela negara, menghormati hak asasi orang lain, serta berperan aktif dalam pembangunan. Peningkaran terhadap kewajiban ini menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan bangsa.

Contoh Permasalahan Peningkaran Kewajiban di Lingkungan SekitarBerdasarkan berbagai pasal dalam UUD 1945, berikut adalah beberapa contoh masalah peningkaran kewajiban yang sering terjadi di lingkungan sekitar:

a. Peningkaran kewajiban membayar pajak (Pasal 23A)

Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu cara warga negara berkontribusi terhadap pembangunan. Namun, di lingkungan sekitar sering ditemukan kasus warga yang tidak patuh terhadap kewajiban ini, baik dengan menghindari pajak atau melakukan pelaporan pajak yang tidak benar. Ketidakpatuhan ini mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Peningkaran kewajiban mematuhi hukum dan menjunjung tinggi pemerintah (Pasal 27 Ayat 1)

Warga negara wajib menaati hukum dan mendukung pemerintahan yang sah. Namun, ada warga yang tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti melanggar peraturan lalu lintas, tidak mematuhi kebijakan lingkungan, atau terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kerugian sosial dan memperlemah otoritas negara.

c. Kurangnya partisipasi dalam membela negara (Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30)

Kewajiban warga negara untuk membela negara, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, sering kali diabaikan. Contohnya, banyak warga yang enggan terlibat dalam kegiatan ronda malam, menjaga lingkungan dari tindakan kriminal, atau bahkan menolak ikut serta dalam program-program bela negara. Hal ini dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakstabilan sosial.

d. Peningkaran kewajiban menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J Ayat 1-2)

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dalam menggunakan hak kebebasan mereka. Misalnya, kebebasan berpendapat harus dijalankan tanpa merugikan atau mendiskreditkan orang lain. Di lingkungan sekitar, sering ditemukan kasus di mana warga mengabaikan kewajiban ini, seperti menyebarkan berita bohong (hoaks) di media sosial yang merusak reputasi seseorang, atau melakukan perundungan (bullying) secara verbal maupun fisik.

e. Peningkaran kewajiban dalam bidang pendidikan (Pasal 31)

Pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban. Namun, masih banyak orang tua yang tidak memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka, dengan membiarkan mereka bekerja atau putus sekolah. Padahal, memberikan akses pendidikan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua untuk mendukung masa depan anak dan bangsa.



Jejak Pancasila

Salah satu contoh penerapan pencegahan pelanggaran sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila adalah penanganan kasus korupsi. Dalam Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak, yang mencakup akses terhadap ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, Sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menuntut pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, negara telah memperkenalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja untuk menegakkan hukum dan mencegah tindakan korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan swasta, memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Tabel Kewajiban Warga Negara Sesuai Pasal UUD 1945

Pasal UUD 1945	Isi Utama Pasal	Contoh Peningkaran Kewajiban di Lingkungan Sekitar
Pasal 23A	Kewajiban membayar pajak dan pungutan lain yang diatur oleh undang-undang	Warga negara menghindari atau tidak membayar pajak secara benar
Pasal 27 Ayat 1	Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan yang sah	Melanggar aturan lalu lintas, aturan lingkungan, atau hukum lainnya
Pasal 27 Ayat 3	Kewajiban membela negara	Warga enggan berpartisipasi dalam kegiatan bela negara
Pasal 28J Ayat 1	Kewajiban menghormati hak asasi orang lain	Melakukan perundungan (bullying) atau menyebarkan hoaks
Pasal 28J Ayat 2	Pembatasan hak-hak warga demi menghormati hak orang lain dan ketertiban umum	Menyalahgunakan kebebasan berpendapat untuk merugikan orang lain
Pasal 30 Ayat 1-2	Kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara	Enggan terlibat dalam kegiatan keamanan lingkungan (ronda malam, dll.)
Pasal 31 Ayat 2-3	Kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya	Orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka

Kaitannya dengan Pancasila

Pelanggaran terhadap kewajiban warga negara ini tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Berikut ini kaitan antara beberapa permasalahan peningkaran kewajiban dengan sila-sila Pancasila:

1) Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Peningkaran kewajiban menghormati hak-hak orang lain (Pasal 28J Ayat 1-2) bertentangan dengan nilai agama yang mengajarkan tentang sikap saling menghormati dan berbuat adil kepada sesama.

2) Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menghindari pajak dan merugikan masyarakat luas (Pasal 23A) adalah bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan beradab.

3) Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Pengingkaran kewajiban membela negara dan menjaga keamanan lingkungan (Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30) melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, yang menjadi fondasi bagi ketahanan nasional.

4) Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kewajiban menaati hukum (Pasal 27 Ayat 1) dan menghormati hak orang lain (Pasal 28J Ayat 1-2) mencerminkan nilai demokrasi dan kebijaksanaan dalam menghormati keputusan bersama demi kepentingan umum.

5) Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tidak memprioritaskan pendidikan (Pasal 31) melanggar prinsip keadilan sosial karena pendidikan merupakan hak yang harus dijamin bagi semua warga negara untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan sosial.

Contoh Soal

Bagaimana penerapan Pancasila dapat mengatasi pelanggaran hak di Indonesia? Berikan contoh pelanggaran hak dan kaitannya dengan sila Pancasila!

Jawaban:

Pancasila menjadi pedoman dalam menegakkan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Beberapa contoh pelanggaran hak yang berhubungan dengan Pancasila adalah:

Sila ke-2: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"

Pelanggaran: Diskriminasi rasial atau agama.

Kaitan: Menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi sesuai dengan hak setiap individu.

Sila ke-5: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Pelanggaran: Ketimpangan akses pendidikan antara daerah.

Kaitan: Menuntut pemerataan kesejahteraan dan akses yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-4: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"

Pelanggaran: Pembatasan kebebasan berpendapat.

Kaitan: Menjamin kebebasan berbicara dan berorganisasi sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pembahasan:

Pancasila memberikan pedoman untuk menanggulangi pelanggaran hak dengan menekankan keadilan dan pemerataan bagi seluruh warga negara.



2. Merancang Mode P4 untuk Mengatasi Pelanggaran Hak

Pelanggaran hak seperti perundungan (*bullying*) dan intoleransi kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, warga negara muda perlu mengambil peran aktif melalui rancangan strategi yang terstruktur. Salah satu model yang dapat digunakan adalah **Mode P4** yang meliputi: **Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan**. Mode ini memungkinkan tindakan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Gagasan untuk Mengatasi Perundungan Melalui Model P4

Perundungan (*bullying*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak yang sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan media sosial. Ada banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan perundungan, mulai dari masalah keluarga, tekanan dari teman sebaya, hingga pengaruh media sosial. Untuk menangani perundungan secara efektif, warga negara muda dapat menggunakan Mode P4, yaitu **Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan**.

a. Perencanaan:

Langkah pertama dalam mencegah dan mengatasi perundungan adalah merencanakan strategi berdasarkan pemahaman faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan di beberapa konteks:

- ▷ **Keluarga:** Faktor keluarga sering kali menjadi penyebab utama perundungan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras atau kurang perhatian cenderung memiliki emosi negatif dan menyalurkannya melalui perundungan.

Contoh kasus: Seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh konflik sering kali menunjukkan perilaku agresif terhadap teman-temannya di sekolah, karena ia tidak mendapatkan perhatian positif di rumah. Kondisi ini membuatnya merasa perlu mendominasi orang lain untuk merasa berkuasa.



Dukungan keluarga dan lingkungan sangat membantu mengatasi penyembuhan trauma bagi anak yang mengalami perundungan – Shutterstock.com. 2274179825

- ▷ **Teman Sebaya:** Tekanan dari kelompok teman sebaya sering kali menjadi pendorong seseorang melakukan perundungan. Anak-anak atau remaja yang ingin diterima oleh kelompok teman-temannya mungkin terlibat dalam perundungan untuk mendapatkan pengakuan.

Contoh kasus: Seorang siswa menindas teman sekelas yang lebih lemah karena ia ingin diterima oleh kelompok siswa populer di sekolah. Meskipun ia pada awalnya tidak berniat melakukan perundungan, tekanan dari kelompok tersebut membuatnya merasa harus ikut serta.

- ▷ **Media Sosial:** Di era digital, media sosial menjadi platform yang sering kali memfasilitasi perundungan secara anonim. Penyebaran ujaran kebencian, body shaming, atau bahkan ancaman di media sosial bisa mendorong perilaku perundungan.

Contoh kasus: Seorang remaja perempuan menjadi korban perundungan di media sosial setelah foto pribadinya disebarluaskan tanpa izinnnya. Beberapa akun anonim terus-menerus mengejek penampilannya, yang membuatnya merasa tertekan secara psikologis.

- ▷ **Lingkungan:** Lingkungan sosial yang mendukung kekerasan verbal atau fisik dapat memperkuat perilaku perundungan. Di lingkungan ini, perundungan mungkin dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan bagian dari budaya.

Contoh kasus: Di sebuah sekolah, perundungan fisik antara siswa laki-laki dianggap sebagai cara menunjukkan kekuatan dan dominasi. Siswa yang tidak terlibat dalam perilaku tersebut dianggap lemah dan mudah menjadi sasaran perundungan lebih lanjut.

b. Pengorganisasian

Langkah selanjutnya adalah mengorganisir pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam melaksanakan program anti-perundungan. Pengorganisasian harus melibatkan semua lapisan, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas digital.

- ▷ **Keluarga:** Melibatkan orang tua, guru, dan ahli psikologi anak dalam membangun sistem dukungan yang kuat bagi anak-anak. Orang tua harus dilibatkan dalam program parenting yang mengajarkan cara menciptakan lingkungan rumah yang aman dan positif.
- ▷ **Teman Sebaya:** Mengorganisir kelompok pendukung teman sebaya yang berfungsi sebagai pengawas dan mediator ketika terjadi konflik atau perundungan di sekolah. Kelompok ini bisa dibentuk dari siswa-siswa yang telah dilatih mengenai dampak negatif perundungan.
- ▷ **Media Sosial:** Mengorganisir kampanye anti-bullying di media sosial dengan melibatkan influencer, komunitas online, dan organisasi pemuda untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya etika berkomunikasi di dunia maya.
- ▷ **Lingkungan:** Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga lokal, dan pihak sekolah untuk menciptakan program-program yang mempromosikan lingkungan bebas perundungan. Pengorganisasian dapat melibatkan pertemuan komunitas secara rutin untuk membahas masalah ini.

c. Pelaksanaan

Setelah rencana dan pengorganisasian siap, langkah berikutnya adalah melaksanakan program-program tersebut.

- ▷ **Keluarga:** Pelaksanaan program di tingkat keluarga dapat meliputi sesi konseling keluarga yang difasilitasi oleh psikolog untuk membantu orang tua dan anak-anak memahami peran penting komunikasi yang sehat dalam mencegah perundungan.

- ▷ **Teman Sebaya:** Mengadakan pelatihan anti-bullying untuk siswa yang diikuti oleh siswa, guru, dan konselor sekolah. Pelatihan ini bertujuan mengajarkan teknik resolusi konflik serta membangun rasa solidaritas antar siswa.
- ▷ **Media Sosial:** Melakukan kampanye digital yang menyebarkan pesan positif, seperti video pendek tentang pentingnya saling menghormati dan cerita dari para penyintas perundungan yang berhasil keluar dari pengalaman traumatis tersebut.
- ▷ **Lingkungan:** Melaksanakan program diskusi terbuka di sekolah, ruang komunitas, atau bahkan di media lokal, yang memungkinkan masyarakat berdialog tentang bahaya perundungan dan bagaimana cara mencegahnya.



Jejak Pancasila

Model P4 yang digunakan untuk mengatasi perundungan di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam konteks pendidikan nasional dan sering digunakan untuk mengembangkan program anti-bullying di berbagai sekolah. Model ini unik karena tidak hanya melibatkan pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan, menjadikannya pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dibandingkan dengan model yang hanya melibatkan satu pihak saja.



Slogan Pencegahan Perundungan – Shutterstock.com.256635163

d. Pengawasan

Untuk memastikan keberhasilan program, pengawasan yang ketat diperlukan pada semua level.

- ▷ **Keluarga:** Orang tua dan guru dapat terus memantau perilaku anak-anak mereka di rumah dan di sekolah. Mereka dapat saling bekerja sama untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal perilaku perundungan atau korban perundungan.
- ▷ **Teman Sebaya:** Kelompok pendukung teman sebaya di sekolah harus diberi wewenang untuk melaporkan kejadian perundungan kepada pihak sekolah tanpa rasa takut akan pembalasan dari pelaku.
- ▷ **Media Sosial:** Platform media sosial harus secara aktif memantau konten yang diunggah, terutama yang berpotensi menjadi alat perundungan. Pelaporan dari pengguna tentang kasus perundungan online juga harus segera ditindaklanjuti.
- ▷ **Lingkungan:** Membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab untuk memantau situasi di lingkungan sekolah atau tempat kerja, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perundungan.

Untuk menggambarkan permasalahan ini secara lebih jelas, berikut adalah **contoh kasus nyata** mengenai perundungan yang terjadi dalam berbagai konteks:

- ▷ **Keluarga:** Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun selalu diabaikan oleh orang tuanya yang sibuk bekerja. Akibatnya, ia mulai menunjukkan perilaku agresif di sekolah, menindas teman-temannya

sebagai cara untuk mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian dan kasih sayang di rumah menjadi faktor utama yang mendorong anak ini melakukan perundungan.

- ▷ **Teman Sebaya:** Di sebuah sekolah menengah, seorang siswa perempuan di-bully oleh kelompok teman-temannya karena dianggap tidak mengikuti tren mode terbaru. Tekanan dari kelompok teman sebaya ini menyebabkan siswa tersebut merasa tertekan, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah. Kelompok yang melakukan perundungan melakukannya untuk mempertahankan status sosial mereka di antara teman-teman lainnya.
- ▷ **Media Sosial:** Seorang remaja laki-laki menjadi korban perundungan online setelah ia mengunggah video tentang hobinya di media sosial. Beberapa akun anonim mulai mengejeknya, membuat meme yang merendahkan, dan bahkan mengancam secara verbal. Kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi platform yang memfasilitasi perundungan secara masif dan tanpa pengawasan yang memadai.
- ▷ **Lingkungan:** Di sebuah sekolah dasar di daerah perkotaan, budaya kekerasan fisik dianggap biasa di antara siswa laki-laki. Salah satu siswa yang lebih kecil dan tidak kuat secara fisik menjadi sasaran perundungan setiap hari. Lingkungan sekolah yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat membiarkan perilaku ini terus berlanjut, hingga korban akhirnya harus mendapatkan bantuan psikologis karena trauma.

Gagasan untuk Mengatasi Intoleransi Melalui Model P4

Intoleransi terhadap agama, ras, budaya, atau pandangan politik merupakan tantangan besar dalam masyarakat yang majemuk. Intoleransi ini sering kali melanggar hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan deklarasi internasional. Untuk mengatasi intoleransi secara efektif, pendekatan Model P4 (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan) dapat digunakan dengan melibatkan keluarga, teman sebaya, media sosial, dan lingkungan.

a. Peraturan Terkait Hak dan Intoleransi

- ▷ **Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM):** "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas."
- ▷ **Pasal 19 Ayat 2 UUD 1945:** "Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Pasal ini mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi yang fundamental. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain dan mematuhi batasan yang wajar.
- ▷ **Hak Derogable (Derogable Rights):** Hak-hak derogable adalah hak asasi manusia yang dapat dibatasi dalam situasi tertentu, misalnya demi keamanan publik atau ketertiban umum. Contoh hak *derogable* adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dapat dibatasi jika penyampaian opini mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, atau dapat menimbulkan kekerasan. Hak-hak ini dapat dibatasi oleh undang-undang demi menghormati hak-hak orang lain, ketertiban, serta menjaga keadilan.

Dalam konteks intoleransi, baik Pasal 19 Deklarasi HAM maupun Pasal 19 Ayat 2 UUD 1945 mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, ketika kebebasan ini disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, diskriminasi, atau intoleransi, hak tersebut dapat dibatasi sesuai dengan prinsip hak derogable.

b. Faktor Pendorong Intoleransi

Intoleransi muncul dari berbagai faktor, yang meliputi pengaruh keluarga, teman sebaya, paparan media sosial, dan lingkungan sosial. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci dalam menyusun strategi untuk mengatasinya melalui Model P4.

- ▷ **Keluarga:** Keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai awal diajarkan, termasuk sikap terhadap perbedaan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang intoleran, di mana perbedaan agama, budaya, atau ras tidak dihormati, cenderung membawa sikap intoleransi ke masyarakat.

Contoh kasus: Seorang anak yang sering mendengar orang tuanya berbicara negatif tentang agama lain mulai menunjukkan sikap antipati terhadap teman sekelasnya yang berbeda agama.

- ▷ **Teman Sebaya:** Pengaruh teman sebaya, terutama di lingkungan sekolah, dapat memperkuat intoleransi. Kelompok yang cenderung tertutup terhadap perbedaan dan hanya menerima anggota yang serupa (dalam hal agama, suku, atau budaya) menciptakan dinamika eksklusif.

Contoh kasus: Seorang siswa baru di sekolah yang berbeda suku dari mayoritas siswa lainnya mengalami diskriminasi dan penolakan dari kelompok pertemanan dominan, menyebabkan isolasi sosial.



Dukungan lingkungan teman sebaya – Shutterstock.com.303888209

- ▷ **Media Sosial:** Media sosial menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga dapat menyebarkan intoleransi. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan stereotip negatif di media sosial sering kali memperkuat intoleransi.

Contoh kasus: Setelah melihat unggahan yang berisi ujaran kebencian terhadap kelompok etnis tertentu, seorang pengguna media sosial mulai menyebarkan pesan yang sama, memperburuk ketegangan antar kelompok.

- ▷ **Lingkungan:** Di masyarakat yang homogen secara budaya atau agama, sering kali sulit bagi minoritas untuk merasa diterima. Stereotip dan prasangka yang berkembang di lingkungan ini mendorong munculnya intoleransi.

Contoh kasus: Sebuah lingkungan yang mayoritas agamanya sama kerap memperlakukan keluarga yang berbeda agama dengan curiga, menolak mereka dari acara-acara sosial, dan bahkan membatasi interaksi.

c. Penerapan Model P4 untuk Mengatasi Intoleransi

1) Perencanaan

Merencanakan upaya untuk mengatasi intoleransi harus mempertimbangkan berbagai faktor pendorong yang sudah diidentifikasi. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan yang bisa diambil:

- ▷ **Keluarga:** Menyusun program pendidikan keluarga yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan. Diskusi tentang keberagaman budaya, agama, dan ras harus menjadi bagian dari percakapan keluarga sehari-hari.
- ▷ **Teman Sebaya:** Merancang program dialog antar kelompok di sekolah yang melibatkan siswa dari latar belakang berbeda untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan.
- ▷ **Media Sosial:** Melakukan kampanye media sosial untuk menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi. Kampanye ini harus melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan mengedukasi tentang bahayanya ujaran kebencian.
- ▷ **Lingkungan:** Merencanakan acara lintas agama atau lintas budaya di lingkungan masyarakat, seperti festival budaya, dialog terbuka, atau kerja bakti bersama, untuk mempromosikan interaksi lintas kelompok dan mengurangi ketegangan sosial.

2) Pengorganisasian

Setelah merencanakan strategi, langkah berikutnya adalah mengorganisir berbagai pihak untuk menjalankan program anti-intoleransi.

- ▷ **Keluarga:** Melibatkan orang tua, guru, dan psikolog dalam program parenting atau diskusi keluarga untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak sejak dini.
- ▷ **Teman Sebaya:** Membentuk kelompok siswa yang berfungsi sebagai agen perubahan di sekolah, yang mempromosikan inklusi dan dialog terbuka antar kelompok.
- ▷ **Media Sosial:** Melibatkan influencer, organisasi kepemudaan, dan komunitas digital untuk bersama-sama menjalankan kampanye melawan intoleransi secara online.
- ▷ **Lingkungan:** Bekerja sama dengan pemerintah lokal, organisasi masyarakat, dan tokoh agama untuk mengorganisir kegiatan lintas agama dan lintas budaya di lingkungan yang lebih luas.

3) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah yang sudah direncanakan dijalankan secara konsisten:

- ▷ **Keluarga:** Melakukan kegiatan keluarga seperti diskusi atau permainan edukatif yang memperkenalkan anak-anak kepada nilai-nilai pluralisme dan penghargaan terhadap perbedaan.
- ▷ **Teman Sebaya:** Mengadakan kegiatan dialog lintas kelompok di sekolah, di mana siswa dari berbagai latar belakang dapat berbagi pengalaman mereka dan belajar dari satu sama lain.
- ▷ **Media Sosial:** Meluncurkan kampanye digital yang berisi video edukatif, infografis, dan cerita sukses tentang toleransi dan keberagaman. Kampanye ini dapat dilakukan di platform-platform besar dengan menggunakan hashtag dan kolaborasi lintaskomunitas

- ▷ **Lingkungan:** Mengadakan acara sosial seperti festival lintas budaya atau kegiatan olahraga bersama yang melibatkan berbagai komunitas. Acara ini memungkinkan interaksi antar kelompok yang sebelumnya mungkin jarang berinteraksi.

4) Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa program anti-intoleransi berjalan dengan efektif dan berkelanjutan:

- ▷ **Keluarga:** Orang tua dapat memantau interaksi anak-anak mereka dengan teman-teman yang berbeda latar belakang dan memastikan bahwa nilai-nilai toleransi diajarkan secara konsisten di rumah.
- ▷ **Teman Sebaya:** Guru dan konselor sekolah bertugas untuk memantau dinamika sosial di sekolah, memastikan bahwa tidak ada siswa yang merasa dikucilkan karena perbedaan agama, ras, atau budaya.
- ▷ **Media Sosial:** Moderator dan pengelola platform harus memantau konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian dan hoaks, serta memberikan sanksi tegas kepada akun yang menyebarkan intoleransi.
- ▷ **Lingkungan:** Komite lintas agama dan lintas budaya di lingkungan masyarakat bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dan menangani masalah yang timbul terkait intoleransi.

d. Solusi untuk Intoleransi

Untuk mengatasi intoleransi secara komprehensif, beberapa solusi berikut dapat diterapkan:

- ▷ **Edukasi Lintas Budaya:** Pendidikan yang mengajarkan keberagaman, baik di sekolah maupun di rumah, adalah kunci utama untuk membentuk masyarakat yang toleran. Program-program pertukaran budaya dan dialog lintas agama dapat meningkatkan pemahaman antar kelompok.
- ▷ **Perundang-undangan yang Kuat:** Menerapkan dan menegakkan hukum yang melarang diskriminasi dan ujaran kebencian, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, dapat mengurangi tindakan intoleransi di masyarakat.
- ▷ **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung keberagaman, seperti acara-acara sosial lintas agama atau budaya, dapat memperkuat solidaritas antar kelompok.
- ▷ **Pengawasan Media Sosial:** Platform media sosial harus memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk memoderasi konten yang berpotensi menyebarkan kebencian atau intoleransi. Pengguna juga harus dilibatkan dalam melaporkan konten yang tidak sesuai.

Contoh Soal

Jelaskan bagaimana penerapan Model P4 (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan) dapat digunakan untuk mengatasi perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah. Berikan juga contoh konkret untuk setiap tahap dalam Model P4.

Jawaban:

Penerapan Model P4 untuk mengatasi perundungan melibatkan empat tahap yang saling terkait. Berikut penjelasan singkat untuk masing-masing tahap:

1. Perencanaan:
Merencanakan strategi untuk mencegah perundungan dengan mengidentifikasi faktor penyebab.
Contoh: Seminar tentang saling menghormati dan menghargai perbedaan.
2. Pengorganisasian:
Membentuk program pencegahan dan kelompok pendukung.
Contoh: Program "peer support" di mana siswa lebih tua membantu siswa muda mengatasi masalah sosial.
3. Pelaksanaan:
Melaksanakan program secara aktif.
Contoh: Pelatihan keterampilan sosial atau kampanye anti-bullying di sekolah.
4. Pengawasan:
Memantau efektivitas program dan tindak lanjutnya.
Contoh: Pelaporan insiden perundungan dan tindak lanjut disipliner dari pihak sekolah.

Pembahasan:

Model P4 memberikan pendekatan sistematis dalam mengatasi perundungan dengan melibatkan semua elemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan berkelanjutan. Setiap tahap memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan sosial yang sehat.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan mengidentifikasi permasalahan nyata terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, menganalisis faktor penyebabnya, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam merumuskan solusi yang realistis dan sesuai nilai Pancasila.

1. Bentuklah kelompok berisi 4 orang.
2. Pilih salah satu situasi pelanggaran berikut yang sering terjadi di masyarakat:

Situasi Pelanggaran	Keterangan
Hak atas pendidikan tidak terpenuhi	Banyak anak tidak sekolah akibat keterbatasan ekonomi atau akses
Pelanggaran kebebasan berpendapat	Ujaran kebencian di media sosial berujung intimidasi atau persekusi
Pengingkaran kewajiban membayar pajak	Banyak warga yang menghindari pajak sehingga pembangunan terganggu
Pengingkaran kewajiban menjaga ketertiban	Tawuran antar pelajar yang mengganggu ketertiban umum

3. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut secara kritis:
 - a. Apa hak atau kewajiban yang dilanggar dalam kasus tersebut?
 - b. Apa pasal-pasal dalam UUD 1945 atau Deklarasi Universal HAM yang berkaitan dengan kasus tersebut?
 - c. Apa nilai Pancasila yang seharusnya dijunjung dalam kasus ini?
 - d. Apa faktor penyebab utama terjadinya pelanggaran tersebut?
4. Susun hasil analisis kelompok dalam bentuk ringkasan terstruktur.

Rangkuman

1. Merancang Gagasan Solutif atas Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban memerlukan solusi yang melibatkan semua elemen masyarakat, seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah. Salah satu langkah penting adalah dengan meningkatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk saling menghargai hak-hak individu sambil menjalankan kewajiban sosial. Hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara hak yang dimiliki individu dan kewajiban mereka terhadap negara serta masyarakat. Kesadaran kolektif mengenai hak asasi manusia dan tanggung jawab bersama sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Selain itu, melalui pendekatan yang komprehensif, masyarakat diajak untuk aktif dalam menanggulangi pelanggaran hak, baik dalam lingkup individu maupun dalam skala lebih besar seperti isu ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi pelanggaran ini melibatkan penguatan peran pemuda sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Pemuda diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan damai dan konstruktif, serta menjaga kesetaraan hak di masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, generasi muda dapat memperluas jangkauan penyebaran kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menghindari diskriminasi. Upaya kolektif ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan memastikan bahwa kewajiban sebagai warga negara dipenuhi oleh semua pihak, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Merancang Mode P4 untuk Mengatasi Pelanggaran Hak

Mode P4 (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan) adalah sebuah model yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak, seperti perundungan dan intoleransi di masyarakat. Perencanaan dimulai dengan memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku-perilaku ini, seperti faktor keluarga, tekanan dari teman sebaya, pengaruh media sosial, dan lingkungan sosial yang mendukung kekerasan. Dengan merencanakan langkah-langkah strategis berdasarkan pemahaman terhadap faktor-faktor ini, solusi yang lebih terarah dapat diterapkan. Misalnya, untuk mengatasi perundungan, langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber konflik dalam keluarga, teman sebaya, atau lingkungan sosial yang mendukung perilaku tersebut.

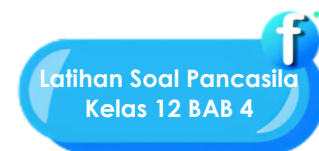
Pengorganisasian adalah langkah selanjutnya, di mana semua pihak terkait diundang untuk bekerja sama, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas media sosial. Ini melibatkan kolaborasi antara orang tua, guru, teman sebaya, dan bahkan media sosial untuk menyebarkan kampanye yang mendidik masyarakat tentang bahaya perundungan dan cara-cara pencegahannya. Setelah perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan konsisten melalui program-program yang melibatkan pelatihan, diskusi terbuka, dan kampanye media. Terakhir, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif. Orang tua, guru, dan lembaga terkait harus memantau perkembangan dan menangani setiap kasus perundungan atau intoleransi yang terjadi, serta memberikan solusi yang tepat jika ada pelanggaran. Model P4 ini memberikan kerangka kerja yang efektif dan terstruktur untuk mengatasi masalah perundungan dan intoleransi di masyarakat.

Latihan Soal

1. Pelanggaran hak di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah pelanggaran hak pekerja, seperti tidak mendapat upah yang layak atau kondisi kerja yang buruk. Dalam konteks ini, pelanggaran hak tersebut terkait dengan...
 - A. Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945
 - B. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945
 - C. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945
 - D. Pasal 28G Ayat 2 UUD 1945
 - E. Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945
2. Bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara agar tercipta keseimbangan antara keduanya?
 - A. Dengan mengurangi penegakan hukum
 - B. Melalui edukasi yang meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban serta penguatan nilai-nilai Pancasila
 - C. Menghindari partisipasi dalam kegiatan sosial
 - D. Menekankan hanya kewajiban warga negara tanpa memperhatikan hak-hak mereka
 - E. Membatasi akses pendidikan bagi warga negara tertentu
3. Apa yang menjadi peran utama generasi muda dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?
 - A. Menghindari konflik di lingkungan sekitar dan tidak terlibat dalam isu sosial
 - B. Mengadvokasi nilai-nilai kesetaraan, menghormati hak setiap individu, dan menolak diskriminasi
 - C. Menyebarkan kebencian dan intoleransi di media sosial
 - D. Membatasi akses pendidikan untuk golongan tertentu
 - E. Menghindari diskusi tentang pentingnya HAM
4. Apa yang harus dilakukan jika ada ketimpangan dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, yang melanggar hak atas pendidikan sesuai dengan sila Pancasila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"?
 - A. Menyalahkan pemerintah tanpa mencari solusi
 - B. Mendorong adanya program pendidikan yang inklusif dan merata
 - C. Menutup sekolah-sekolah di daerah tersebut
 - D. Mengurangi anggaran untuk pendidikan
 - E. Meningkatkan biaya pendidikan untuk mendorong kualitas

5. Jika seseorang mengabaikan kewajiban membayar pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, yang bertentangan dengan sila Pancasila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", dampaknya adalah:
- A. Terjadi ketidakadilan yang merugikan masyarakat
 - B. Peningkatan pembangunan yang merata
 - C. Menurunnya kesadaran sosial
 - D. Kesejahteraan sosial meningkat
 - E. Pemerintah dapat memberikan bantuan lebih banyak
6. Untuk mengatasi intoleransi di masyarakat melalui Model P4, langkah pertama yang harus diambil adalah...
- A. Melakukan pengawasan secara langsung tanpa perencanaan
 - B. Merencanakan strategi berdasarkan pemahaman faktor-faktor pendorong intoleransi
 - C. Mengorganisir kegiatan tanpa melibatkan masyarakat
 - D. Melaksanakan program tanpa melibatkan semua pihak terkait
 - E. Menghentikan penggunaan media sosial untuk kampanye
7. Apa yang menjadi tantangan utama dalam mengatasi perundungan di media sosial, dan bagaimana Model P4 dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut?
- A. Perundungan hanya terjadi di dunia nyata, bukan di media sosial
 - B. Menghindari penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sosial
 - C. Menggunakan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan melibatkan semua pihak
 - D. Menutup akses media sosial untuk mencegah perundungan
 - E. Menyalahkan korban perundungan tanpa mencari solusi efektif

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Sukarno, Ir. 2018. *Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Pandangan dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Nusantara.

Widjaja, G. 2019. *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf, A. 2020. *Pancasila sebagai Dasar Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Pasal 27, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 29, 30, 31*.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Pasal 19 Ayat 2*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)*. PBB: New York. Diakses melalui <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. *Panduan Pendidikan Toleransi untuk Generasi Muda*. Diakses melalui <https://www.kemdikbud.go.id/toleransi-muda>.

Setyowati, N. 2022. "Model P4 dalam Meningkatkan Kesadaran Warga Negara Muda terhadap Hak dan Kewajiban". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 18(2): 45-57. Diakses melalui <https://journal.kewarganegaraan.ac.id/p4-hak-kewajiban>



BAB 5

SEMANGAT GOTONG ROYONG

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Gotong Royong

Menumbuhkan semangat gotong royong dengan bekerja sama dan saling membantu dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kerja bakti atau membantu tetangga.

▷ Peduli Terhadap Sesama

Berempati terhadap sesama dan aktif mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan sosial dan kebersamaan di lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Kerja Sama, Gotong Royong, Kebersamaan, Solidaritas Sosial, Individualisme, Kerja Bakti.

Tujuan Pembelajaran: Pilar Kebersamaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

1. Mengidentifikasi sikap kerja sama dalam masyarakat

- ▷ Mengenali contoh nyata kerja sama di lingkungan sekitar, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, kerja bakti, atau membantu tetangga.
- ▷ Memahami pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial sebagai wujud solidaritas.

2. Menjelaskan pengertian dan nilai-nilai gotong royong

- ▷ Mengetahui definisi gotong royong sebagai wujud kebersamaan, persatuan, dan kekompakan masyarakat.
- ▷ Menguraikan nilai-nilai yang terkandung, seperti solidaritas, kepedulian, dan tolong-menolong.

3. Menganalisis ancaman terhadap gotong royong

- ▷ Mengidentifikasi faktor penghambat seperti sikap individualisme, kurangnya kepedulian sosial, dan perbedaan kepentingan.
- ▷ Menjelaskan dampak negatif hilangnya semangat gotong royong bagi keharmonisan masyarakat.

4. Mendeskripsikan cara melestarikan gotong royong

- ▷ Menyebutkan perilaku yang mendukung kelestarian gotong royong, misalnya ikut serta dalam kerja bakti atau kegiatan sosial.
- ▷ Memberikan contoh tindakan sederhana yang menjaga budaya gotong royong, seperti membantu tetangga atau berbagi dengan sesama.



1. Kerja Sama dalam Kehidupan Bergotong Royong

Hakikat Kerja Sama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kerja sama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya gotong royong. Konsep kerja sama di Indonesia telah menjadi fondasi utama dalam membangun solidaritas sosial, sebagaimana dinyatakan oleh Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, "Gotong royong adalah amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua." Kerja sama adalah cerminan semangat kolektif masyarakat yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Pengertian Kerja Sama

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, kerja sama diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang (kelompok) untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pengertian ini, kerja sama bukan hanya soal hasil yang dicapai, tetapi juga melibatkan proses di mana individu-individu atau kelompok bekerja bersama secara harmonis demi mencapai tujuan bersama.

Kerja sama juga bisa dilihat sebagai bentuk interaksi sosial yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak untuk memecahkan masalah, berbagi tanggung jawab, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kelompok atau komunitas tersebut.

Jenis-Jenis Kerja Sama Berdasarkan Urgensinya

Kerja sama dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan urgensinya:

a. Kerja sama spontan

Kerja sama spontan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa perencanaan sebelumnya. Ini sering kali terjadi sebagai reaksi terhadap situasi mendesak atau darurat, seperti ketika masyarakat berkumpul untuk membantu korban bencana alam. Dalam kondisi ini, kerja sama lahir dari rasa tanggung jawab sosial yang kuat dan dilakukan secara sukarela.

b. Kerja sama langsung

Kerja sama langsung adalah kerja sama yang melibatkan partisipasi langsung dari semua anggota masyarakat dalam aktivitas yang terorganisir. Contoh dari kerja sama langsung adalah kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum, di mana setiap orang hadir dan berkontribusi secara fisik untuk mencapai tujuan bersama.



Gotong royong untuk membersihkan lingkungan oleh warga – Shutterstock.com.2530698697

c. Kerja sama kontrak

Kerja sama kontrak terjadi ketika dua pihak atau lebih setuju untuk bekerja sama berdasarkan kesepakatan formal atau informal. Kerja sama ini umumnya memiliki aturan, batasan waktu, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat. Contoh dari kerja sama kontrak adalah proyek pembangunan infrastruktur di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan.

d. Kerja sama tradisional

Kerja sama tradisional mengacu pada jenis kerja sama yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan sering kali terkait dengan nilai-nilai budaya setempat. Di Indonesia, kerja sama

tradisional dapat dilihat dalam bentuk gotong royong yang dipraktikkan di berbagai daerah untuk kepentingan bersama, seperti upacara adat, pembangunan rumah bersama, atau perayaan keagamaan. Kerja sama ini bersifat kolektif dan biasanya tidak melibatkan imbalan material.

Pentingnya Kerja Sama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kerja sama memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan keberlangsungan masyarakat. Ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari kerja sama, dan berikut adalah 10 manfaat utama:

- 1) **Memperkuat ikatan sosial:** Kerja sama mempererat hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, membangun rasa kebersamaan dan saling percaya.
- 2) **Meningkatkan efisiensi:** Dengan bekerja bersama, tugas atau pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan efektif dibandingkan jika dilakukan sendirian.
- 3) **Menciptakan solidaritas:** Kerja sama menumbuhkan rasa saling peduli dan saling mendukung dalam masyarakat.
- 4) **Mengurangi ketimpangan sosial:** Dalam kerja sama, setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga ketimpangan sosial dapat dikurangi.
- 5) **Meningkatkan daya tahan masyarakat:** Kerja sama membuat masyarakat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan mengandalkan kekuatan kolektif.
- 6) **Membangun rasa tanggung jawab bersama:** Setiap anggota masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan komunitasnya.
- 7) **Memperluas jaringan dukungan sosial:** Kerja sama memungkinkan individu memiliki akses ke dukungan dari jaringan sosial yang lebih luas, baik secara emosional maupun material.
- 8) **Meningkatkan kemampuan komunikasi:** Dalam kerja sama, masyarakat belajar untuk berkomunikasi lebih baik dan mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak.
- 9) **Menciptakan rasa kepemilikan bersama:** Ketika bekerja sama, individu merasa memiliki hasil yang dicapai dan lebih termotivasi untuk menjaga keberhasilannya.
- 10) **Menciptakan harmoni sosial:** Kerja sama mengurangi potensi konflik karena semua orang terlibat aktif dalam proses sosial, dan merasa dihargai serta berkontribusi terhadap tujuan bersama.



Jejak Pancasila

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia melibatkan masyarakat dalam proses vaksinasi massal dengan melibatkan banyak pihak untuk mempercepat proses tersebut. Berbagai organisasi sosial, relawan, serta TNI-Polri bergotong royong membantu penyelenggaraan vaksinasi, terutama di daerah-daerah terpencil. Pendekatan gotong royong ini terbukti efektif untuk memastikan vaksinasi sampai ke semua lapisan masyarakat.



*Ketersediaan vaksin COVID-19 merupakan usaha dan gotong royong dari berbagai pihak –
Shutterstock.com.2025120476*

Sikap dan Perilaku dalam Kerja Sama

Keberhasilan kerja sama sangat bergantung pada sikap dan perilaku individu dalam masyarakat. Beberapa sikap utama yang mendukung kerja sama adalah:

- a. **Toleransi:** Menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan cara pandang sangat penting untuk menjaga kelancaran kerja sama. Sikap toleran mencegah konflik yang dapat muncul karena perbedaan pandangan.
- b. **Kesetaraan:** Setiap individu dalam proses kerja sama harus diperlakukan dengan setara. Kesetaraan ini memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan tidak ada yang merasa lebih penting atau diabaikan.
- c. **Saling Pengertian:** Saling memahami kebutuhan, keterbatasan, dan perasaan satu sama lain sangat penting dalam kerja sama. Dengan saling pengertian, anggota masyarakat dapat bekerja dengan lebih harmonis dan menghindari kesalahpahaman.

Contoh Soal

Jelaskan perbedaan antara jenis kerja sama spontan dan kerja sama kontrak dalam konteks kehidupan bermasyarakat!

Jawaban:

Kerja sama spontan terjadi sebagai reaksi cepat terhadap situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, masyarakat bekerja sama tanpa adanya perjanjian formal, seperti yang sering terlihat dalam kegiatan gotong royong atau bantuan sukarela setelah bencana. Sebaliknya, kerja sama kontrak melibatkan kesepakatan formal antara pihak-pihak yang terlibat, di mana ada aturan dan batasan waktu yang jelas. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan pihak kontraktor yang dituangkan dalam perjanjian kontrak dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.

Pembahasan:

Perbedaan mendasar antara kedua jenis kerja sama ini terletak pada formalitas dan perencanaan. Kerja sama spontan lebih fleksibel dan muncul tanpa rencana sebelumnya, sedangkan kerja sama kontrak lebih terstruktur dengan kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.



2. Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat

Hakikat Gotong Royong

Gotong royong adalah bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia yang menggambarkan kerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nilai gotong royong mencakup kebersamaan, tolong-menolong, rela berkorban, dan persatuan, seperti yang pernah disampaikan oleh Sukarno. Semangat ini melibatkan kontribusi kolektif tanpa pamrih untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

Nilai-Nilai dalam Gotong Royong

Gotong royong mencakup nilai-nilai seperti **tolong-menolong**, **kebersamaan**, **rela berkorban**, dan **persatuan**, yang semuanya membentuk dasar dari keharmonisan sosial. Nilai-nilai ini penting untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

Istilah Gotong Royong di Berbagai Daerah

Gotong royong dikenal di seluruh Indonesia, tetapi istilah dan praktiknya bisa bervariasi di berbagai daerah. Berikut adalah istilah gotong royong dari beberapa daerah di Indonesia beserta penjelasannya:

Tabel Istilah Gotong Royong dari Berbagai Daerah Indonesia

Daerah	Istilah Gotong Royong	Keterangan
Aceh	Meuseuraya	Bentuk gotong royong dalam kegiatan sosial atau adat, seperti perbaikan rumah.
Sumatera Utara	Marsialap ari	Kerja sama dalam masyarakat Batak, terutama untuk kegiatan pertanian dan sosial.
Sumatera Barat	Batobo	Gotong royong di bidang pertanian, saling membantu di sawah atau ladang.
Riau	Baselang	Kerja sama yang dilakukan dalam kehidupan sosial, khususnya untuk acara adat.
Kepulauan Riau	Sempok	Tradisi tolong-menolong dalam masyarakat Melayu untuk kegiatan bersama.
Jambi	Sepintak Sepicang	Bentuk gotong royong dalam kegiatan sosial dan adat di Jambi.
Bangka Belitung	Bedabung	Kerja sama masyarakat dalam membangun rumah, pernikahan, atau panen.
Lampung	Ngejalang	Tradisi gotong royong untuk membantu tetangga atau saudara dalam pekerjaan berat.
Jawa Barat	Sambatan	Kegiatan gotong royong untuk membantu tetangga membangun rumah atau acara besar.
Yogyakarta	Rewang	Gotong royong yang dilakukan saat ada acara hajatan atau perayaan di masyarakat.
Jawa Timur	Tulung-tinulung	Kerja sama untuk membantu orang lain, khususnya dalam situasi darurat atau hajatan.

Daerah	Istilah Gotong Royong	Keterangan
Bali	Ngayah	Kegiatan gotong royong yang dilakukan dalam konteks adat dan agama di Bali.
Nusa Tenggara	Seka	Bentuk gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian dan adat.
Kalimantan Selatan	Manunggal	Gotong royong yang dilakukan masyarakat Banjar untuk kegiatan sosial dan adat.
Kalimantan Timur	Pelas	Tradisi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pertanian.
Sulawesi Utara	Mapalus	Kerja sama dalam komunitas Minahasa untuk kegiatan pertanian dan sosial.
Sulawesi Selatan	Sipakatau	Filosofi dan praktik kerja sama dalam masyarakat Bugis-Makassar.
Gorontalo	Huyula	Tradisi tolong-menolong dalam masyarakat Gorontalo, terutama dalam acara adat.
Maluku	Masohi	Kerja sama dalam masyarakat Maluku untuk kegiatan sosial dan pembangunan.
Papua Barat	Ibim	Gotong royong dalam masyarakat Papua, khususnya dalam kegiatan adat atau pertanian.

Contoh Soal

Jelaskan perbedaan antara jenis kerja sama spontan dan kerja sama kontrak dalam konteks kehidupan bermasyarakat!

Jawaban:

Kerja sama spontan terjadi sebagai reaksi cepat terhadap situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, masyarakat bekerja sama tanpa adanya perjanjian formal, seperti yang sering terlihat dalam kegiatan gotong royong atau bantuan sukarela setelah bencana. Sebaliknya, kerja sama kontrak melibatkan kesepakatan formal antara pihak-pihak yang terlibat, di mana ada aturan dan batasan waktu yang jelas. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan pihak kontraktor yang dituangkan dalam perjanjian kontrak dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.

Pembahasan:

Perbedaan mendasar antara kedua jenis kerja sama ini terletak pada formalitas dan perencanaan. Kerja sama spontan lebih fleksibel dan muncul tanpa rencana sebelumnya, sedangkan kerja sama kontrak lebih terstruktur dengan kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.



3. Ancaman terhadap Gotong Royong

Meskipun gotong royong telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, nilai-nilai ini tidak lepas dari ancaman yang dapat mengikis semangat kebersamaan. Perubahan gaya hidup, pengaruh budaya asing, dan perkembangan teknologi modern menjadi beberapa faktor yang dapat menurunkan praktik gotong royong dalam masyarakat. Berikut beberapa ancaman utama yang dapat memengaruhi keberlanjutan gotong royong:

Pola Hidup Praktis dan Instan

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup telah mendorong munculnya pola hidup yang lebih praktis dan instan. Masyarakat cenderung mencari solusi cepat untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga aktivitas gotong royong mulai tergeser. Misalnya, dalam konteks urbanisasi, masyarakat kota lebih memilih jasa berbayar untuk menyelesaikan pekerjaan yang dulunya dilakukan secara gotong royong, seperti membersihkan lingkungan atau memperbaiki fasilitas umum.

Pola hidup praktis ini juga menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap proses kerja sama yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih lama. Hal ini lambat laun dapat mengikis rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Sikap Individualitas

Sikap **individualitas** semakin menonjol di era modern ini, terutama di daerah perkotaan. Banyak orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Individualisme ini berlawanan dengan semangat gotong royong yang menekankan kebersamaan dan kolaborasi. Orang lebih sibuk dengan urusan pribadi, pekerjaan, atau gaya hidupnya, sehingga mereka kurang terlibat dalam aktivitas sosial yang memerlukan kerja sama.

Sikap individualis juga membuat orang lebih jarang berinteraksi dengan tetangga atau komunitas sekitar. Padahal, interaksi sosial yang intensif merupakan salah satu fondasi kuat dari gotong royong.

Sikap Egois

Selain individualisme, sikap egois juga menjadi ancaman serius bagi gotong royong. Egoisme membuat individu hanya peduli pada keuntungan atau kenyamanan pribadi, tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain atau masyarakat luas. Sikap ini membuat orang enggan berkontribusi dalam kegiatan gotong royong karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas tersebut.

Sikap egois ini semakin terlihat dalam kegiatan-kegiatan komunitas di mana hanya sebagian kecil dari masyarakat yang berpartisipasi, sementara yang lain lebih memilih untuk tidak terlibat. Akibatnya, kegiatan gotong royong menjadi kurang efektif dan semangat kebersamaan mulai pudar.

Sikap Materialistis

Sikap materialistis, yaitu kecenderungan mengutamakan materi di atas segala hal, juga dapat menjadi ancaman terhadap gotong royong. Dalam masyarakat yang semakin terobsesi dengan harta dan status sosial, partisipasi dalam gotong royong sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan.



Contoh sifat egois adalah tidak membudayakan mengantri – Shutterstock.com.1336129406

Orang-orang lebih memilih mencari keuntungan materi secara individu daripada berkontribusi untuk kesejahteraan kolektif.

Materialisme juga dapat menggeser nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong dengan nilai transaksi atau imbalan. Gotong royong yang dulunya dilakukan secara sukarela bisa berubah menjadi kegiatan yang memerlukan upah atau bayaran, yang pada akhirnya mengikis semangat asli dari gotong royong itu sendiri.

Pengaruh Budaya Asing

Pengaruh budaya asing juga turut mengancam keberlangsungan gotong royong di Indonesia. Globalisasi membawa masuk nilai-nilai dari luar yang sering kali berbeda dengan budaya asli masyarakat Indonesia. Gaya hidup yang lebih individualistik dan kompetitif yang diperkenalkan melalui media massa atau produk-produk budaya global dapat melemahkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

Pengaruh ini sering kali meresap melalui konsumsi budaya pop, seperti film, musik, atau media sosial, yang memperkuat nilai-nilai kebebasan individu dan kepentingan pribadi di atas kerja sama kelompok. Jika tidak diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai lokal, pengaruh ini dapat merusak semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.



Jejak Pancasila

Dulu, masyarakat sering bergotong royong dalam membangun rumah, membantu sesama secara sukarela. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan pola hidup yang lebih praktis, kini banyak desa yang lebih memilih menggunakan jasa tukang atau kontraktor untuk membangun rumah, mengurangi partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa kebersamaan dan mengurangi nilai gotong royong yang sebelumnya sangat kuat dalam budaya Indonesia.



*Gotong royong pembangunan rumah –
Shutterstock.com.2424051297*

Contoh Soal

Jelaskan beberapa ancaman terhadap kelangsungan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat!

Jawaban:

Beberapa ancaman terhadap kelangsungan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat antara lain: pola hidup praktis dan instan yang mendorong masyarakat mencari solusi cepat dan mengabaikan kerjasama, sikap individualistis yang membuat orang lebih mementingkan kepentingan pribadi, sikap egois yang mengurangi partisipasi dalam kegiatan bersama, dan sikap materialistis yang lebih menekankan keuntungan pribadi daripada kontribusi sosial.

Pembahasan:

Nilai gotong royong di Indonesia tengah terancam oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung lebih praktis dan egois. Pola hidup praktis mendorong masyarakat untuk memilih cara cepat menyelesaikan masalah tanpa melibatkan kerjasama. Selain itu, sikap individualisme yang lebih mementingkan diri sendiri mengurangi rasa kebersamaan dalam berinteraksi sosial, sedangkan sikap egois dan materialistis menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang menguntungkan bersama. Perubahan ini berpotensi melemahkan solidaritas sosial yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.



4. Menghidupkan Kembali Semangat Gotong Royong di Era Modern

Meskipun berbagai ancaman telah memengaruhi keberlangsungan gotong royong, masih ada banyak cara untuk melestarikan nilai-nilai ini agar tetap relevan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui upaya pendidikan, peran aktif pemerintah, serta penyebaran nilai-nilai gotong royong, masyarakat dapat terus mempertahankan semangat kebersamaan yang sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Berikut beberapa langkah penting dalam melestarikan gotong royong:

Pendidikan dan Sosialisasi Pentingnya Gotong Royong

Salah satu cara utama untuk melestarikan gotong royong adalah melalui **pendidikan** dan **sosialisasi**. Nilai-nilai gotong royong harus diajarkan sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan formal maupun nonformal harus menekankan pentingnya kebersamaan, tolong-menolong, dan kepedulian sosial.

Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, dapat memainkan peran penting dengan mengintegrasikan kegiatan gotong royong dalam kurikulum. Misalnya, mengadakan kegiatan kerja bakti di sekolah atau mengajak siswa terlibat dalam aksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh dengan memahami betapa pentingnya gotong royong dalam menjaga harmoni sosial.

Peran Aktif Pemerintah dan Lembaga Masyarakat

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam melestarikan gotong royong. Peran aktif pemerintah dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti kerja bakti, perbaikan infrastruktur desa, atau pembangunan fasilitas umum. Pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan-kegiatan sosial berbasis gotong royong.

Selain pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat seperti organisasi keagamaan, karang taruna, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai gotong royong. Lembaga-lembaga ini dapat menginisiasi program-program sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, seperti kegiatan pembersihan lingkungan, pembangunan sarana umum, atau bantuan kepada warga yang membutuhkan.



Jejak Pancasila

Di Jepang, salah satu bentuk gotong royong yang sangat terlihat adalah "Kuyou-Kai" (komunitas kerja sama lingkungan). Masyarakat setempat secara rutin mengadakan kegiatan bersih-bersih kota dan peduli lingkungan tanpa melibatkan pemerintah atau pihak ketiga. Masyarakat Jepang sangat menjaga kebersihan dan saling membantu dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan hijau. Gotong royong ini juga diperkuat dengan adanya regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan.



Sungai dan lingkungan sekitar sungai di Jepang sangat bersih – Shutterstock.com.2515171171

Mempromosikan dan Menyebarluaskan Nilai-Nilai Gotong Royong

Mempromosikan nilai-nilai gotong royong melalui berbagai media juga penting dalam menjaga relevansi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersamaan. Media massa, baik cetak maupun digital, dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarluaskan pesan-pesan tentang pentingnya gotong royong. Kampanye sosial yang mengangkat tema gotong royong dapat menginspirasi masyarakat untuk kembali mempraktikkan nilai-nilai tersebut.

Selain itu, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda. Dengan teknologi yang berkembang, gotong royong dapat dipromosikan melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, dengan konten-konten yang kreatif dan menarik. Menggunakan cara ini, nilai-nilai gotong royong bisa lebih mudah diterima oleh generasi muda yang mungkin lebih akrab dengan dunia digital.

Mengintegrasikan Gotong Royong dalam Kehidupan Sehari-Hari

Cara lain untuk melestarikan gotong royong adalah dengan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus menjadikan gotong royong sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun tempat kerja. Contoh sederhana seperti saling membantu tetangga, bekerja sama dalam kegiatan lingkungan, atau bergotong royong dalam acara keluarga adalah cara-cara nyata untuk menjaga semangat gotong royong tetap hidup.

Pemerintah desa atau kelurahan juga bisa mendorong praktik gotong royong melalui kegiatan-kegiatan rutin, seperti kerja bakti mingguan atau bulanan. Ini tidak hanya memperkuat rasa solidaritas tetapi juga menjaga lingkungan tetap bersih dan aman. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut, gotong royong dapat terus dipraktikkan dan dipelihara.

Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan Gotong Royong dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, dan mengapa gotong royong masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?

Jawaban:

Gotong royong adalah kegiatan sosial yang melibatkan kerjasama antar individu dalam suatu kelompok atau masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nilai gotong royong mencakup kebersamaan, tolong-menolong, dan persatuan. Konsep ini masih relevan karena membantu mempererat hubungan sosial, meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan masalah, dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

Pembahasan:

Gotong royong adalah bagian penting dari budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama. Dalam konteks sosial, kegiatan ini menumbuhkan rasa solidaritas, meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan, dan mempererat hubungan antar warga. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai gotong royong membantu masyarakat bekerja sama mengatasi tantangan, seperti saat membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum, tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Hal ini menjadikan gotong royong relevan untuk menjaga keharmonisan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan merancang dan mempresentasikan ide atau aksi nyata untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong di era modern, serta melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menjaga budaya luhur Indonesia.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang.
2. Pilih salah satu ide atau aksi berikut atau kembangkan sendiri:
 - ▷ Program gotong royong digital (contoh: crowdfunding atau donasi online untuk warga sekitar).
 - ▷ Kampanye sosial "Ayo Kembali Gotong Royong" di sekolah atau lingkungan.
 - ▷ Kegiatan kerja sama nyata seperti bakti sosial atau bersih-bersih lingkungan sekolah.
3. Rancang aksi kelompok kalian dengan menjelaskan:
 - ▷ Apa nama dan tujuan kegiatan kalian?
 - ▷ Siapa saja yang harus dilibatkan?
 - ▷ Apa saja langkah-langkah konkret pelaksanaannya?
 - ▷ Bagaimana cara memantau keberhasilan kegiatan tersebut?
4. Buatlah poster, infografis, atau paparan lisan untuk mempresentasikan hasil rancangan kalian.
5. Setelah semua kelompok presentasi, diskusikan bersama:
 - ▷ Ide atau aksi mana yang paling realistis untuk dilakukan di lingkungan sekolah atau masyarakat?
 - ▷ Apa dampak positif jika semangat gotong royong terus dijaga?

Rangkuman

1. Kerja Sama dalam Kehidupan Bergotong Royong

Kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya gotong royong, yang telah menjadi landasan dalam membangun solidaritas sosial. Konsep kerja sama ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang lebih utama daripada kepentingan pribadi, seperti yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, yang melibatkan proses interaksi sosial dan kolaborasi antar pihak untuk memecahkan masalah bersama atau berbagi tanggung jawab.

Kerja sama dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan urgensinya, yaitu:

- a. **Kerja sama spontan:** Terjadi secara tiba-tiba, sering sebagai reaksi terhadap situasi mendesak, seperti membantu korban bencana.
- b. **Kerja sama langsung:** Melibatkan partisipasi langsung dari anggota masyarakat dalam aktivitas terorganisir, seperti gotong royong membersihkan lingkungan.
- c. **Kerja sama kontrak:** Berdasarkan kesepakatan formal atau informal yang memiliki aturan dan tanggung jawab jelas, seperti proyek pembangunan infrastruktur.
- d. **Kerja sama tradisional:** Didasarkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun, seperti upacara adat dan pembangunan rumah bersama.

Kerja sama sangat penting dalam menjaga kohesi sosial, karena manfaatnya mencakup penguatan ikatan sosial, efisiensi, solidaritas, pengurangan ketimpangan sosial, daya tahan masyarakat, rasa tanggung jawab bersama, dan memperluas jaringan dukungan sosial.

2. Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat

Gotong royong merupakan nilai budaya yang sangat penting di Indonesia, yang mencakup kebersamaan, tolong-menolong, rela berkorban, dan persatuan. Semangat gotong royong ini mencerminkan kontribusi kolektif tanpa pamrih untuk kesejahteraan bersama. Nilai-nilai dalam gotong royong sangat vital dalam menjaga hubungan sosial yang sehat dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama di masyarakat.

Istilah gotong royong ini memiliki banyak variasi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya "Meuseuraya" di Aceh, "Marsialap ari" di Sumatera Utara, "Batobo" di Sumatera Barat, dan lainnya, yang masing-masing mengacu pada bentuk kerja sama sosial yang khas di daerah tersebut, mulai dari kegiatan pertanian, perbaikan rumah, hingga acara adat.

3. Ancaman terhadap Gotong Royong

Meskipun gotong royong merupakan nilai yang kuat dalam masyarakat Indonesia, berbagai ancaman dapat mengikis semangat kebersamaan ini. Beberapa ancaman utama termasuk:

- a. **Pola hidup praktis dan instan:** Perkembangan teknologi yang mendorong pola hidup serba cepat dan efisien membuat masyarakat kurang peduli terhadap aktivitas yang membutuhkan kerja sama, seperti membersihkan lingkungan secara bersama-sama.
- b. **Sikap individualitas:** Banyak orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, yang menghambat partisipasi dalam kegiatan gotong royong.
- c. **Sikap egois:** Banyak individu hanya peduli pada kenyamanan dan keuntungan pribadi, yang menyebabkan kurangnya kontribusi dalam kegiatan gotong royong.

- d. **Sikap materialistis:** Ketergantungan pada keuntungan materi menggeser nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang dulunya dilakukan secara sukarela.
- e. **Pengaruh budaya asing:** Globalisasi memperkenalkan nilai-nilai individualistis yang bertentangan dengan semangat gotong royong yang mengutamakan kebersamaan.

4. Menghidupkan Kembali Semangat Gotong Royong di Era Modern

Walaupun berbagai ancaman terhadap gotong royong ada, ada banyak cara untuk melestarikan semangat gotong royong di era modern. Salah satunya adalah dengan **pendidikan dan sosialisasi** nilai-nilai gotong royong, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Melalui pendidikan formal dan nonformal, nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dapat diajarkan, sehingga generasi muda dapat memahami pentingnya gotong royong.

Pemerintah juga berperan aktif dalam **mendorong partisipasi masyarakat** melalui program-program pembangunan yang melibatkan kerja sama, seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, atau perbaikan infrastruktur desa. Selain itu, **media massa dan media sosial** dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan nilai-nilai gotong royong, agar lebih mudah diterima oleh generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

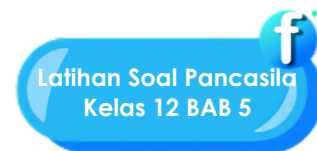
Mengintegrasikan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Masyarakat harus menjadikan gotong royong sebagai bagian dari rutinitas mereka, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun tempat kerja. Pemerintah desa atau kelurahan bisa mendorong praktik gotong royong melalui kegiatan rutin seperti kerja bakti mingguan atau bulanan, yang tidak hanya memperkuat rasa solidaritas tetapi juga menjaga lingkungan tetap bersih dan aman.

Latihan Soal

1. Kerja sama dalam masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Apa yang menjadi ciri khas dari kerja sama tradisional di Indonesia?
 - A. Kerja sama yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya
 - B. Kerja sama yang dilakukan berdasarkan kontrak formal dengan perjanjian yang jelas
 - C. Kerja sama yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat dan sering kali terkait dengan nilai-nilai budaya setempat
 - D. Kerja sama yang mengharuskan semua pihak terlibat dalam aktivitas sosial
 - E. Kerja sama yang dilakukan hanya dalam situasi darurat atau mendesak
2. Apa saja nilai utama yang terkandung dalam praktik gotong royong yang merupakan budaya khas masyarakat Indonesia?
 - A. Kebersamaan, tolong-menolong, kesetaraan, dan persatuan
 - B. Individualitas, efisiensi, keuntungan pribadi, dan tanggung jawab sosial
 - C. Kompetisi, kebebasan individu, dan keinginan untuk berprestasi
 - D. Materialisme, persaingan sosial, dan kecenderungan pada hasil finansial
 - E. Pemisahan tugas, delegasi tanggung jawab, dan penyelesaian mandiri
3. Dalam konteks kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, seperti dalam gotong royong, mengapa penting untuk menjaga sikap saling pengertian dan toleransi di antara anggota masyarakat?
 - A. Karena tanpa sikap toleransi, semua anggota masyarakat akan merasa tidak dihargai
 - B. Karena toleransi dapat menciptakan ketidakpedulian terhadap konflik sosial
 - C. Agar setiap individu bisa mempertahankan sikap egoisnya dalam kelompok
 - D. Karena saling pengertian justru memperburuk hubungan antar individu
 - E. Agar semua pihak mendapatkan hasil yang merugikan kelompok lain
4. Apa yang menjadi ancaman utama terhadap pelaksanaan gotong royong di masyarakat Indonesia pada era modern?
 - A. Meningkatnya rasa solidaritas antar individu
 - B. Perkembangan teknologi yang menciptakan pola hidup praktis dan instan
 - C. Masyarakat yang semakin peduli terhadap kepentingan bersama
 - D. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial berbasis gotong royong
 - E. Menurunnya pengaruh budaya asing dalam kehidupan masyarakat
5. Jika masyarakat mengalami penurunan semangat gotong royong akibat pengaruh budaya asing, bagaimana strategi yang efektif untuk menghidupkan kembali semangat tersebut di era modern?
 - A. Menghentikan konsumsi media sosial yang membawa budaya asing
 - B. Menumbuhkan sikap individualis agar setiap orang bisa mandiri
 - C. Mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai gotong royong melalui media sosial dan kampanye
 - D. Mengisolasi masyarakat dari pengaruh luar dengan membatasi akses informasi global

- E. Membatasi kegiatan gotong royong hanya untuk masalah darurat dan krisis
6. Apa peran pemerintah dalam melestarikan gotong royong dalam kehidupan masyarakat?
- A. Mengeluarkan kebijakan yang membatasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial
 - B. Mendorong partisipasi aktif warga dalam program-program sosial berbasis gotong royong
 - C. Menyediakan fasilitas sosial tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan
 - D. Meningkatkan individualisme di masyarakat agar masyarakat tidak bergantung satu sama lain
 - E. Mengurangi program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat
7. Dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, sikap kesetaraan penting untuk menciptakan rasa keadilan sosial. Apa dampak positif dari sikap kesetaraan dalam kerja sama?
- A. Menyebabkan ketimpangan dalam kontribusi antar individu
 - B. Menjamin bahwa setiap kontribusi dihargai dan tidak ada yang merasa diabaikan
 - C. Membuat anggota masyarakat merasa lebih terisolasi dan tidak dihargai
 - D. Mengurangi semangat kolektif dan mendorong persaingan individual
 - E. Mengurangi efisiensi karena terlalu banyak orang yang terlibat

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Koentjaraningrat. (1993). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Dikutip dari naskah asli di Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutrisno, Mudji, & Hendar Putranto. (2005). Teori-Teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Nugroho, Riant. (2009). Negara, Pasar, dan Masyarakat: Dinamika Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. (1963). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
- Kleden, Ignas. (2006). Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
- Effendi, Choirul. (2005). Gotong Royong Sebagai Sistem Nilai dan Praktek Sosial. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryadi, Dwi. (2014). Masyarakat dan Budaya di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



BAB 6

LEMBAGA NEGARA

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Mandiri

Memiliki kemampuan untuk memahami struktur pemerintahan Indonesia dan menyusun solusi atau penyelesaian terkait masalah kewenangan lembaga negara yang dapat memperkuat sistem pemerintahan secara independen.

▷ Bernalar Kritis

Mampu menganalisis dan mengkritisi tugas, peran, dan kewenangan lembaga negara dengan menggunakan logika dan penalaran yang objektif.

Tujuan Pembelajaran: Kenali Pahlawan di Balik Pemerintahan

1. Mengenal Lebih Dekat Lembaga-Lembaga Negara Indonesia

- ▷ Memahami jenis-jenis lembaga negara yang ada, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- ▷ Mengetahui nama dan fungsi dasar dari masing-masing lembaga negara.

2. Mengupas Kedudukan Strategis Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan

- ▷ Menjelaskan peran dan posisi lembaga negara dalam struktur pemerintahan.
- ▷ Memahami bagaimana setiap lembaga berhubungan satu sama lain dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Negara, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Sistem Pemerintahan, Politik.

3. Menjelajahi Fungsi Kunci Lembaga Negara dalam Pemerintahan

- ▷ Mampu merinci tugas utama yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara.
- ▷ Mengetahui kewenangan spesifik yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menjaga fungsi pemerintahan.

4. Menyelami Peran Lembaga Negara di Berbagai Aspek Kehidupan

- ▷ Menganalisis kontribusi lembaga negara di bidang politik, seperti pengambilan kebijakan dan peraturan.
- ▷ Menelaah peran lembaga negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi masyarakat secara langsung.



1. Makna Lembaga Negara: Pilar Kestabilan Negara

Pengertian Lembaga Negara

Tahukah kamu, bahwa lembaga negara memiliki kekuasaan khusus yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan tugas negara? Mereka akan memastikan negara berjalan sesuai hukum! Tanpa lembaga-lembaga ini, roda pemerintahan tidak akan berfungsi dengan baik.

Tugas dan Fungsi Lembaga Negara

Tugas lembaga negara meliputi pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap penerapan hukum dan undang-undang. Lembaga ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, serta mengontrol jalannya sistem kenegaraan, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kategori Konsep Lembaga Negara

Lembaga negara dapat dikategorikan berdasarkan berbagai pendekatan, salah satunya adalah berdasarkan fungsi dan kedudukan mereka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

a. Lembaga Negara Utama (*Primary State Organs*)

Lembaga-lembaga yang memiliki dasar langsung dari konstitusi, yang perannya esensial dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka adalah pilar utama dari sistem pemerintahan, dan setiap tugas serta kewenangannya diatur secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Contoh:

Lembaga-lembaga ini mencakup tiga cabang utama kekuasaan dalam konsep trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

b. Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State Organs*)

Lembaga negara penunjang penting untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena menyediakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi negara. Lembaga-lembaga ini dibentuk melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dan bekerja di bidang-bidang yang spesifik.

Contoh:

- ▷ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- ▷ Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- ▷ Komisi Yudisial (KY)

c. Lembaga Independen (*Independent State Institutions*)

Lembaga negara yang memiliki otonomi tersendiri dan tidak berada langsung di bawah kendali eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga-lembaga ini diciptakan untuk mengelola isu-isu spesifik yang memerlukan pengawasan dan pengelolaan independen, bebas dari campur tangan politik. Lembaga-lembaga ini sering kali bertanggung jawab langsung kepada presiden atau parlemen.

Contoh:

- ▷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- ▷ Ombudsman Republik Indonesia

- ▷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

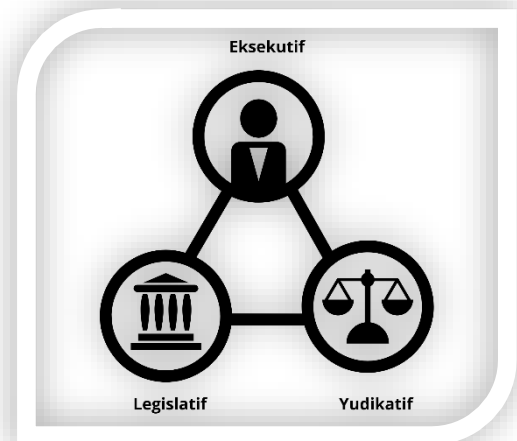
d. Lembaga Negara Sui Generis (Khusus)

Lembaga ini berbeda dari lembaga negara lainnya karena memiliki karakteristik atau peran yang unik. Salah satu contoh lembaga sui generis adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR memiliki peran yang unik sebagai lembaga permusyawaratan, yang pada masa lalu pernah menjadi lembaga tertinggi negara. Namun, setelah amandemen UUD NRI 1945, peran MPR lebih difokuskan pada fungsi konstitusional tertentu, seperti mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta melantik presiden dan wakil presiden.

Trias Politika Lembaga Negara

Trias Politika adalah konsep dasar pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu tangan atau lembaga, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme.

Ketiga cabang kekuasaan ini memiliki fungsi, peran, dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling terkait dan saling mengawasi (*checks and balances*). Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana Trias Politika diterapkan dalam lembaga negara di Indonesia:



Trias Politika – Penerbit

- a. **Kekuasaan Eksekutif:** Kekuasaan eksekutif di Indonesia dijalankan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif, mengelola administrasi negara, serta merumuskan kebijakan publik. Presiden juga berperan dalam bidang hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan.
- b. **Kekuasaan Legislatif:** Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua lembaga ini, bersama-sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menetapkan kebijakan anggaran negara.
- c. **Kekuasaan Yudikatif:** Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya dijalankan secara adil.

Prinsip Checks and Balances

Dalam sistem Trias Politika, terdapat prinsip checks and balances yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan cabang lainnya. Hal ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang. Contoh mekanisme checks and balances di Indonesia termasuk:

- ▷ DPR memiliki hak untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Presiden, termasuk mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- ▷ Presiden memiliki hak untuk memveto undang-undang yang dianggap tidak sesuai, meskipun veto tersebut bisa dibatalkan oleh DPR dengan prosedur tertentu.

- ▷ Lembaga yudikatif, melalui Mahkamah Konstitusi, memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
- ▷ Komisi Yudisial berfungsi untuk memastikan bahwa hakim tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam proses peradilan.

Contoh Soal

Apa perbedaan utama antara "Lembaga Negara Utama" dan "Lembaga Negara Penunjang" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Sebutkan contoh dari masing-masing kategori tersebut!

Jawaban:

Lembaga Negara Utama adalah lembaga-lembaga yang memiliki fungsi utama dalam menjalankan tugas negara yang ditetapkan oleh konstitusi, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA).

Lembaga Negara Penunjang adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas negara dan demokrasi, tetapi tidak secara langsung menjalankan fungsi utama negara. Contohnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pembahasan:

Lembaga Negara Utama di Indonesia adalah bagian integral dari struktur ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan Lembaga Negara Penunjang berfungsi untuk membantu lembaga-lembaga utama dalam melaksanakan tugasnya, seperti halnya KPU yang mengatur pemilihan umum atau BPK yang memeriksa keuangan negara. Kedua jenis lembaga ini berfungsi dalam sistem *checks and balances* yang ada dalam demokrasi Indonesia.



Jejak Pancasila

KPK sering kali menjadi sorotan atas keberhasilannya dalam menuntaskan kasus korupsi besar di Indonesia. Salah satu contoh kasus penting adalah penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara pada tahun 2020 yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. KPK berhasil mengungkap keterlibatannya dalam penyalahgunaan anggaran bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi, mencerminkan betapa pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi.



Gedung KPK – Shutterstock.com.2588119099



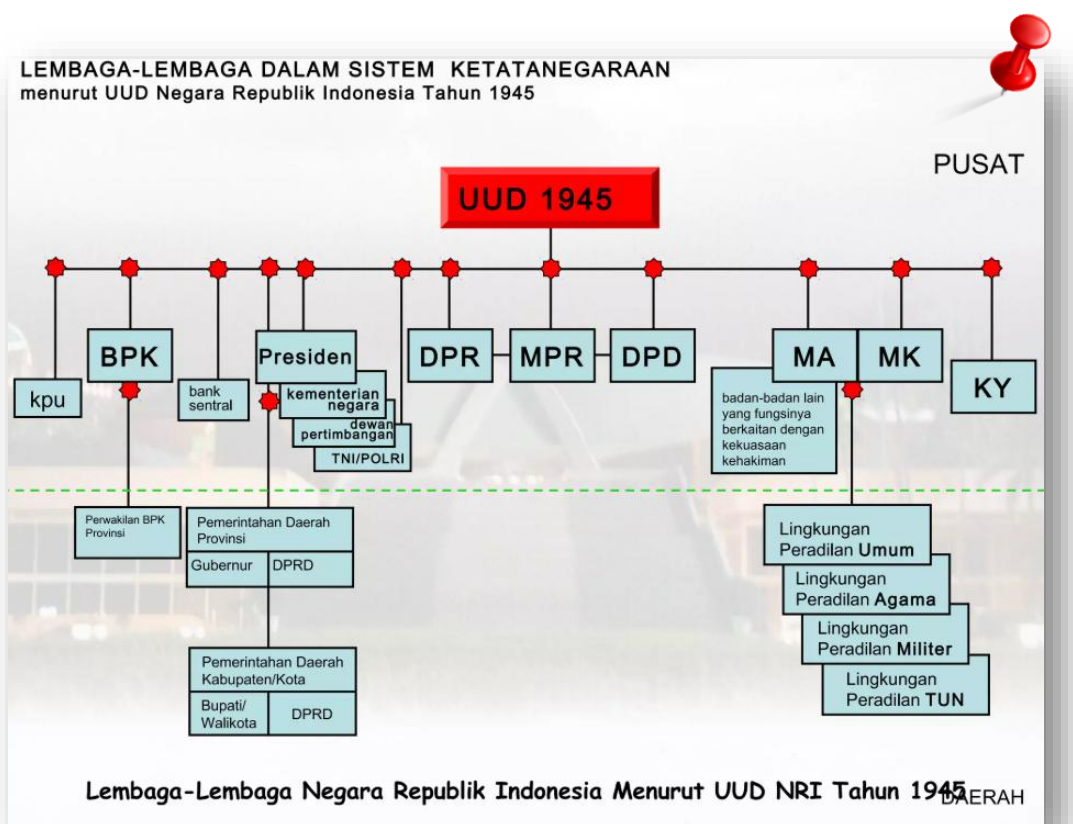
2. Tugas dan Peran Lembaga Negara: Penggerak Pemerintahan

Menurut UUD NRI Tahun 1945

Pernahkah kamu membaca bahwa kedudukan lembaga negara di Indonesia diatur secara jelas dalam UUD 1945? Setelah era Reformasi, amandemen UUD 1945 benar-benar mengubah sistem ketatanegaraan kita! Amandemen ini memberikan kedudukan yang lebih spesifik bagi lembaga-lembaga negara, membuat struktur pemerintahan lebih kompleks namun lebih teratur. Sebelumnya, UUD versi asli hanya mencakup beberapa lembaga saja, tetapi sekarang, aturan tentang lembaga negara jauh lebih rinci dan mendalam.

Setiap lembaga negara diatur secara konstitusional untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem Trias Politika. Dalam UUD NRI 1945, terdapat pengaturan yang jelas mengenai:

- Kekuasaan eksekutif, yang dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- Kekuasaan legislatif, yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bekerja sama dalam fungsi legislasi.
- Kekuasaan yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan menjaga konstitusionalitas hukum dan menegakkan keadilan.



Lembaga Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 – Bahan Sosialisasi MPR 2020

Lembaga Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa lembaga negara utama yang diakui dan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur lembaga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945:

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014: Mengatur fungsi, kedudukan, dan tugas lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Fokusnya adalah pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah.
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 (revisi No. 3 Tahun 2009): Menetapkan Mahkamah Agung (MA) sebagai badan yudikatif tertinggi, yang bertugas menegakkan hukum di pengadilan tingkat kasasi dan pengawasan terhadap peradilan.
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (revisi No. 8 Tahun 2011): Membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, menangani sengketa antar-lembaga negara, dan menyelesaikan sengketa pemilu.
- 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 (revisi No. 18 Tahun 2011): Mengatur Komisi Yudisial (KY), yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.
- 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006: Membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tugas melakukan audit keuangan negara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Ketentuan Mengenai Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Dalam UUD NRI Tahun 1945, diatur secara rinci mengenai kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR):

- ▷ Kedudukan: Lembaga perwakilan tertinggi, yang terdiri dari DPR dan DPD.
- ▷ Fungsi: Menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, MPR memiliki fungsi konstitusional untuk urusan besar negara.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

- ▷ Kedudukan: Lembaga legislatif utama, berfungsi sebagai wakil rakyat.
- ▷ Fungsi: Membuat undang-undang, menyetujui anggaran (APBN), dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah (UU No. 17 Tahun 2014).

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

- ▷ Kedudukan: Lembaga legislatif yang mewakili daerah, bekerja bersama DPR dalam hal tertentu.
- ▷ Fungsi: Menyampaikan usulan, masukan, dan pengawasan terkait otonomi daerah serta perimbangan pusat-daerah (UU No. 17 Tahun 2014).

d. Presiden:

- ▷ Kedudukan: Kepala negara dan kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan eksekutif.
- ▷ Fungsi: Menjalankan kebijakan negara, menjalankan undang-undang, merumuskan kebijakan luar negeri, dan menjaga ketertiban umum. Kewenangan presiden diatur dalam Pasal 4-17 UUD NRI 1945.

e. Mahkamah Agung (MA):

- ▷ Kedudukan: Lembaga yudikatif tertinggi.
- ▷ Fungsi: Menegakkan hukum di tingkat kasasi, mengawasi peradilan, dan menangani perselisihan antarlembaga di bawah MA (UU No. 14 Tahun 1985, revisi No. 3 Tahun 2009).

f. Mahkamah Konstitusi (MK):

- ▷ Kedudukan: Lembaga yudikatif dengan wewenang konstitusional.
- ▷ Fungsi: Menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa lembaga negara, serta menyelesaikan sengketa pemilu (UU No. 24 Tahun 2003, revisi No. 8 Tahun 2011).

g. Komisi Yudisial (KY):

- ▷ Kedudukan: Lembaga independen dalam kekuasaan kehakiman.
- ▷ Fungsi: Mengawasi dan menjaga kehormatan hakim, serta menjaga independensi peradilan (UU No. 22 Tahun 2004, revisi No. 18 Tahun 2011).

h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

- ▷ Kedudukan: Lembaga pemeriksa keuangan negara.
- ▷ Fungsi: Mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara, memberikan laporan kepada DPR dan DPD untuk memastikan akuntabilitas (UU No. 15 Tahun 2006).

Contoh Soal

Jelaskan perbedaan fungsi antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menurut UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait!

Jawaban:

Mahkamah Agung (MA) berfungsi menegakkan hukum di tingkat kasasi, mengawasi jalannya peradilan di bawahnya, serta menyelesaikan perselisihan antar-peradilan di bawah MA. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta memutus pembubaran partai politik dan pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden.

Pembahasan:

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan berbeda sesuai pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Agung, berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 (yang telah direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2009), menjalankan kekuasaan kehakiman umum dan bertugas menegakkan hukum melalui putusan kasasi, serta melakukan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi (berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 dan revisinya UU No. 8 Tahun 2011) berperan khusus dalam menjaga konstitusionalitas hukum, terutama dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. MK juga menangani konflik kewenangan lembaga negara, sengketa pemilu, dan proses hukum yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembagian fungsi ini menunjukkan spesialisasi dalam penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia.



3. Pengaruh Lembaga Negara: Dampak bagi Kehidupan Masyarakat

Lembaga negara di Indonesia tidak hanya menjalankan tugas-tugas formal dalam pemerintahan, tetapi juga punya peran besar dalam berbagai aspek kehidupan kita! Setiap bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya punya kebutuhan yang berbeda, dan lembaga negara didesain khusus untuk memenuhi tuntutan di setiap bidang tersebut. Jadi, peran mereka jauh lebih luas dari sekadar menjalankan hukum, mereka benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah peran lembaga negara dalam beberapa bidang utama:

Bidang Politik

Dalam bidang politik, peran lembaga negara sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Beberapa lembaga negara yang berperan dalam bidang politik meliputi:

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR mewakili rakyat dalam proses pembuatan kebijakan politik melalui fungsi legislasinya. DPR juga bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks politik, DPR memiliki peran penting dalam proses legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah.
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD): DPD mewakili kepentingan daerah dalam proses politik nasional, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, sumber daya alam, dan keuangan daerah. Peran DPD memastikan bahwa suara daerah didengar di tingkat nasional.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): MPR berperan dalam urusan-urusan konstitusional, termasuk pelantikan presiden dan wakil presiden serta amandemen terhadap UUD 1945. MPR juga menjadi forum tertinggi untuk musyawarah dalam urusan-urusan besar yang menyangkut masa depan bangsa.

Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, lembaga negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan keuangan, dan mengawasi persaingan usaha. Lembaga-lembaga yang berperan di bidang ekonomi meliputi:

- Bank Indonesia (BI): Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab atas kestabilan moneter di Indonesia. Peran utama BI adalah mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mengontrol inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
- Kementerian Keuangan: Kementerian Keuangan bertugas mengelola keuangan negara, termasuk pengelolaan anggaran, penerimaan pajak, dan perencanaan kebijakan fiskal. Peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara transparan dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): KPPU berperan mengawasi praktik persaingan usaha di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen serta menjaga agar persaingan di pasar tetap sehat.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): BKPM memiliki peran penting dalam mengatur dan mempromosikan investasi di Indonesia. Lembaga ini memastikan iklim investasi yang kondusif bagi investor dalam dan luar negeri serta mengawal proyek-proyek investasi strategis.



Bank Indonesia – Shutterstock.com.2543343677

Bidang Sosial

Dalam bidang sosial, lembaga negara berperan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak sosial warga negara. Beberapa lembaga yang berperan dalam bidang sosial adalah:

- a. Kementerian Sosial: Kementerian ini bertugas untuk menangani masalah kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, dan penanganan masalah sosial lainnya seperti perlindungan anak dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): BPJS merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola program jaminan sosial, baik kesehatan (BPJS Kesehatan) maupun ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS berperan dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat dalam hal kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

Bidang Budaya

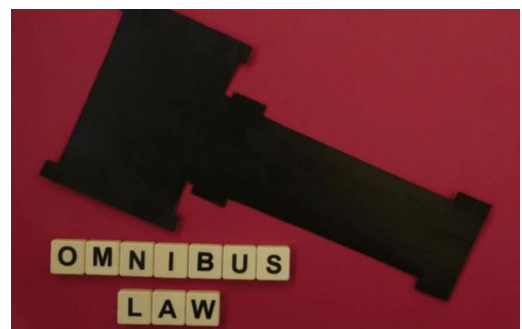
Lembaga negara juga berperan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional. Beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam bidang budaya meliputi:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Kementerian ini bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Kementerian ini juga mengatur kebijakan di bidang riset dan teknologi untuk mendukung kemajuan bangsa.
- b. Badan Pelestarian Cagar Budaya: Lembaga ini bertugas melestarikan warisan budaya Indonesia, baik benda cagar budaya maupun kawasan cagar budaya. Mereka juga terlibat dalam upaya perlindungan terhadap situs-situs bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi.
- c. Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa: Badan ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas kebangsaan. Badan ini memastikan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan berfungsi sebagai bahasa pemersatu.



Jejak Pancasila

Salah satu contoh penting dari peran DPR adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada tahun 2020. Meskipun mendapat banyak protes dari berbagai kalangan, DPR akhirnya menyetujui undang-undang ini. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia, meskipun ada kritik terkait potensi pengabaian hak pekerja. Keputusan ini menunjukkan bagaimana DPR dapat memengaruhi jalannya perekonomian dan kebijakan tenaga kerja melalui undang-undang.



Omnibus Law – Shutterstock.com.2588119099

Bidang Pertahanan

Dalam bidang pertahanan, lembaga negara berperan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Beberapa lembaga yang memiliki peran utama di bidang pertahanan meliputi:

- a. Kementerian Pertahanan: Kementerian ini bertugas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pertahanan negara. Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan berbagai lembaga militer dan non-militer untuk memastikan keamanan nasional.
- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI): TNI bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara dari ancaman luar. Peran TNI sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, baik dalam konteks pertahanan wilayah maupun menjaga ketertiban dalam situasi darurat.

Bidang Keamanan

Di bidang keamanan, lembaga negara berperan untuk menjaga ketertiban, melindungi warga negara, dan mencegah terjadinya ancaman terhadap keamanan publik. Beberapa lembaga yang berperan di bidang keamanan meliputi:

- a. Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Polri bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Polri memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dalam negeri serta mencegah dan menangani tindak kejahatan.
- b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): BNPT bertugas untuk mencegah dan menangani ancaman terorisme di Indonesia. Lembaga ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan serta melakukan langkah-langkah penanggulangan terorisme.

Contoh Soal

Jelaskan secara singkat fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!

Jawaban:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif utama di Indonesia yang memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia.

Pembahasan:

DPR memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR bertugas untuk membuat undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, DPR juga bertanggung jawab untuk menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah dan mengawasi pelaksanaannya. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan menganalisis peran lembaga negara di berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan), serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam memahami dampak nyata lembaga negara bagi masyarakat.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang.
2. Pilih salah satu aspek kehidupan berikut:
 - ▷ Politik (contoh: proses pemilu, perumusan kebijakan)
 - ▷ Ekonomi (contoh: kebijakan Bank Indonesia, pengawasan keuangan)
 - ▷ Sosial Budaya (contoh: regulasi pendidikan, perlindungan sosial)
 - ▷ Pertahanan dan Keamanan (contoh: kebijakan TNI/Polri, stabilitas nasional)
3. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut:
 - ▷ Lembaga negara apa saja yang terlibat di bidang tersebut?
 - ▷ Apa peran konkret lembaga-lembaga tersebut?
 - ▷ Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari?
 - ▷ Apa yang terjadi jika lembaga-lembaga itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik?
4. Susun hasil diskusi dalam bentuk tabel analisis atau presentasi singkat.

Rangkuman

1. Makna Lembaga Negara: Pilar Kestabilan Negara

Lembaga negara di Indonesia memiliki kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan tugas negara. Tugas lembaga negara meliputi pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap penerapan hukum dan undang-undang. Lembaga negara penting untuk menjaga sistem kenegaraan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya:

- a. Lembaga Negara Utama (*Primary State Organs*): Mempunyai dasar langsung dari konstitusi, berperan esensial dalam pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State Organs*): Berfungsi memperkuat demokrasi, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- c. Lembaga Independen (*Independent State Institutions*): Memiliki otonomi tersendiri, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman.
- d. Lembaga Negara Sui Generis: Memiliki karakteristik atau peran unik, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Tugas dan Peran Lembaga Negara: Penggerak Pemerintahan

Lembaga negara di Indonesia diatur dalam UUD 1945, yang memberikan kedudukan lebih spesifik bagi lembaga negara pasca Reformasi. Setiap lembaga negara menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem Trias Politika, yaitu:

- a. **Kekuasaan Eksekutif:** Dipegang oleh Presiden, yang berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk menjalankan kebijakan negara.
- b. **Kekuasaan Legislatif:** Dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berfungsi untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
- c. **Kekuasaan Yudikatif:** Dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berfungsi menegakkan hukum dan mengawasi konstitusionalitas peraturan.

Lembaga negara tersebut diatur lebih rinci melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 untuk DPR dan DPD, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 untuk MA, serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 untuk MK.

3. Pengaruh Lembaga Negara: Dampak bagi Kehidupan Masyarakat

Lembaga negara berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam pemerintahan, tetapi juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Setiap lembaga negara memiliki peran unik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

- a. **Bidang Politik:** Lembaga negara seperti DPR, DPD, dan MPR berperan menjaga keberlangsungan demokrasi, mengawasi pemerintah, serta memastikan kepentingan daerah dan masyarakat diperhatikan.
- b. **Bidang Ekonomi:** Lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan menjaga kestabilan ekonomi, mengelola keuangan negara, serta mengawasi praktik persaingan usaha.

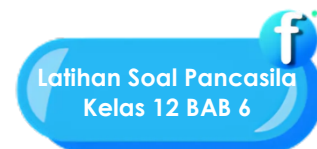
- c. **Bidang Sosial:** Lembaga seperti Kementerian Sosial dan BPJS berperan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
- d. **Bidang Budaya:** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pelestarian Cagar Budaya berperan menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional.
- e. **Bidang Pertahanan:** Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar.
- f. **Bidang Keamanan:** Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam menjaga ketertiban, melindungi warga negara, dan menangani ancaman terorisme.

Latihan Soal

1. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan khusus yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan tugas negara adalah...
 - A. Mahkamah Agung
 - B. Presiden
 - C. Komisi Pemilihan Umum
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - E. Komisi Yudisial
2. Tugas utama lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah...
 - A. Membuat undang-undang
 - B. Menyusun kebijakan luar negeri
 - C. Melaksanakan kebijakan publik dan mengawasi hukum
 - D. Mengelola keuangan negara
 - E. Mengawasi pemilu
3. Dalam pembagian kekuasaan berdasarkan sistem Trias Politika, lembaga negara yang berfungsi untuk membuat undang-undang adalah...
 - A. Dewan Perwakilan Daerah
 - B. Mahkamah Konstitusi
 - C. Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Komisi Yudisial
 - E. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Prinsip checks and balances dalam sistem Trias Politika berfungsi untuk...
 - A. Memperkuat kekuasaan eksekutif
 - B. Menghindari terpusatnya kekuasaan
 - C. Mengurangi kekuasaan legislatif
 - D. Meningkatkan kekuasaan yudikatif
 - E. Meningkatkan wewenang presiden
5. Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah...
 - A. Mahkamah Konstitusi
 - B. Komisi Pemilihan Umum
 - C. Badan Pemeriksa Keuangan
 - D. Dewan Perwakilan Rakyat
 - E. Komisi Pemberantasan Korupsi
6. Lembaga yang memiliki peran dalam menjaga dan mengawasi perilaku hakim di Indonesia adalah...
 - A. Komisi Yudisial

- B. Mahkamah Agung
 - C. Badan Pemeriksa Keuangan
 - D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - E. Mahkamah Konstitusi
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengatur fungsi dan kedudukan lembaga legislatif di Indonesia, seperti...
- A. Mahkamah Agung
 - B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - C. Komisi Yudisial
 - D. Dewan Perwakilan Rakyat
 - E. Komisi Pemilihan Umum

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Monteiro, Josef M. *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: PT Buku Seru, 2014. ISBN 979-341-156-2.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Mahfud MD, Mohammad. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Sumarno, B. "Transformasi Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2019.



BAB 7

DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia

Menghargai prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur agama dan moral, serta menjaga akhlak mulia dalam setiap keputusan dan tindakan terkait kehidupan demokratis di masyarakat.

▷ Bernalar Kritis

Menganalisis berbagai konsep demokrasi dengan berpikir kritis, mengidentifikasi perbedaan sistem demokrasi, serta menghubungkan teori dan praktik demokrasi dalam kehidupan nyata, termasuk dalam pemilu dan proses pengambilan keputusan secara demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Hak Pilih, Musyawarah untuk Mufakat, Era Reformasi.

Tujuan Pembelajaran: Dimulai dari Pemilih hingga Pemimpin!

1. Menggali Makna dan Ragam Demokrasi

- ▷ Memahami definisi demokrasi dan bagaimana konsep ini diartikan oleh berbagai tokoh.
- ▷ Menjelaskan berbagai klasifikasi demokrasi seperti demokrasi langsung, tidak langsung, dan perwakilan.
- ▷ Mengidentifikasi perbedaan antara demokrasi formal, demokrasi materiel, dan demokrasi campuran.

2. Mengenali Esensi dan Ciri Khas Demokrasi

- ▷ Memahami ciri-ciri utama yang membedakan demokrasi dari sistem pemerintahan lainnya, seperti partisipasi aktif warga negara, kebebasan berpendapat, dan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil.
- ▷ Menganalisis bagaimana ciri-ciri demokrasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di negara demokratis.

3. Menelusuri Perjalanan Demokrasi di Indonesia

- ▷ Menelusuri sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia mulai dari masa Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Era Reformasi.
- ▷ Menjelaskan tokoh-tokoh penting, nama-nama kabinet, dan peristiwa khas pada tiap periode untuk memahami bagaimana demokrasi di Indonesia berubah dan beradaptasi.
- ▷ Mengidentifikasi tantangan dan pencapaian dari setiap periode dalam konteks penerapan demokrasi di Indonesia.

4. Menghidupkan Nilai-nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

- ▷ mempraktikkan proses pengambilan keputusan secara demokratis, misalnya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam konteks sekolah atau masyarakat.
- ▷ Mencontohkan bagaimana pemilu dan hak pilih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya keterlibatan aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
- ▷ Menghargai perbedaan pendapat dan memahami peran setiap individu dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.



F I T R I



1. Hakikat Demokrasi: Esensi dan Makna

Pengertian Demokrasi

Pernah membayangkan bagaimana demokrasi bekerja di berbagai negara, termasuk Indonesia? Sistem ini sebenarnya sederhana: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi memungkinkan kita semua terlibat dalam proses pemerintahan, baik melalui pemilihan pemimpin maupun dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah beberapa pendapat dari tokoh-tokoh terkenal yang mengartikan demokrasi dengan sudut pandang yang beragam:

a. Abraham Lincoln

Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya. Prinsip ini menekankan pada pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

b. John Dewey

Dewey menyatakan bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga cara hidup yang mengedepankan partisipasi, kerjasama, dan interaksi sosial. Baginya, demokrasi adalah alat untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui proses pendidikan dan pembelajaran bersama.

c. Giovanni Sartori

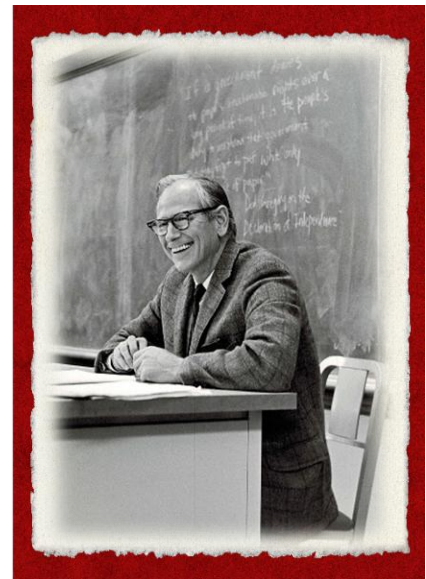
Sartori memandang demokrasi sebagai suatu mekanisme politik yang memungkinkan perubahan kekuasaan secara damai dan teratur. Menurutnya, demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada aturan hukum yang jelas, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta adanya jaminan kebebasan berpendapat.

d. Joseph A. Schumpeter

Dalam pandangan Schumpeter, demokrasi adalah metode politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui kompetisi yang adil dalam pemilihan umum. Baginya, demokrasi tidak hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga pentingnya persaingan sehat antara calon pemimpin yang memberikan berbagai pilihan bagi rakyat.

e. Robert A. Dahl

Dahl menyebutkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar bagi setiap warganya. Dalam pandangannya, demokrasi harus memiliki pluralisme dan keterbukaan sehingga warga negara bebas untuk berpartisipasi, mengkritik, dan memilih tanpa adanya paksaan atau diskriminasi.



Robert A. Dahl – Wikipedia.org

Ciri-ciri Pokok Berjalannya Proses Demokrasi Suatu Negara

Proses demokrasi yang sehat dapat dilihat dari beberapa ciri pokok yang mendasarinya. Ada tiga ciri utama yang menunjukkan bahwa sebuah negara menjalankan demokrasi dengan baik:

a. Partisipasi Aktif

Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, baik dalam bentuk pemilihan umum, referendum, atau dalam organisasi masyarakat. Partisipasi ini memungkinkan rakyat untuk berperan dalam pengambilan keputusan.

b. Akses terhadap Informasi

Dalam demokrasi, warga negara berhak mendapatkan informasi yang benar dan transparan mengenai aktivitas pemerintah. Informasi yang terbuka mendorong akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

c. Kebebasan Berekspresi

Demokrasi menjamin kebebasan berekspresi bagi seluruh warga negara, termasuk hak untuk mengkritik pemerintah tanpa takut akan intimidasi. Kebebasan ini menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kriteria Menentukan Situasi Demokratis

Untuk menilai apakah suatu negara benar-benar menjalankan demokrasi, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Kekuasaan

Dalam demokrasi, kekuasaan harus dibagi secara adil di antara berbagai lembaga negara. Tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi.

b. Keadilan

Demokrasi yang sehat adalah yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh warganya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau ras. Keadilan menjadi fondasi dalam memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.

c. Kesejahteraan

Demokrasi tidak hanya soal politik, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat. Negara yang demokratis berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

d. Peradaban

Demokrasi menghargai perbedaan budaya dan pandangan, dan bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang universal.

e. Afeksi

Pemerintahan demokratis harus menjamin adanya rasa aman dan kepedulian terhadap warganya, di mana kebijakan yang dibuat mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat.

f. Keamanan

Situasi demokratis terjamin apabila pemerintah mampu menyediakan keamanan bagi seluruh rakyatnya, baik secara fisik maupun mental. Hal ini mencakup perlindungan dari ancaman luar maupun dalam negeri.

g. Kebebasan

Kebebasan menjadi elemen pokok dalam demokrasi. Ini mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta kebebasan beragama. Dengan adanya kebebasan, masyarakat bisa berkontribusi secara lebih aktif dalam pembangunan negara.

Klasifikasi Demokrasi

Demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek penting yang menentukan bagaimana sistem pemerintahan tersebut dijalankan. Berikut adalah beberapa klasifikasi demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat, titik berat perhatian, dan wewenang serta hubungan antar alat kelengkapan negara:

a. Cara Menyampaikan Pendapat

Cara penyampaian pendapat dalam demokrasi bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Berikut penjelasannya:

▷ Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai berbagai masalah yang mempengaruhi mereka. Contoh demokrasi langsung adalah referendum, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memberikan suara langsung terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. Sistem ini memastikan bahwa suara rakyat didengar secara langsung tanpa perwakilan.

▷ Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung, atau sering disebut juga sebagai demokrasi perwakilan, melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Para wakil ini bertugas untuk mewakili aspirasi rakyat dan membuat keputusan atas nama mereka. Sistem ini lebih umum digunakan di negara-negara dengan populasi besar, di mana partisipasi langsung tidak praktis dilakukan.

▷ Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat (Referendum)

Beberapa negara menerapkan sistem perwakilan dengan pengawasan langsung melalui referendum. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap keputusan yang diambil oleh wakil mereka, terutama dalam isu-isu besar. Referendum memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam proses legislatif, meskipun keputusan utama diserahkan kepada para wakil mereka.

b. Titik Berat Perhatian

Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi demokrasi formal, demokrasi materiel, dan demokrasi campuran:

▷ Demokrasi Formal

Demokrasi formal menitikberatkan pada pelaksanaan hukum dan prosedur demokratis secara formal. Sistem ini memandang bahwa selama prosedur hukum dilaksanakan, maka sebuah negara bisa disebut sebagai demokrasi, terlepas dari hasil yang diperoleh. Demokrasi formal cenderung lebih memperhatikan proses dibandingkan hasil atau substansi dari kebijakan yang diambil.

▷ Demokrasi Materiel

Berbeda dengan demokrasi formal, demokrasi materiel fokus pada hasil dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Demokrasi ini menekankan bahwa tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat, dan hukum serta prosedur yang ada harus diarahkan untuk mencapai

kesejahteraan tersebut. Di sini, demokrasi tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga dari substansi kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

▷ Demokrasi Campuran

Demokrasi campuran adalah kombinasi antara demokrasi formal dan demokrasi materiel. Sistem ini tidak hanya mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan hasil kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, demokrasi campuran bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

c. Wewenang dan Hubungan Antar Alat Kelengkapan Negara

Berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial:

▷ Demokrasi Parlementer

Dalam demokrasi parlementer, pemerintah atau kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri. Parlemen memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja pemerintah dan dapat membubarkan kabinet apabila dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik. Sistem ini umumnya memungkinkan hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, di mana legislatif memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan.

▷ Demokrasi Presidensial

Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif, dan tidak dapat dibubarkan oleh parlemen. Sistem ini mengedepankan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan masing-masing cabang kekuasaan memiliki wewenang yang terpisah dan saling mengawasi. Demokrasi presidensial bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Ciri-ciri dan Prinsip Demokrasi

Demokrasi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem pemerintahan lain. Ciri-ciri ini menjadi dasar bagaimana demokrasi berjalan dan memastikan bahwa hak-hak rakyat dihormati.



Penyampaian Pendapat dalam Demokrasi - Penerbit

Prinsip-prinsip demokrasi menurut Melvin I. Urofsky memberikan panduan mendalam mengenai fondasi demokrasi yang sehat dan berfungsi.

a. Ciri-ciri Demokrasi

Ada beberapa ciri pokok yang menunjukkan bahwa suatu negara menerapkan sistem demokrasi, antara lain:

▷ **Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil**

Pemilihan umum merupakan ciri utama dari demokrasi, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih dan dipilih. Proses ini harus bebas dan adil, yang berarti tidak ada kecurangan atau manipulasi, dan semua suara memiliki nilai yang sama.

▷ **Pemerintahan Berdasarkan Hukum**

Demokrasi menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pemerintahan. Artinya, setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum tersebut harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum.

▷ **Kebebasan Berpendapat dan Pers yang Independen**

Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat bagi semua warga negara, serta kebebasan pers untuk melaporkan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kebebasan ini penting agar masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif, dan pers berfungsi sebagai pengawas independen terhadap kekuasaan pemerintah.

▷ **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Demokrasi berkomitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan pribadi, hak untuk beribadah sesuai keyakinan, serta hak untuk berkumpul dan berserikat. Perlindungan ini menjamin bahwa setiap warga negara dihormati dan dilindungi oleh negara.

▷ **Partisipasi Aktif Warga Negara**

Demokrasi mengharuskan adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Partisipasi ini bisa dalam bentuk pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, atau memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

▷ **Adanya Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pemerintah dalam sistem demokrasi harus akuntabel atau bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Mekanisme pengawasan seperti lembaga legislatif, lembaga independen, dan masyarakat sipil berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat.



Partisipasi warga pada pemilu 2019 –
Shutterstock.com.2017571270

Pada Pemilu 2019, sekitar 81% pemilih di Indonesia menggunakan hak suara mereka, mencerminkan prinsip "pemerintahan dari rakyat" ala Abraham Lincoln. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman hak-hak pemilih penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan pemerintahan yang akuntabel.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi Menurut Melvin I. Urofsky

Melvin I. Urofsky mengidentifikasi beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan demokrasi yang sehat. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek berikut:

▷ Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah prinsip bahwa pemerintah harus beroperasi berdasarkan hukum dan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi. Ini mencakup pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah serta perlindungan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai panduan utama yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan batas-batasnya.

▷ Pemilihan yang Demokratis

Pemilihan yang demokratis memastikan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas, terbuka, dan adil. Prinsip ini mendukung pemilihan yang reguler, kompetitif, dan bebas dari intimidasi atau kecurangan, sehingga rakyat dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

▷ Negara dan Pemerintah Daerah

Demokrasi yang sehat membutuhkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip ini mendorong desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sambil tetap berada di bawah kerangka nasional.

▷ Pembuatan Hukum

Proses pembuatan hukum harus terbuka, partisipatif, dan berdasarkan pada konsensus. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi atau memberikan masukan dalam proses legislasi, dan hukum yang dihasilkan harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

▷ Peradilan yang Independen

Sistem peradilan yang independen adalah pilar demokrasi yang memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa campur tangan eksekutif atau legislatif. Hakim harus bebas untuk membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta tanpa tekanan politik, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan adil dan transparan.

▷ Kekuasaan Presiden

Kekuasaan presiden harus dibatasi oleh konstitusi dan mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan. Presiden berfungsi sebagai kepala

negara, namun kekuasaannya diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif agar tidak bertindak sewenang-wenang.

▷ Media yang Bebas

Media bebas berperan penting dalam demokrasi karena menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada publik. Media berfungsi sebagai pengawas independen terhadap pemerintah dan sebagai platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Kebebasan pers memungkinkan terjadinya debat publik dan pencerahan yang diperlukan dalam proses demokrasi.

▷ Peran Kelompok Kepentingan

Demokrasi memberikan ruang bagi berbagai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Kelompok kepentingan ini bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti organisasi sosial, kelompok advokasi, atau sektor bisnis. Partisipasi mereka memperkaya proses pembuatan kebijakan dengan berbagai perspektif yang beragam.

▷ Hak Publik untuk Tahu

Rakyat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Transparansi ini memungkinkan publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut akuntabilitas. Informasi yang mudah diakses dan terbuka membantu warga negara untuk terlibat aktif dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan dengan tepat.

▷ Melindungi Hak-hak Minoritas

Demokrasi harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Hal ini memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas tetap dihormati dan diberi hak yang setara, meskipun mereka bukan bagian dari mayoritas. Melindungi hak-hak minoritas penting untuk mencegah tirani mayoritas dan menjaga keadilan sosial.

▷ Kontrol Sipil terhadap Militer

Militer harus berada di bawah kendali otoritas sipil dan bukan sebaliknya. Ini memastikan bahwa militer tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengambil alih pemerintahan secara paksa. Kontrol sipil terhadap militer menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan sejalan dengan kepentingan rakyat.

Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi dalam demokrasi?

Jawaban:

Kebebasan berekspresi dalam demokrasi menjamin hak setiap individu untuk menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah tanpa rasa takut akan intimidasi.

Pembahasan:

Kebebasan berekspresi adalah salah satu elemen fundamental dalam demokrasi. Hal ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, memberikan kritik, dan menyampaikan pandangan mereka terhadap kebijakan yang ada tanpa adanya paksaan atau penyensoran dari pemerintah.



2. Dinamika Demokrasi: Tantangan dalam Perjalanan di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerapan demokrasi yang telah mengalami berbagai perubahan. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perjalanan waktu, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan signifikan sesuai dengan tantangan dan kondisi pada setiap era.

Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan negara lain, karena didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai dasar hukum. Berikut adalah prinsip-prinsip utama demokrasi di Indonesia:

a. Membangun Sistem Politik Demokrasi

Indonesia menerapkan sistem politik yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan secara kolektif. Sistem politik ini diatur sedemikian rupa agar mewakili berbagai kepentingan masyarakat melalui lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD.



*Proses pemilu merupakan kegiatan demokrasi di Indonesia –
Shutterstock.com.2425208177*

b. Demokratisasi Indonesia

Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami proses demokratisasi yang signifikan. Proses ini melibatkan pembaruan sistem politik, pelibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan, dan penguatan hak asasi manusia. Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

c. Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia Menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara serta pembagian kekuasaan di antara lembaga negara. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila, yang mengutamakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Ahmad Sanusi, seorang cendekiawan Indonesia, merumuskan sepuluh pilar demokrasi yang menjadi fondasi utama dalam Demokrasi Pancasila. Pilar-pilar ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan Pancasila:

1) Kedaulatan Rakyat

Prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat dijalankan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti DPR dan DPD.

2) Negara Berdasarkan Hukum

Demokrasi Pancasila menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, hak-hak warga negara dapat dilindungi, dan pemerintah beroperasi dalam batas-batas yang diatur oleh hukum.

3) Peradilan yang Merdeka

Prinsip ini menekankan pentingnya lembaga peradilan yang independen dan tidak tunduk pada tekanan dari pihak manapun. Hakim dalam sistem Demokrasi Pancasila memiliki kebebasan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan keadilan.

4) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pancasila dan UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Demokrasi Pancasila menghormati dan melindungi hak-hak ini sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjaga martabat dan kebebasan setiap warga negara.

5) Kebebasan Pers dan Informasi

Kebebasan pers adalah unsur penting dalam demokrasi, karena pers berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah dan penyampai informasi kepada rakyat. Dalam Demokrasi Pancasila, kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, sehingga informasi yang disampaikan akurat dan tidak memecah belah.

6) Musyawarah untuk Mufakat

Sila keempat Pancasila menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan dalam sistem Demokrasi Pancasila idealnya dibuat melalui proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan seluruh rakyat.

7) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip keadilan sosial adalah tujuan akhir dari Demokrasi Pancasila, yang berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, tanpa ada diskriminasi. Keadilan ini mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial.

8) Pemerintahan yang Bertanggung Jawab

Pemerintah dalam Demokrasi Pancasila harus bertanggung jawab kepada rakyat dan melaksanakan tugasnya dengan transparan serta akuntabel. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga pengawasan dan mekanisme kontrol yang memungkinkan rakyat memantau kinerja pemerintah.

9) Pengawasan terhadap Kekuasaan

Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut.

10) Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan berkontribusi terhadap kepentingan umum.



Jejak Pancasila

Sejak 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam proses demokrasi, beralih dari sistem Orde Baru yang otoriter ke era reformasi yang lebih terbuka. Salah satu tonggak pentingnya adalah dimulainya pemilihan presiden secara langsung pada Pemilu 2004, yang menjadi simbol kemajuan demokrasi di Indonesia.



Kegiatan kampanye SBY 2004 – Wikipedia.org

Periodisasi Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

a. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang berbasis pada Konstitusi RIS 1949 dan kemudian UUDS 1950. Pemerintahan sering berganti karena krisis kabinet yang terjadi akibat ketidakstabilan politik.

▷ Nama-nama Kabinet:

- Kabinet Natsir (1950-1951): Dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Masyumi, kabinet ini berfokus pada upaya memperkuat negara kesatuan.
- Kabinet Wilopo (1952-1953): Menyaksikan insiden "Peristiwa Tanjung Morawa" yang melibatkan konflik agraria.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955): Berfokus pada pemilu pertama dan kebijakan luar negeri bebas aktif.
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956): Menyelenggarakan Pemilu 1955, pemilu pertama yang demokratis.
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957): Menghadapi ketegangan akibat pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta.

▷ Peristiwa Khas:

- Pemilu 1955: Pemilu pertama Indonesia yang diikuti banyak partai dan bertujuan memilih anggota DPR dan Konstituante.
- Konferensi Asia Afrika (1955): Berlangsung di Bandung, menjadi simbol kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika, dengan peran utama dari Indonesia di bawah PM Ali Sastroamidjojo.

▷ **Tokoh Berperan:**

- Mohammad Natsir: Perdana Menteri pertama di era Demokrasi Liberal, fokus pada integrasi negara.
- Soekarno: Presiden pertama, berperan dalam diplomasi internasional dan penguatan identitas nasional.
- Ali Sastroamidjojo: Pemimpin Konferensi Asia Afrika dan tokoh penting dalam kebijakan bebas aktif Indonesia.

b. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 1965)

Dalam periode ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945. Soekarno memusatkan kekuasaan dan menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin yang mengurangi peran partai politik.

▷ **Nama-nama Kabinet:**

Kabinet Kerja I-V (1959-1965): Kabinet ini diketuai langsung oleh Soekarno dengan fokus utama pada stabilitas dan program pembangunan, yang berubah sesuai kebutuhan politik.

▷ **Peristiwa Khas:**

- Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Menandai kembalinya ke UUD 1945 dan pembubaran Konstituante.
- Pembentukan Nasakom: Mempersatukan nasionalis, agama, dan komunis sebagai pilar pemerintahan.
- Konfrontasi dengan Malaysia: Dimulai pada 1963 sebagai protes terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap kolonial.
- Gerakan 30 September (G30S/PKI): Peristiwa kudeta gagal pada tahun 1965 yang melibatkan PKI, mengakhiri era Demokrasi Terpimpin.

▷ **Tokoh Berperan:**

- Soekarno: Memegang kendali penuh, mempromosikan Nasakom dan memperluas pengaruh komunis.
- D.N. Aidit: Ketua PKI yang mendukung konsep Nasakom dan peran PKI dalam pemerintahan.
- Soeharto: Jenderal Angkatan Darat yang berperan penting dalam penumpasan G30S/PKI, kemudian menjadi tokoh utama di era berikutnya.

c. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966 – 1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Pemerintahan Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila, yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga disertai dengan kontrol ketat terhadap kebebasan berpolitik.

▷ **Nama-nama Kabinet:**

- Kabinet Ampera (1966-1968): Berfokus pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik.
- Kabinet Pembangunan I-VI (1968-1998): Memprioritaskan pembangunan nasional melalui "Repelita" (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

▷ **Peristiwa Khas:**

- Pembubaran PKI: Dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966.

- Pemilu Reguler: Dilaksanakan setiap lima tahun, namun dengan kontrol ketat melalui Golkar dan pembatasan partai.
- Penumpasan Dissent: Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan peristiwa lainnya.
- Krisis Moneter: Krisis ekonomi pada 1997-1998 yang memicu demonstrasi besar-besaran, menyebabkan Soeharto mundur.

▷ **Tokoh Berperan:**

- Soeharto: Presiden dengan kekuasaan besar, yang fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi.
- M. Hatta: Wakil Presiden pertama dan tokoh pro-demokrasi yang mengkritisi Orde Baru.
- Akbar Tanjung: Tokoh Golkar yang menjadi Ketua DPR dan Menteri di masa Orde Baru.

d. Demokrasi Era Reformasi (1998 – Sekarang)

Era Reformasi dimulai dengan pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, menandai awal dari pembaruan sistem politik yang lebih demokratis. Indonesia menerapkan pemilihan presiden secara langsung dan membentuk lembaga-lembaga independen untuk mengawasi pemerintah.

▷ **Nama-nama Kabinet:**

- Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999): Dipimpin oleh B.J. Habibie, berfokus pada transisi demokrasi.
- Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001): Di bawah Abdurrahman Wahid, dengan agenda reformasi dan penguatan hak asasi manusia.
- Kabinet Gotong Royong (2001-2004), Kabinet Indonesia Bersatu I & II (2004-2014), Kabinet Kerja (2014-2019), dan Kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang): Mewakili pemimpin yang berbeda dengan agenda reformasi lanjutan.

▷ **Peristiwa Khas:**

- Amandemen UUD 1945: Dilakukan secara bertahap untuk memperkuat demokrasi, mengurangi kekuasaan presiden, dan menjamin hak asasi manusia.
- Pemilihan Presiden Langsung (2004): Pemilihan presiden pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.
- Pembentukan KPK (2003): Sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi.
- Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah: Diberlakukan untuk memperkuat pemerintah daerah dan desentralisasi kekuasaan.

▷ **Tokoh Berperan:**

- B.J. Habibie: Presiden yang memulai reformasi demokrasi dan kebebasan pers.
- Megawati Soekarnoputri: Presiden perempuan pertama yang melanjutkan reformasi politik.
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Presiden pertama yang dipilih langsung, berfokus pada stabilitas demokrasi.
- Joko Widodo (Jokowi): Presiden yang menekankan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.

Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan prinsip "Kedaulatan Rakyat" dalam Demokrasi Pancasila? Jelaskan dengan memberikan contoh implementasinya di Indonesia!

Jawaban:

Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam demokrasi yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang bebas dan adil, seperti yang diatur dalam UUD 1945.

Pembahasan:

Prinsip kedaulatan rakyat menjamin bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan negara. Contoh implementasinya adalah Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilakukan setiap lima tahun sekali, di mana rakyat memilih langsung wakilnya di DPR dan Presiden.





3. Pemilihan Umum: Suara Rakyat, Penentu Masa Depan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi, yang memungkinkan rakyat memilih perwakilan mereka di pemerintahan. Pemilu di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih pemimpin berdasarkan kehendak rakyat.

Hakikat Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mendefinisikan hakikat pemilu dalam demokrasi:

a. Pentingnya Pemilihan Umum dalam Demokrasi

Pemilihan umum memberikan rakyat kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin dan wakil mereka. Hal ini menjadi cara utama bagi rakyat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada mereka. Dengan pemilu, pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan teratur, menghindari konflik dan kekacauan politik.

b. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan proses yang diselenggarakan secara periodik untuk memilih pejabat publik. Di Indonesia, pemilu meliputi pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kepala daerah). Pemilu dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), yang menjadi panduan utama dalam penyelenggaraannya.

c. Tujuan Pemilihan Umum

- ▷ Memilih pemimpin yang dapat mewakili aspirasi rakyat.
- ▷ Memastikan legitimasi pemerintahan melalui proses yang diakui oleh rakyat.
- ▷ Mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan rakyat kesempatan untuk mengganti pemimpin yang tidak efektif.
- ▷ Mendorong partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan.

Perjalanan Pemilihan Umum di Indonesia

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai pemilu yang mencerminkan dinamika politik negara. Berikut adalah beberapa pemilu penting dalam sejarah Indonesia:

a. Pemilu 1955

Pemilu pertama di Indonesia yang bertujuan memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai politik dan menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

b. Pemilu 1971

Pemilu pertama di era Orde Baru. Pada masa ini, partai politik disederhanakan menjadi hanya tiga: Golkar, PPP, dan PDI. Pemilu di era ini sering dikritik karena didominasi oleh Golkar, yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan Soeharto.

c. Pemilu 1977, 1982, dan 1987

Pemilu pada periode ini masih dalam kendali kuat Orde Baru. Meski tetap ada partisipasi rakyat, pemilu cenderung didominasi oleh Golkar yang sering memenangkan suara mayoritas.

d. Pemilu 1999

Pemilu pertama di era reformasi setelah jatuhnya Soeharto. Pemilu ini menandai kembalinya demokrasi dengan mengizinkan partai-partai baru untuk ikut serta. Terdapat 48 partai yang berkompetisi dalam pemilu ini.

e. Pemilu 2004

Pemilu pertama di mana rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sistem pemilu ini memperkuat partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin nasional secara langsung.

f. Pemilu 2009, 2014, dan 2019

Pemilu ini menunjukkan penguatan demokrasi di Indonesia dengan adanya pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung. Partisipasi masyarakat semakin besar, dan pemilu ini ditandai dengan kompetisi yang semakin terbuka dan kompetitif antar partai politik.

Pemilih Pemula dalam Demokrasi

Pemilih pemula adalah kelompok warga negara yang baru pertama kali mengikuti pemilu, umumnya adalah kaum muda. Mereka memiliki peran penting dalam demokrasi karena dapat membawa pandangan dan aspirasi baru. Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting agar mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu.

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dan diawasi oleh lembaga-lembaga independen yang memastikan prosesnya berjalan dengan adil dan transparan, yaitu:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. KPU memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan asas LUBER JURDIL.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilu, memastikan bahwa setiap tahap berjalan tanpa kecurangan, dan menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

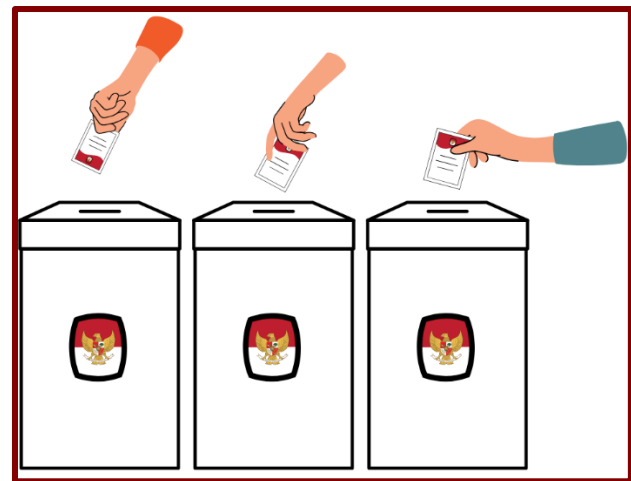
Lembaga ini mengawasi kode etik para penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, memastikan integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.

Tahapan Pemilu

Pemilu terdiri dari berbagai tahapan yang harus dilalui untuk memastikan prosesnya berjalan dengan lancar. Tahapan-tahapan ini meliputi:

1) Pendaftaran Pemilih

Proses pendataan warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Pendaftaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua warga negara yang berhak terdaftar sebagai pemilih.



Proses Pemilu – Maulart (canva)

2) Pendaftaran Peserta Pemilu

Partai politik dan calon independen yang ingin ikut dalam pemilu harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.

3) Penetapan Peserta Pemilu

Setelah diverifikasi, KPU menetapkan partai politik dan calon yang sah sebagai peserta pemilu.

4) Penetapan Jumlah Kursi

Penetapan jumlah kursi dilakukan untuk menentukan alokasi kursi di lembaga legislatif, sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan.

5) Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPD

Setiap partai politik atau calon independen mengajukan daftar calon yang akan mereka usung untuk mewakili rakyat di DPR, DPRD, dan DPD.

6) Kampanye

Masa kampanye memungkinkan peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada publik. Kampanye dilakukan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

7) Pemungutan Suara

Proses pemilihan di mana pemilih memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai yang mereka dukung. Pemungutan suara biasanya dilakukan serentak di berbagai tempat pemungutan suara (TPS).

8) Perhitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, KPU melakukan penghitungan suara untuk menentukan pemenang. Proses ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengawasan dari Bawaslu dan saksi-saksi dari peserta pemilu.

Contoh Soal

Mengapa pendidikan politik dianggap penting bagi pemilih pemula dalam sistem demokrasi?

Jawaban:

Agar pemilih pemula memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu.

Pembahasan:

Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting karena kelompok ini baru pertama kali terlibat dalam pemilihan umum dan mungkin belum sepenuhnya memahami sistem demokrasi serta peran mereka di dalamnya. Dengan pendidikan politik yang baik, mereka dapat mengetahui hak mereka untuk memilih dan tanggung jawabnya dalam memilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Ini membantu menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan mendorong partisipasi politik yang aktif serta kritis sejak usia muda.

Kegiatan Kelompok

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan mengkritisi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, menganalisis tantangan nyata yang dihadapi dalam menjaga keadilan dan kebersihan pemilu, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan solutif terkait hak pilih sebagai warga negara.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang.
2. Pelajari data berikut sebagai bahan diskusi:
3. Tantangan yang Sering Terjadi dalam Pemilu di Indonesia:
 - ▷ Politik uang.
 - ▷ Hoaks dan black campaign di media sosial.
 - ▷ Golput (tidak memilih) karena kecewa atau apatis.
 - ▷ Konflik horizontal akibat polarisasi politik.
4. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut secara kritis:
 - ▷ Menurut kalian, sejauh mana pemilu di Indonesia sudah benar-benar menjadi ajang demokratis?
 - ▷ Apa saja hambatan yang paling merusak kualitas pemilu?
 - ▷ Apa dampak buruk jika masalah-masalah tersebut terus terjadi?
 - ▷ Rancang minimal 2 solusi konkret untuk mencegah atau meminimalisir masalah tersebut, baik di tingkat sekolah, keluarga, atau masyarakat.
5. Susun hasil analisis kelompok dalam bentuk poster, infografis, atau paparan singkat.

Rangkuman

1. Hakikat Demokrasi: Esensi dan Makna

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat dalam pengambilan keputusan negara, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan pemimpin atau pembuatan kebijakan. Beberapa tokoh terkenal memiliki pandangan berbeda mengenai demokrasi:

- a. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menekankan partisipasi aktif masyarakat.
- b. John Dewey memandang demokrasi sebagai cara hidup yang mengedepankan partisipasi, kerjasama, dan interaksi sosial.
- c. Giovanni Sartori melihat demokrasi sebagai mekanisme politik yang memungkinkan perubahan kekuasaan secara damai dan teratur, dengan aturan hukum yang jelas dan pemilihan umum yang bebas.
- d. Joseph A. Schumpeter berfokus pada demokrasi sebagai metode kompetisi untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu yang adil.
- e. Robert A. Dahl menekankan pluralisme dan keterbukaan dalam demokrasi, menjamin hak-hak dasar warganya untuk berpartisipasi dan mengkritik tanpa diskriminasi.

2. Dinamika Demokrasi: Tantangan dalam Perjalanan di Indonesia

Demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan keseimbangan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Proses demokratisasi Indonesia sejak era reformasi telah melibatkan pembaruan sistem politik, pelibatan masyarakat sipil, dan penguatan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi Indonesia mencakup kedaulatan rakyat, negara berdasarkan hukum, peradilan yang merdeka, dan perlindungan hak asasi manusia. Pancasila mengedepankan musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bertanggung jawab, dengan pengawasan terhadap kekuasaan melalui checks and balances. Pilar-pilar demokrasi Pancasila meliputi:

- 1) Kedaulatan rakyat
- 2) Negara berdasarkan hukum
- 3) Peradilan yang merdeka
- 4) Perlindungan hak asasi manusia
- 5) Kebebasan pers dan informasi
- 6) Musyawarah untuk mufakat
- 7) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
- 8) Pemerintahan yang bertanggung jawab
- 9) Pengawasan terhadap kekuasaan
- 10) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966-1998), dan Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang), masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri.

3. Pemilihan Umum: Suara Rakyat, Penentu Masa Depan

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka. Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilu memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat, memastikan legitimasi pemerintahan, mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong partisipasi politik.

Pemilu di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, dimulai dari Pemilu 1955 yang pertama, Pemilu 1999 setelah era reformasi, hingga Pemilu 2004 yang mengizinkan rakyat memilih presiden langsung. Selain itu, pemilihan pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilu memiliki peran penting dalam membawa pandangan baru ke dalam sistem demokrasi.

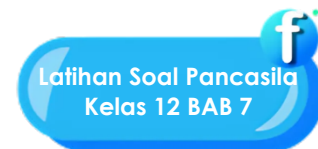
Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Proses pemilu melalui berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan anggota legislatif dan eksekutif, kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara untuk menentukan pemenang.

Latihan Soal

1. Apa pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln?
 - A. Pemerintahan yang dikendalikan oleh satu individu.
 - B. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
 - C. Pemerintahan yang diatur oleh hukum internasional.
 - D. Pemerintahan yang mengutamakan keuntungan ekonomi.
 - E. Pemerintahan yang dipimpin oleh golongan tertentu.
2. Apa ciri utama dari demokrasi yang sehat menurut materi yang dijelaskan?
 - A. Pemilihan umum yang bebas dan adil.
 - B. Pemilihan umum yang hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun.
 - C. Pemerintah yang tidak perlu menjelaskan kebijakannya kepada rakyat.
 - D. Semua warga negara dipaksa untuk memilih tanpa kecuali.
 - E. Partisipasi aktif hanya diperbolehkan oleh kelompok tertentu.
3. Dalam sistem demokrasi Indonesia, prinsip yang diutamakan dalam pengambilan keputusan adalah:
 - A. Keputusan sepihak oleh presiden.
 - B. Musyawarah untuk mufakat.
 - C. Keputusan berdasarkan konsensus internasional.
 - D. Keputusan berdasarkan pengaruh dari negara asing.
 - E. Pemilihan keputusan hanya melalui referendum.
4. Bagaimana penerapan prinsip "checks and balances" dalam demokrasi Indonesia dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan?
 - A. Dengan memberikan hak veto kepada presiden tanpa batasan.
 - B. Dengan membagi kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi.
 - C. Dengan mengutamakan keputusan eksekutif tanpa persetujuan legislatif.
 - D. Dengan memberi lebih banyak kekuasaan kepada legislatif untuk mengatur pemerintah.
 - E. Dengan memusatkan kekuasaan di satu lembaga pemerintah saja.
5. Apa saja faktor yang mendasari pentingnya demokrasi materiel dalam sistem demokrasi di Indonesia?
 - A. Fokus pada pelaksanaan prosedur hukum semata.
 - B. Pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari kebijakan yang dibuat.
 - C. Mengutamakan kepatuhan hukum tanpa mempertimbangkan dampaknya.
 - D. Pemilihan pemimpin berdasarkan hasil suara mayoritas semata.
 - E. Adanya pembatasan kebebasan untuk memilih secara bebas.
6. Dengan adanya sistem pemilu yang langsung dan bebas, bagaimana peran pemilih pemula penting dalam memajukan demokrasi Indonesia?

- A. Mereka tidak memiliki pengaruh besar dalam pemilu.
 - B. Mereka hanya bisa memilih di tingkat lokal dan bukan nasional.
 - C. Mereka membawa perspektif dan aspirasi baru yang berkontribusi pada perubahan politik.
 - D. Mereka hanya berpartisipasi di bidang sosial, bukan politik.
 - E. Mereka lebih cenderung memilih berdasarkan propaganda daripada pemikiran kritis.
7. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila dalam konteks sejarah demokrasi Indonesia?
- A. Demokrasi yang hanya mengutamakan kepentingan individu.
 - B. Demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan kesepakatan bersama dengan nilai Pancasila sebagai dasar.
 - C. Demokrasi yang diatur oleh negara-negara luar.
 - D. Demokrasi yang hanya memperhatikan kesejahteraan ekonomi.
 - E. Demokrasi yang menghapuskan kebebasan berpendapat.

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Arifin, Anwar. (2008). Komunikasi Politik dan Demokrasi. Jakarta: Balai Pustaka.

Sanusi, Ahmad. (2004). Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Urofsky, Melvin I. (2004). Democracy and the American Constitution: A History of Democracy in America. New York: HarperCollins.

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2018). Panduan Pengawasan Pemilu 2019. Jakarta: Bawaslu RI.

Kompas. (2023). "Sejarah Pemilu di Indonesia, dari 1955 hingga Era Reformasi." Diakses dari: <https://www.kompas.com>